

41170 14/10



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

RSK
GGD-403
Dwi
P-1
2010

TUGAS AKHIR - MO091336

**PENGELOLAAN POTENSI WISATA PANTAI DI
KABUPATEN BLITAR BERBASIS BUDAYA LOKAL
MASYARAKAT**

TOMI DWICAHYO
NRP 4301 100 036

Dosen Pembimbing
Drs. Mahmud Mustain, M.Sc., Ph.D.

JURUSAN TEKNIK KELAUTAN
Fakultas Teknologi Kelautan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2010

PERPUSTAKAAN ITS	
Tgl Terima	11-8-2010
Terima Dari	H
No Agenda Pp.	-



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

FINAL PROJECT - MO091336

**MANAGEMENT OF COSTAL AREA TOURISM IN
REGENCY OF BLITAR BASE LOCAL SOCIAL
CULTURE**

TOMI DWICAHYO
NRP 4301 100 036

Supervisors
Drs. Mahmud Mustain, M.Sc., Ph.D.

OCEAN ENGINEERING DEPARTMENT
Faculty of Marine Technology
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya 2010

**PENGELOLAAN POTENSI WISATA PANTAI DI
KABUPATEN BLITAR BERBASISI BUDAYA LOKAL
MASYARAKAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada
Program Studi S-1 Jurusan Teknik Kelautan
Fakultas Teknologi Kelautan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

TOMI DWICAHYO

Nrp. 4301 100 036

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :

Drs. Mahmud Mustain, M.Sc., Ph.D.



(Pembimbing)

SURABAYA

JULI 2010

“PENGELOLAAN POTENSI WISATA PANTAI DI KABUPATEN BLITAR BERBASIS BUDAYA LOKAL MASYARAKAT”

Nama Mahasiswa : Tomi Dwicahyo
NRP : 4301 100 036
Jurusan : Jurusan Teknik Kelautan
Dosen Pembimbing : Drs. Mahmud Mustain, M.Sc., Ph.D.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi tentang Pengelolaan Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat. Lokasi penelitian di Kabupaten Blitar Jatim, tepatnya kawasan wisata pantai Tambakrejo. Dengan menggunakan metode *analytic hierarchy process (AHP)* dan dengan bantuan *software Expert Choice Vession 9.0*, data primer kawasan pesisir kabupaten Blitar diolah untuk mendapatkan prioritas pengelolaan. Untuk vektor prioritas Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai prioritas utama (0.416), kemudian Masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir pantai tambakrejo (0.374) dan Investor (0.210). Sedangkan prioritas pengelolaan kawasan pesisir kabupaten Blitar yang terbesar adalah kebijakan yang bersumber pada Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat (0.332), kemudian diikuti dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana (0.249), Pengelolaan Pariwisata yang Terarah (0.220) dan Rehabilitasi dan Konservasi Pantai (0.199). Dengan Rasio Konsistensi yang memenuhi syarat dibawah 10%, yakni sebesar 5,6%.

Kata Kunci : Pengelolaan Wisata Pantai, AHP, Vektor Prioritas

**“MANAGEMENT OF COSTAL AREA TOURISM IN REGENCY OF
BLITAR BASE LOCAL SOCIAL CULTURE”**

Student Name : Tomi Dwicahyo
NRP : 4301 100 036
Departement : Ocean Engineering
Supervisor : Drs. Mahmud Mustain, M.Sc., Ph.D.

ABSTRACT

This research studi about Management of Costal Area Tourism in Regency of Blitar Base Local Social Culture. The location this research is in Regency of Blitar East Java, exactly the area of Tambakrejo. By applying the method of Analytic Hierarchy Process (AHP) and by the help of Software Expert Choice Version 9.0, the primary data of Blitar regency coastal area is analysed to get the management priority. For the priority vector of the Blitar government, (0.416) then the community who live a long the coastal area (0.374) and the investor (0.210) where as the largest management priority of Blitar regency coastal area is the policy which aims at the construction and cooperation with the society (0.332), increasing facility (0.249), directional tourism management (0.220) and rehabilitating and costal area conservation (0.199), with the consistency ratio that meets the requirement under 10%, that is 5,6%.

Key Word : Management of Costal Tourism, AHP, Vector Priority

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir guna memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa di Jurusan Teknik Kelautan, Falkutas Teknologi Kelautan - ITS, dengan judul : “PENGELOLAAN POTENSI WISATA PANTAI DI KABUPATEN BLITAR BERBASIS BUDAYA LOKAL MASYARAKAT”. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Bapak Ir. Murdjito, M.Sc, M.Eng, selaku Ketua Jurusan Teknik Kelautan, FTK-ITS.
2. Bapak Drs. Mahmud Mustain, M.Sc, Ph.D, selaku Sekretaris Jurusan Teknik Kelautan, FTK-ITS dan dosen pembimbing yang banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Ir. Wisnu Wardhana, SE, M.Sc, Ph.D, selaku dosen wali yang banyak memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis.
4. Seluruh dosen-dosen Jurusan Teknik Kelautan, FTK-ITS yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala ilmu yang diberikan.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tak langsung.

Menyadari akan keterbatasan yang ada pada diri Penulis dalam penulisan ini, maka kritik dan saran yang konkrit dan membangun dalam rangka penyempurnaan penulisan ini sangat diharapkan dari para pembaca. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi pada umumnya dan bagi Penulis sendiri pada khususnya.

Surabaya, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Batasan Masalah	2
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kawasan Pesisir	5
2.2 Pendekatan Ekowisata	5
2.3 Wisata Bahari	7
2.4 Pengelolaan Pariwisata	7
2.5 Perhitungan Rata-Rata Geometrik	9
2.6 Metode Analytic Hierarchy Process (AHP)	9
2.7 Prinsip-Prinsip Analytic Hierarchy Process	10
2.8 Tahap-Tahap Penyusunan Hirarki	13
2.9 Formulasi Matematis Pada Model Analytic Hierarchy Process	13
2.10 Perhitungan Rasio Konsistensi	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17

BAB IV KONDISI DAERAH STUDI	21
4.1 Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Blitar	21
4.2 Kondisi Geografis	23
4.3 Kondisi Kependudukan	25
4.4 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	25
4.5 Kondisi Sarana dan Prasarana	26
4.6 Deskripsi Pantai Tambakrejo	27
BAB V ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	31
5.1 Teknik Pengambilan Sampel dan Metode Pengambilan Rata-Rata Geometrik	31
5.2 Penentuan Prioritas Pengelolaan Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Blitar	32
5.2.1 Tujuan Rencana Pengelolaan Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Blitar	33
5.2.2 Level Pertama (Pelaku Pengelolaan Wisata Pantai)	33
5.2.3 Level Kedua (Bidang Pengelolaan Wisata Pantai)	34
5.2.4 Level Ketiga (Aspek Pengelolaan Wisata Pantai)	35
5.2.4.1 Bidang Ekonomi	35
5.2.4.2 Bidang Sosial	37
5.2.4.3 Bidang Budaya	38
5.2.4.4 Bidang Lingkungan	39
5.2.4.5 Bidang Hukum	40
5.2.5 Level Keempat (Alternatif Kebijakan Pengelolaan Wisata Pantai)	40
5.2.5.1 Aspek Peluang Investasi	41
5.2.5.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	42
5.2.5.3 Aspek Perilaku Masyarakat	43
5.2.5.4 Aspek Pendidikan	44
5.2.5.5 Aspek Kelestarian Budaya	45
5.2.5.6 Aspek Pengembangan Budaya	46
5.2.5.7 Aspek Kerusakan Lingkungan	47
5.2.5.8 Aspek Ketersediaan Lahan	49



5.2.5.9 Aspek Penegakan Hukum	50
5.2.5.10 Aspek Kebijakan Pemerintah	51
5.2.6 Penentuan Alternatif Kebijakan Menurut Pelaku	52
5.3 Analisa Sensitivitas Pengelolaan Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Blitar	55
5.4 Pembahasan	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	59
6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Diagram Alir Penelitian	17
Gambar 3.2	Diagram Alir Analytic Hierarchy Process	19
Gambar 4.1	Kabupaten Blitar di Peta Jawa Timur	21
Gambar 4.2	Peta Kabupaten Blitar	24
Gambar 5.1	Persentase Responden Berdasar Pelaku	31
Gambar 5.2	Model Hirarki Pengelolaan Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat	32
Gambar 5.3	Grafik Vektor Prioritas Pelaku Pengelolaan Wisata Pantai	34
Gambar 5.4	Grafik Vektor Prioritas Bidang Pengelolaan Wisata Pantai	35
Gambar 5.5	Grafik Vektor Prioritas Bidang Ekonomi Pengelolaan Wisata Pantai	36
Gambar 5.6	Grafik Vektor Prioritas Bidang Sosial Pengelolaan Wisata Pantai	37
Gambar 5.7	Grafik Vektor Prioritas Bidang Budaya Pengelolaan Wisata Pantai	38
Gambar 5.8	Grafik Vektor Prioritas Bidang Lingkungan Pengelolaan Wisata Pantai	39
Gambar 5.9	Grafik Vektor Prioritas Bidang Hukum Pengelolaan Wisata Pantai	40
Gambar 5.10	Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Peluang Investasi	42
Gambar 5.11	Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	43
Gambar 5.12	Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Perilaku Masyarakat	44
Gambar 5.13	Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Pendidikan	45
Gambar 5.14	Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Kelestarian Budaya	46
Gambar 5.15	Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Pengembangan Budaya	47
Gambar 5.16	Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Kerusakan Lingkungan	48
Gambar 5.17	Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Ketersediaan Lahan	50

Gambar 5.18	Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Penegakan Hukum	51
Gambar 5.19	Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Kebijakan Pemerintah	52
Gambar 5.20	Grafik Vektor Prioritas Alternatif Kebijakan Berdasarkan Pelaku	55
Gambar 5.21	Analisa Sensitivitas dalam program Expert Choice	55
Gambar 5.22	Grafik Nilai Vektor Prioritas Hasil Analisa Sensitivitas	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skala Dasar	11
Tabel 2.2	Indeks Random Untuk Tiap Orde Matrik	16
Tabel 4.1	Obyek Wisata Pada Kawasan Pesisir di Kabupaten Blitar	22
Tabel 4.2	Luas Desa di Kecamatan Wonotirto	23
Tabel 4.3	Penduduk dan Kepadatan 2000-2005	25
Tabel 5.1	Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasar Pelaku	33
Tabel 5.2	Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasar Bidang	34
Tabel 5.3	Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Bidang Ekonomi Pengelolaan Wisata Pantai	36
Tabel 5.4	Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Bidang Sosial Pengelolaan Wisata Pantai	37
Tabel 5.5	Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Bidang Budaya Pengelolaan Wisata Pantai	38
Tabel 5.6	Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Bidang Lingkungan Pengelolaan Wisata Pantai	39
Tabel 5.7	Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Bidang Hukum Pengelolaan Wisata Pantai	40
Tabel 5.8	Nilai Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Peluang Investasi	41
Tabel 5.9	Nilai Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	42
Tabel 5.10	Nilai Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Perilaku Masyarakat	43
Tabel 5.11	Nilai Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Pendidikan	44
Tabel 5.12	Nilai Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Kelestarian Budaya	45
Tabel 5.13	Nilai Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Pengembangan Budaya	46

Tabel 5.14	Nilai Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Kerusakan Lingkungan	48
Tabel 5.15	Nilai Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Ketersediaan Lahan	49
Tabel 5.16	Nilai Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Penegakan Hukum	50
Tabel 5.17	Nilai Vektor Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Berdasarkan Aspek Kebijakan Pemerintah	51
Tabel 5.18	Nilai Vektor Prioritas Hasil Analisa Sensitivitas	56
Tabel 5.19	Nilai Vektor Prioritas dan Rasio Konsistensi	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DATA RESPONDEN

LAMPIRAN 2. KUISIONER AHP

LAMPIRAN 3. NILAI RATA-RATA GEOMETRIK

LAMPIRAN 4. CONTOH PERHITUNGAN MANUAL

LAMPIRAN 5. TAMPILAN PROGRAM DAN OUTPUT

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Perkembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sektor ekonomi lainnya, baik secara makro maupun mikro. Terjadinya krisis yang diikuti oleh rawannya kondisi keamanan di Jawa Timur membawa dampak negatif pada dunia pariwisata.

Salah satu kendala yang dijumpai dalam pengembangan wisata di Jawa Timur adalah potensi sumberdaya wisata sebagai peluang usaha belum dimanfaatkan secara optimal. Termasuk juga pengemasan paket wisata masih kecil.

Di tengah krisis ekonomi yang merupakan muara dari sejumlah krisis yang terjadi selama ini, upaya untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu kekuatan dan harapan bagi pemulihan kembali pembangunan nasional merupakan sebuah keharusan. Kecenderungan baru bagi pengembangan pariwisata internasional, termasuk juga yang harus dikembangkan di Indonesia adalah wisata minat khusus diantaranya wisata pedesaan yang berorientasi pada alam dan budaya, melalui wisata minat khusus (alam dan budaya) yang pada umumnya dilakukan di ruang terbuka untuk belajar sesuatu tentang alam dan budaya disamping menjaga kesehatan tubuh.

Sehubungan dengan dijadikannya jalur kawasan selatan Jawa Timur, khususnya dalam rangka pengembangan jaringan perhubungan pengembangan wisata merupakan satu peluang bagi wilayah Jawa Timur bagian selatan, khususnya Kabupaten Blitar. Sebagai salah satu wilayah di bagian selatan Jawa Timur, Blitar memiliki potensi pariwisata yang belum tergarap dengan baik. Atas dasar inilah maka penelitian ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan budaya di Kabupaten Blitar.

Untuk merencanakan pengelolaan potensi wisata dengan baik, maka masyarakat disekitar lokasi dan instansi terkait (stakeholder) perlu dilibatkan didalamnya.

Dalam penentuan prioritas program pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Blitar, metode yang digunakan adalah *Analytic Hierarchy Proses (AHP)* dengan dibantu *Software Expert Choice*. Dengan metode AHP ini, beberapa kriteria dapat dilibatkan secara bersamaan dalam satu model hirarki. Di samping itu, masyarakat dan pihak investor juga dapat berperan serta dalam penentuan prioritas program pengelolaan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan potensi wisata pantai di Kabupaten Blitar berbasis budaya lokal masyarakat ?
2. Bagaimana analisa sensitivitas perubahan nilai vektor prioritas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah, dapat diambil tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini, adalah :

1. Menganalisa kebijakan pengelolaan potensi wisata pantai di Kabupaten Blitar berbasis budaya lokal masyarakat ?
2. Menganalisis sensitivitas perubahan nilai vektor prioritas ?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari studi ini adalah :

1. Mengetahui analisa kebijakan pengelolaan potensi wisata pantai di kabupaten Blitar berbasis budaya lokal masyarakat.
2. Mengetahui analisa sensitivitas perubahan nilai vektor prioritas.

1.5 Batasan Masalah

Agar lebih memudahkan analisa dan dapat dicapai satu tujuan yang diharapkan, maka perlu batasan-batasan sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar.
2. Analisa dengan menggunakan *Analytic Hierarchy Proses (AHP)*
3. Pemodelan dengan menggunakan *Software Expert Choice Version 9.0*.
4. Pelaku penelitian yang dilibatkan untuk penyusunan rencana pengelolaan potensi wisata pantai di Kabupaten Blitar berbasis budaya lokal masyarakat yaitu masyarakat pesisir, pemerintah daerah dan pihak investor.
5. Bidang yang diambil dalam penelitian ini meliputi bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Lingkungan, Hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini dibuat dengan urutan sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan adalah menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan tema penelitian, menjabarkan permasalahan dan tujuan, serta batasan-batasan masalahnya. Bab II: Tinjauan Pustaka adalah menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, juga menjelaskan hasil penelitian orang lain yang dijadikan sebagai sumber referensi. Bab III: Metodologi adalah menguraikan tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan, mulai dari prosedur awal seperti perumusan masalah dan tujuan, jalannya proses penelitian hingga tahap akhir yaitu mendapatkan penyelesaian permasalahan. Bab IV: Kondisi Daerah Studi adalah untuk menerangkan tentang kondisi umum lokasi penelitian, kondisi umum pembangunan di lokasi penelitian, potensi yang ada pada lokasi penelitian, dan diskripsi sosial ekonomi di sektor pariwisata. Bab V: Analisa hasil dan pembahasan adalah merupakan bagian yang paling penting dalam suatu laporan penelitian. Isinya menjelaskan hasil yang didapat dari pengolahan data, dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada. Bab VI: Kesimpulan Dan Saran adalah berisi kesimpulan yang didasarkan analisa pada bab sebelumnya, dan menjawab permasalahan-permasalahan yang diungkapkan di awal penelitian. Dengan keterbatasan penelitian, maka dapat merekomendasikan dalam bentuk saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kawasan Pesisir

Pesisir juga tidak dapat dipisahkan dari laut sebagaimana daratan. Bahkan pesisir mempunyai arti dan fungsi tersendiri, karena pesisir merupakan wilayah yang membatasi antara laut dan darat. Jadi boleh dikatakan disini bahwa yang menjadi perekat dan pemersatu antara lautan dan daratan adalah pesisir. Pesisir merupakan transisi antara ekosistem kehidupan laut dengan ekosistem kehidupan darat. Secara umum kawasan pesisir dapat didefinisikan sebagai ruang, dimana terjadi interaksi antara wilayah darat dengan wilayah laut dan dimana ekosistem darat mempengaruhi ekosistem laut dan sebaliknya.

Menurut Dahuri, dkk (2004), definisi kawasan pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Kearah darat kawasan pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut kawasan pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia.

2.2 Pendekatan Ekowisata

Ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Apabila ekowisata pengelolaan alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumberdaya alam untuk waktu kini dan masa mendatang.

Di dalam pemanfaatan areal untuk ekowisata mempergunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Kedua pendekatan ini dilaksanakan dengan menitik beratkan pelestarian dibanding pemanfaatan. Kemudian pendekatan lainnya

adalah pendekatan pada keberpihakan kepada masyarakat setempat agar mampu mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2003) menjelaskan terdapat beberapa prinsip pengembangan ekowisata yang harus terpenuhi. Apabila seluruh prinsip dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan yang *ecological friendly* dari pembangunan berbasis kerakyatan (*community based*). Prinsip tersebut, yaitu:

1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat
2. Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam
3. Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan *conservation tax* dapat dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif
5. Penghasilan masyarakat. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dan mendorong masyarakat menjaga kelestarian alam
6. Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya *disharmonize* dengan alam akan merusak produk wisata ekologis ini. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya lokal masyarakat
7. Daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan.

Meskipun mungkin permintaan sangat banyak tetapi daya dukunglah yang membatasi

8. Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap pemerintah. Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata maka devisa dan belanja wisatawan didorong dinikmati oleh pemerintah setempat.

2.3 Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan jenis kegiatan pariwisata yang berlandaskan pada daya tarik kelautan dan terjadi di lokasi atau kawasan yang didominasi oleh perairan dan kelautan. Daya tarik itu mencakup perjalanan dengan moda laut, kekayaan alam bahari serta peristiwa-peristiwa yang diselenggarakan di laut dan di pantai, seperti misalnya: memancing, menyelam, selancar, dayung, olahraga pantai, upacara adat yang dilakukan dilaut, serta adat istiadat dan budaya masyarakat pesisir. Menurut UU No 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha barang, pariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Bila suatu wilayah pesisir dibangun untuk rekreasi, biasanya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya juga berkembang pesat (Dahuri et. al., 2001). Dengan demikian, cakupan kegiatan wisata ini memiliki spektrum industri yang sangat luas dan bisnis yang ditawarkan sangat beragam, antara lain jasa penyedia transportasi, kapal pesiar, pengelola pulau kecil, pengelola taman laut, hotel, pemandu wisata alam, dan sebagainya. Tentunya industri-industri pendukung juga akan terbuka lebar antara lain jasa kerajinan dan cinderamata, pemasok makanan dan minuman, hiburan dan lain sebagainya. Konsep wisata bahari didasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

2.4 Pengelolaan Pariwisata

Mengingat masa depan penuh perubahan, maka pengelolaan yang baik diharapkan dapat menantisipasi perubahan tersebut dan menghindari sejauh mungkin dampak

yang kurang menguntungkan dari perubahan tersebut. Pengelolaan dan pengembangan program pariwisata memiliki arti penting, karena dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan pariwisata, selain itu dengan perencanaan dimaksud juga menjamin tercapainya kesesuaian antara keinginan pasar dengan produk wisata yang dikembangkan tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing pihak.

Pengelolaan pariwisata diharapkan dapat mengoptimalkan keuntungan dalam bidang sosial budaya termasuk pelestarian lingkungan dan mencegah sejauh mungkin masalah yang dapat ditimbulkannya. Dalam pengembangan pariwisata, ada lima komponen yang diperhatikan yaitu:

1. Kemampuan dan keinginan masyarakat untuk berwisata
2. Transportasi mengangkut orang ke dan dari destinasi
3. Atraksi menawarkan aktivitas keikutsertaan pengunjung
4. Informasi/promosi membantu calon wisatawan untuk mengetahui/ menemukan atraksi yang dapat dinikmati
5. Pelayanan/fasilitas untuk aktivitas keikutsertaan pengunjung

Wawasan dalam pengembangan sektor pariwisata dituntut untuk mengarah kepada terwujudnya tahapan pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainability of tourism development*), yang mensyaratkan kepada:

1. Prinsip pengembangan yang berpijak pada keseimbangan aspek pelestarian dan pengembangan serta berorientasi ke depan (jangka panjang)
2. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat setempat
3. Prinsip pengelolaan aset/sumber daya yang tidak merusak namun berkelanjutan untuk jangka panjang secara sosial, budaya, dan ekonomi
4. Adanya keselarasan sinergis antara kebutuhan wisatawan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal. Antisipasi dan monitoring terhadap proses perubahan yang terjadi akibat kegiatan pengembangan pariwisata.
5. Pengembangan pariwisata harus mampu mengembangkan apresiasi yang peka dari masyarakat terhadap warisan budaya dan lingkungan hidup.

2.5 Perhitungan Rata-rata Geometrik

Langkah pertama sebelum pengolahan data dengan metode AHP yang dilakukan adalah melakukan survei dan pengumpulan kuisisioner, setelah itu baru mencari prioritas komponen dari hirarki yang ada dalam pertanyaan. Nilai-nilai yang diperoleh dari kuisisioner sangat beragam, maka untuk mendapatkan kepastian nilai dilakukan pengambilan rata-rata geometrik. Metode pengambilan nilai rata-rata geometrik dilakukan berdasarkan ketentuan yang dirumuskan oleh Saaty (1993) dengan formula matematis sebagai berikut:

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 a_3 \dots a_n} = a_w \quad (2.1)$$

dengan:

n	=	jumlah responden
a	=	angka penilaian dari responden ke- i
a_w	=	nilai rata-rata geometrik

Nilai rata-rata geometri yang didapatkan meliputi semua tingkatan dalam hirarki. Selanjutnya, untuk analisa prioritas upaya pengelolaan potensi wisata dengan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) digunakan bantuan program *Expert Choice*.

2.6 Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP)

Dalam penentuan prioritas program yang sesuai untuk wilayah pesisir berdasarkan potensi wilayahnya, dibutuhkan metode yang sesuai. Salah satu metodenya adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Dengan metode tersebut dapat digunakan untuk mengukur peran serta *stakeholders* dalam merumuskan dan menentukan kebijakan berdasar kepentingan bersama (Akhwandhy, 2002).

Analytic Hierarchy Process (AHP) itu sendiri dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970 dan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur untuk dipecahkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan kemudian diatur menjadi satu bentuk hirarki (Akhwandhy, 2002). Selanjutnya memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif yang akhirnya dengan suatu

sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Sedangkan menurut Forman (*Decision by Objectives*), *Analytic Hierarchy Process* merupakan salah satu metode sistematis untuk pengambilan keputusan dengan membandingkan beberapa alternatif atau kriteria, yang dapat membantu kerangka berpikir manusia.

Kelebihan yang dimiliki metode ini antara lain: melibatkan beberapa kriteria secara bersamaan menurut struktur preferensi tertentu dan mengintegrasikan ke dalam proses rancangan (Rosyid, 1993 dalam Akhwadhy, 2002). Kelebihan lainnya adalah memecahkan masalah yang “multiobjektif” dan “multikriteria”, fleksibilitas tinggi dalam pembuatan kriteria, bersifat demokratis (mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan), dan menggunakan input yang kuantitatif (persepsi manusia).

Sedangkan kelemahan yang dimiliki metode AHP ini antara lain ketergantungan mode pada input yang berupa persepsi seorang ahli.

2.7 Prinsip-prinsip *Analytic Hierarchy Process*

Dalam metode *analytic hierarchy process* yang terdapat dalam Saaty(1993), prinsip-prinsip yang digunakan adalah sebagai berikut :

1 Decomposition

Dalam *decomposition*, setelah permasalahan didefinisikan, maka dilakukan upaya memecah-mecah permasalahan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini, maka proses analisis ini dinamakan hirarki (*hierarchy*). Ada dua jenis hirarki, yaitu hirarki lengkap dan tidak lengkap. Dalam hirarki lengkap, semua elemen pada suatu tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya. Jika tidak demikian, dinamakan hirarki tidak lengkap.

2 Comparative Judgement

Pada tahap *comparative judgement*, dilakukan penilaian tentang kepentingan relative dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan tampak lebih baik bila disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks *pairwise comparison*. Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang ingin diteliti. Di dalam hirarki terdapat tujuan utama, kriteria-kriteria, sub kriteria-sub kriteria dan alternatif-alternatif yang akan dibahas. Perbandingan berpasangan dipergunakan untuk membentuk hubungan di dalam struktur. Hasil dari perbandingan berpasangan ini akan membentuk matrik dimana skala rasio diturunkan dalam bentuk eigenvector utama atau fungsi-eigen. Agar diperoleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua elemen, seseorang yang akan memberikan jawaban perlu pengertian menyeluruh tentang elemen-elemen yang dibandingkan dan relevansinya terhadap criteria atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam penyusunan skala kepentingan, didasarkan tabel berikut :

Tabel 2.1 : Skala Dasar

Tingkat kepentingan	Definisi
1	Elemen ke-i sama pentingnya dengan elemen ke-j
3	Elemen ke-i sedikit lebih penting dari elemen ke-j
5	Elemen ke-i lebih penting dari elemen ke-j
7	Elemen ke-i sangat lebih penting dari elemen ke-j
9	Elemen ke-i mutlak penting dari elemen ke-j
2,4,6,8	Nilai diantara dua kepentingan uang berdekatan
Kebalikan (reciprocal)	Jika aktivitas i mendapat 1 angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai kebalikannya dengan nilai i

Sumber: Saaty, 1988

Kepentingan relatif dari tiap faktor dari setiap baris dari matrik dapat dinyatakan sebagai bobot relatif yang dinormalkan (*normalized relative weight*). Bobot relatif yang dinormalkan ini merupakan suatu bobot nilai relatif untuk masing-

masing faktor pada setiap kolom, dengan membandingkan masing-masing nilai skala dengan jumlah kolomnya. Eigenvektor utama yang dinormalkan (*normalized principal eigenvector*) adalah identik dengan menormalkan kolom-kolom dalam matrix perbandingan berpasangan. Bobot prioritas merupakan bobot nilai rata-rata secara keseluruhan, yang diperoleh dari rata-rata bobot relatif yang dinormalkan masing-masing faktor pada setiap barisnya.

Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen berlaku aksioma *reciprocal*, artinya jika elemen I dinilai 3 kali lebih penting dibanding j, maka elemen j harus sama dengan $1/3$ kali pentingnya dibanding elemen-i. Disamping itu, perbandingan dua angka yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya sama penting. Dua elemen yang berlainan dapat saja dinilai sama penting. Jika terdapat n elemen, maka akan diperoleh matriks *pairwise comparison* berukuran $n \times n$. Banyaknya penilaian yang diperlukan dalam menyusun matriks ini adalah $n(n-1)/2$ karena matriksnya *reciprocal* dan elemen-elemen diagonal sama dengan 1.

3 Synthesis of Priority

Selanjutnya adalah *synthesis of priority*, dimana dari setiap matriks *pairwise comparison* kemudian dicari *eigenvector*nya untuk mendapatkan *local priority*. Karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesa diantara *local priority*. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut bentuk hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relative melalui prosedur sintesa dinamakan *priority setting*.

4 Logical Consistency

Logical consistency menyatakan ukuran tentang konsisten tidaknya suatu penilaian atau pembobotan perbandingan berpasangan. Pengujian ini diperlukan, karena pada keadaan yang sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna

2.8 Tahap-Tahap Penyusunan Hirarki

Tahap-tahap dalam penyusunan suatu hirarki menurut Saaty (1993) adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan secara khusus solusi yang diharapkan.
2. Penyusunan hirarki dimulai dengan tujuan yang umum, diikuti oleh sub tujuan, kriteria dan kemungkinan diikuti alternatif-alternatif penyelesaian pada tingkatan hirarki paling bawah.
3. Menyusun matrik perbandingan berpasangan yang mempunyai kontribusi hubungan relatif atau pengaruh pada masing-masing tujuan atau kriteria yang akan dikembangkan pada tingkat yang lebih atas.
4. Melakukan proses perbandingan pasangan sehingga diperoleh *judgement* seluruhnya sebanyak $(n(n-1))/2$ buah, dimana n adalah banyaknya komponen yang dibandingkan.
5. Setelah diperoleh data perbandingan pasangan, kemudian dihitung nilai *eigen vector* dan memeriksa indeks konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data harus diulang.
6. Mengulangi tahap 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat dan kelompok hirarki.
7. Menghitung *eigen vector* dari setiap matrik perbandingan pasangan diatas, dimana nilai dari *eigen vector* merupakan bobot setiap komponen.
8. Memeriksa indeks konsistensi hirarki CR (*Consistency Ratio*), jika nilai CR lebih besar dari 10% (0,1), maka data *judgement* harus diperbaiki.

2.9 Formulasi Matematis Model *Analytic Hierarchy Process*

Formulasi matematis pada model AHP pada dasarnya menggunakan matrik yaitu dengan mengasumsikan elemen yang akan dinilai tingkat kepentingannya secara berpasangan (Saaty, 1988). Elemen-elemen dari suatu tingkat dalam suatu hirarki adalah $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ dan bobot pengaruh mereka adalah $w_1, w_2, w_3, \dots, w_n$. Misalkan $a_{ij} = w_i / w_j$ menunjukkan tingkat kepentingan C_i dibandingkan dengan C_j . Matrik dari angka-angka a_{ij} ini dinamakan matrik perbandingan berpasangan (*matriks pairwise comparison*), yang diberi symbol A . A adalah *matriks reciprocal*, sehingga $a_{ij} = 1 / a_{ji}$. Jika penilaian sempurna pada setiap

perbandingan, maka $a_{ij} = a_{ik}$, a_{ijk} untuk semua i, j, k dan matrik A dinamakan konsisten. Kemudian dibuat formulasi matematisnya sebagai berikut :

$$a_{ij} = \frac{w_i}{w_j} \quad \text{dimana } i, j = 1, 2, 3, \dots, n \quad (2.2)$$

$$a_{ij} \left(\frac{w_j}{w_i} \right) = 1 \quad \text{dimana } i = 1, 2, 3, \dots, n \text{ konsekuensinya} \quad (2.3)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j \cdot 1 / w_i = n \quad \text{dimana } i = 1, 2, 3, \dots, n \text{ atau} \quad (2.4)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j \cdot 1 = n \cdot w_i \quad \text{dimana } i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (2.5)$$

Dalam bentuk matrik :

$$Aw = nw$$

$$\begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \cdots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \cdots & w_2/w_n \\ \vdots & \cdot & \cdot & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \cdots & w_n/w_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Rumus ini menunjukkan bahwa w merupakan *eigenvector* matrik A dengan *eigenvalue* n . Bila matrik a diketahui dan ingin diperoleh nilai w , maka dapat diselesaikan melalui persamaan berikut :

$$[A - nI] W = 0 \quad (2.7)$$

Dimana I adalah matrik identitas.

Persamaan (2.7) ini dapat menghasilkan solusi yang tidak nol bila (jika dan hanya jika) n merupakan *eigenvalue* dari A dan w adalah *eigenvector*. Setelah *eigenvaluematriks* perbandingan A tersebut diperoleh, misalnya $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$ dan berdasarkan matrik A yang mempunyai keunikan, yaitu $a_{ii} = 1$ dengan $i = 1, 2, 3, \dots, n$ maka :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = n \quad (2.8)$$

Disini semua *eigenvalue* bernilai nol, kecuali *eigenvalue* maksimum yang tidak bernilai nol. Kemudian jika penilaian yang dilakukan konsisten, akan diperoleh *eigenvalue* maksimum dari A yang bernilai n. Untuk mendapatkan w, maka dapat dilakukan dengan mensubstitusikan harga *eigenvalue* pada persamaan:

$$A \cdot w = \lambda_{\max} \cdot w \quad (2.9)$$

Selanjutnya persamaan 2.7 dapat diubah menjadi

$$[A - \lambda_{\max} \cdot I] = 0 \quad (2.10)$$

Untuk memperoleh harga nol, maka yang perlu diatur adalah:

$$A - \lambda_{\max} \cdot I = 0 \quad (2.11)$$

Berdasarkan persamaan (2.11) dapat diperoleh harga λ_{\max}

Dengan memasukanh harga λ ke persamaan (2.10) dan ditambah dengan

persamaan $\sum_{i=1}^n w_i^2 = 1$ maka akan diperoleh bobot masing-masing elemen operasi

(w_i , dengan $i = 1, 2, 3, \dots, n$) yang merupakan *eigenvector* yang bersesuaian dengan *eigenvalue* maksimum.

2.10 Perhitungan Rasio Konsistensi

Perhitungan indeks konsistensi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n-1) \quad (2.12)$$

dengan:

CI = indeks konsistensi

n = orde matrik

λ_{\max} = *eigenvalue* maksimum

Menurut saaty (1993), suatu kuisisioner dikatakan memenuhi konsistensinya jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Dasar pengambilan keputusan adalah jika rasio konsistensi harus kurang dari sama dengan 10% yakni $CR \leq 10\%$. Rasio

konsistensi pada proses pengumpulan kuisioner dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$CR = CI/RI \quad (2.13)$$

dengan:

- CR = rasio konsistensi
- CI = indeks konsistensi
- RI = indeks random

Tabel 2.2 : Indeks Random untuk Tiap Orde Matrik

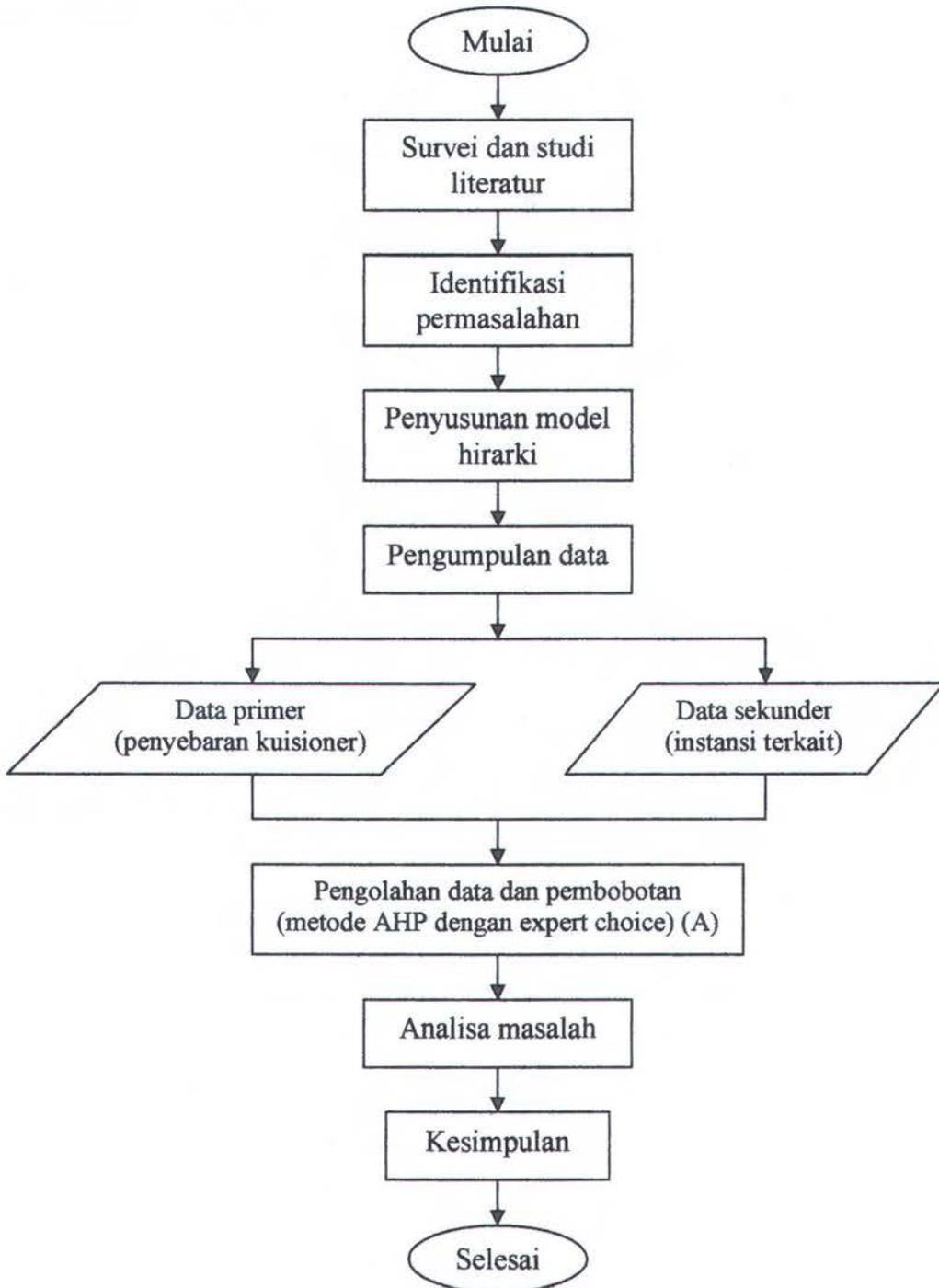
Orde Matrik	1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Random	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41
Orde Matrik	9	10	11	12	13	14	15	
Indeks Random	1.45	1.49	1.51	1.48	1.56	1.57	1.59	

Sumber: Saaty, 1988

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menunjang keberhasilan penelitian ini maka diperlukan diagram alir penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Dari diagram alir diatas, dapat dijelaskan masing-masing pengerjaan sebagai berikut:

1. Tahap Survei, Studi Literatur dan Penumpulan Data Sekunder

Pada tahap ini adalah mempelajari pustaka meliputi jurnal ilmiah, paper, buku-buku teks yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini dan bertujuan untuk mencari hubungan antar variable dalam studi ini.

2. Tahap Identifikasi Permasalahan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah mendefinisikan permasalahan dan tujuan yang akan dibahas. Untuk dapat mendefinisikan permasalahan tersebut, maka dilakukan survei langsung atau mempelajari data yang sudah ada dari literatur yang mendukung tema yang diangkat.

3. Penyusunan Model Hirarki

Proses ini merupakan bagian penting dalam pengerjaan metode AHP. Penyusunan model hirarki didasarkan pada kondisi wilayah yang diteliti, yaitu wilayah Pantai Tambakrejo Blitar.

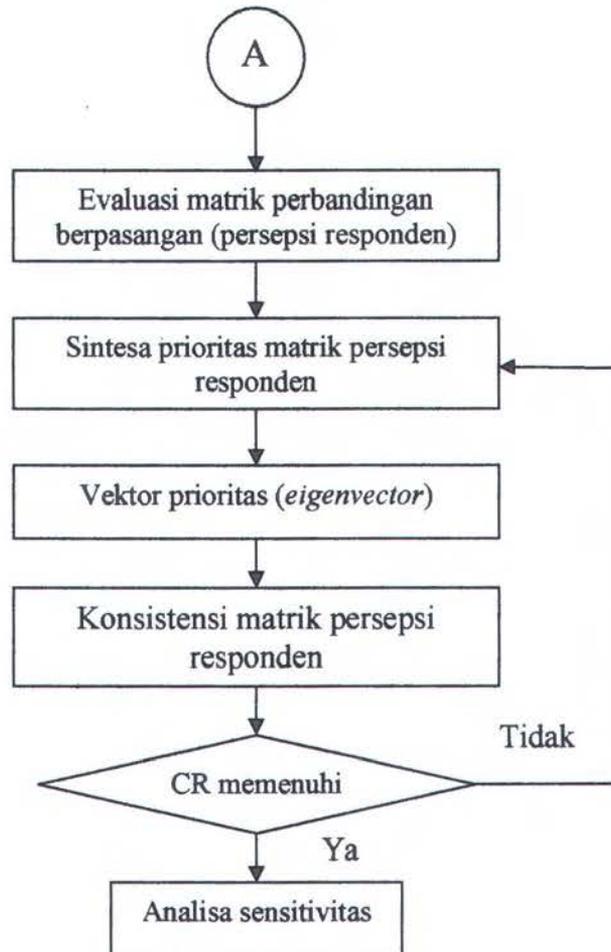
4. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah data primer dan data sekunder.

- Data primer diperoleh melalui survei langsung ke lapangan dan menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat setempat, perwakilan pihak pemda serta perwakilan pihak investor
- Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait, antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Tataruang, Dinas Sosial, Bappeda Kab. Blitar, Kantor Kecamatan Wonotirto, Kantor Kelurahan Tambakrejo

5. Pengolahan Data dan Pembobotan

Data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan bantuan program *Microsoft Excel* dan *Expert Choice Professional* version 9.0



Gambar 3.2 Diagram Alir Analytic Hierarchy Process

Penjelasan gambar 3.2 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi matrik perbandingan berpasangan

Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah pengisian matrik perbandingan berpasangan yang didapatkan dari kuisisioner.
2. Sintesa prioritas matrik persepsi responden

Proses selanjutnya adalah sintesa prioritas matrik, yaitu dicari bobot prioritas atau *eigenvalue* setiap elemen dalam matrik.
3. Vektor prioritas

Vektor prioritas atau eigenvector merupakan nilai yang menunjukkan prioritas pada setiap kriteria/sektor dari hirarki.
4. Konsistensi matrik persepsi responden

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menghitung indek konsistensi (CI) dan rasio konsistensi (CR). Apabila rasio konsistensinya kurang 10%, berarti data

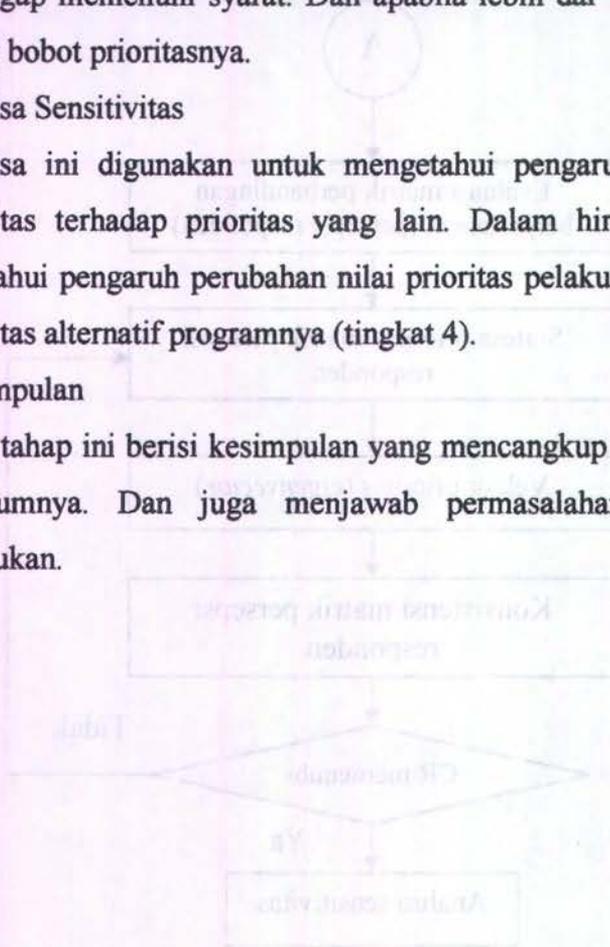
dianggap memenuhi syarat. Dan apabila lebih dari 10%, maka perlu ditinjau ulang bobot prioritasnya.

5. Analisa Sensitivitas

Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan suatu nilai prioritas terhadap prioritas yang lain. Dalam hirarki penelitian ini, akan diketahui pengaruh perubahan nilai prioritas pelaku (tingkat 2) terhadap nilai prioritas alternatif programnya (tingkat 4).

6. Kesimpulan

Pada tahap ini berisi kesimpulan yang mencangkup inti dari analisa pada bab sebelumnya. Dan juga menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan.



Gambar 3. Diagram Alir Analisa Hirarki Proses

Penelitian Gambar 3 adalah sebagai berikut:

1. E-luat matriks perbandingan berpasangan
2. Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah penjumlahan perbandingan berpasangan yang dilakukan dari masing-masing
3. Setelah proses matriks tersebut selesai
4. Proses selanjutnya adalah untuk mencari nilai eigen maksimum dan vektor eigen yang sesuai dalam matriks
5. Vektor eigen
6. Vektor tersebut akan digunakan untuk mencari nilai yang menunjukkan prioritas pada setiap kriteria sektor dan matriks
7. Kemudian matriks tersebut digunakan
8. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengurutkan nilai maksimum (CR) dan nilai konstanta (CR) Agar bisa untuk konsistensinya kurang 10% berarti data

BAB IV

KONDISI DAERAH STUDI

4.1 Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Blitar



Gambar 4.1 Kabupaten Blitar di Peta Jawa Timur

Kabupaten Blitar berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kediri
- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Malang

Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian ± 167 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah $1.588,79 \text{ km}^2$, terdiri atas 22 kecamatan, 28 kelurahan dan 220 desa. Sungai Brantas telah membelah Kabupaten Blitar menjadi dua wilayah yaitu bagian selatan mempunyai luas $689,85 \text{ km}^2$ dan sebelah utara $898,94 \text{ km}^2$. Blitar selatan termasuk daerah yang kurang subur, karena daerah tersebut merupakan pegunungan berbatu. Sebaliknya kawasan utara merupakan daerah yang subur,

kesuburan ini akibat Gunung kelud yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup memadai.

Pantai Kabupaten Blitar mempunyai panjang 45 km, dengan luas lautnya untuk radius 4 mil sebesar 26.110 Ha dan untuk luas laut 12 mil sebesar 78.330 Ha, sedang luas wilayah ZEE sebesar 1.305.500 Ha. Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Katulistiwa, terletak antara 111°40'-112°10' Bujur Timur dan 07°58'-08°9' Lintang Selatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim yaitu iklim penghujan dan kemarau. Kabupaten Blitar memiliki 32 sungai, yang berfungsi sebagai irigasi yang tersebar di 22 kecamatan. Selain sungai wilayah ini juga memiliki perairan umum lainnya berupa waduk, seperti waduk Wlingi Raya, Waduk Lahor, Waduk Lodoyo.

Kabupaten Blitar dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan keindahan alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Potensi wisata di kabupaten Blitar tersebar hampir di setiap kecamatan baik berupa tempat peninggalan sejarah, wisata alam maupun wisata pantai. Keberadaan objek wisata itu belum didukung oleh keberadaan hotel di kabupaten Blitar, karena jumlah hotel hanya 3 buah dengan 58 tempat tidur.

Tabel 4.1 Obyek Wisata Pada Kawasan Pesisir di Kabupaten Blitar

No	Objek wisata	Lokasi	Jarak dari kota	Keterangan
1	Pantai Tambakrejo	Ds. Tambakrejo Kec. Wonotirto	32 Km	Upacara larungan tgl 1 suro
2	Pantai Pasur	Ds. Bululawang Kec. Bakung	40 Km	Upacara larungan tgl 1 suro
3	Pantai Serang	Ds. Serang Kec. panggungrejo	40 Km	Upacara larungan tgl 1 suro
4	Pantai Jolosutro	Ds. Ringinrejo Kec. Wates	57 Km	Upacara larungan tgl 1 suro

4.2 Kondisi Geografis

Dari aspek topografi, kawasan Kabupaten Blitar mewujudkan bentangan daratan dan bervariasi kemiringan. Dalam Tugas Akhir ini, lokasi penelitian adalah Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto. Kawasan lokasi berada di wilayah Blitar Selatan dan merupakan lahan yang kurang subur, hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan berbatu.

Kecamatan Wonotirto terdiri dari 8 desa, yaitu desa Tambakrejo, Kali Grenjeng, Pasiraman, Sumberboto, Gununggede, Ngadipuro, Ngeni dan desa Wonotirto dengan luas keseluruhan mencapai 164,54 km². Luas total desa Tambakrejo mencapai 4,89 km² atau 2,97% dari seluruh luas Kecamatan Wonotirto.

Jumlah Desa dan Luasannya di wilayah Kecamatan Wonotirto adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Luas Desa di Kecamatan Wonotirto

No	Desa	Luas Daratan	
		Luas (km ²)	%
1	Tambakrejo	4,89	2,97
2	Kaligrenjeng	17,21	10,46
3	Pasiraman	7,81	4,75
4	Sumberboto	22,66	13,77
5	Gununggede	28,87	17,54
6	Ngadipuro	23,00	13,98
7	Ngeni	40,39	24,55
8	Wonotirto	19,71	11,98
	Total	164,54	100

Sumber : Kab. Blitar Dalam Angka, 2005

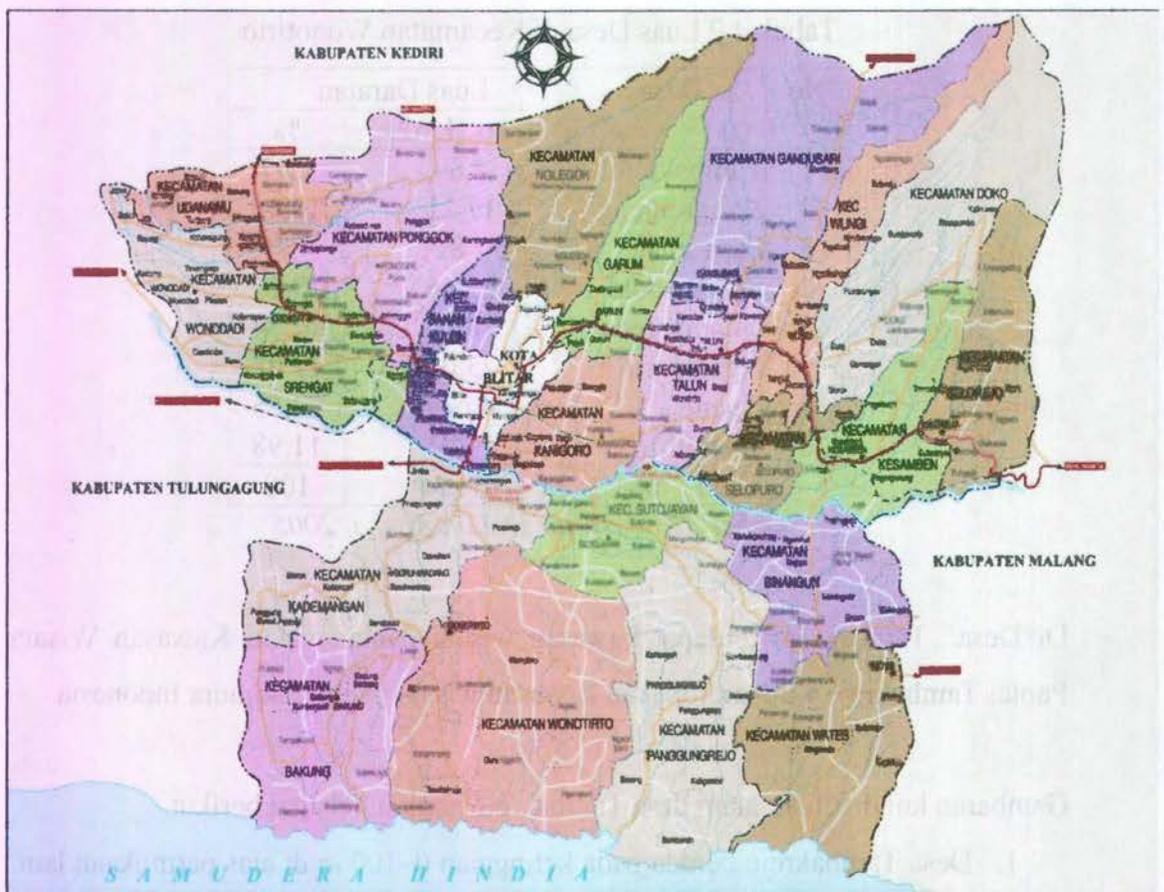
Di Desa Tambakrejo terdapat kawasan wisata pantai, yakni Kawasan Wisata Pantai Tambakrejo yang merupakan kawasan wisata pantai Samudra Indonesia.

Gambaran kondisi fisik alam desa Tambakrejo adalah Sebagai berikut:

1. Desa Tambakrejo berada pada ketinggian 0–100 m di atas permukaan laut. Pada umumnya desa Tambakrejo terletak pada tanah yang datar hingga berbukit. Kemiringan tanah di sekitar pantai 0–2 % dan 2–15 %. Sedang di

beberapa tempat merupakan tanah berbukit dengan kemiringan antara 15–30 %.

2. Wilayah desa Tambakrejo tidak pernah banjir. Sedangkan pada tanah-tanah berkontur di tepi sungai sangat rawan terhadap bahaya erosi.
3. Jenis batuan di desa tambakrejo didominasi oleh batuan gamping yang mempunyai sifat kurang bisa mengikat tanah.
4. Jenis tanah yang dominan jenis tanah aluvial
5. Desa Tambakrejo merupakan desa agraris sekaligus desa pantai yang terletak di wilayah pesisir pantai Samudra Indonesia dengan kondisi tanah yang sebagian subur, sehingga sangat baik digunakan untuk kawasan pertanian. Sebagian lagi merupakan kawasan tegalan dan juga merupakan kawasan perbukitan yang gundul



Gambar 4.2 Peta Kabupaten Blitar

4.2 Kondisi Kependudukan

Penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subyek/perilaku sebagai subyek/perilaku sekaligus sebagai obyek dari pembangunan. Karenanya data penduduk merupakan salah satu data pokok yang keberadaannya saat ini sangat diperlukan.

Pada tahun 2005 penduduk di Kabupaten Blitar menunjukkan angka sebanyak 1.295.601 jiwa yang terdiri dari 657.012 jiwa laki-laki dan 638.589 jiwa perempuan. Jumlah penduduk ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya (2004) sebanyak 184.258 jiwa. Berarti kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2004-2005 sebesar 16.58%.

Tabel. 4.3 Penduduk dan Kepadatan 2000-2005

Tahun	L	P	Jumlah	Kepadatan
2000	545.592	551.169	1.096.761	689
2001	547.848	554.005	1.101.853	694
2002	548.622	553.384	1.102.006	694
2003	553.852	562.103	1.115.955	702
2004	557.736	553.607	1.111.343	699
2005	657.012	638.589	1.295.601	815

Sumber: Kab. Blitar Dalam Angka, 2005

4.4 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pantai Tambakrejo ± 30 km dari Kota Blitar terletak di Desa Tambakrejo. Dari data sektor produksi terlihat bahwa Desa Tambakrejo merupakan penghasil tanaman padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kedelai. Buah-buahan kurang potensial. Hasil perikanan, berupa ikan tangkap laut dari jenis ikan tongkol, tengiri, cucut, udang barong dan lain-lain. Untuk sektor penangkapan ikan laut, armada yang dikembangkan oleh sebagian besar nelayan adalah jenis peralatan penangkapan ikan pinggir pantai (*in-shore fishing*), seperti Mancung dan Kenting. Jangkauan penangkapan adalah harian (*one day fishing*), yaitu sore hari pergi melaut dan pada pagi hari sudah mendarat. Begitu pula sebaliknya jika berangkat melaut pada pagi hari, maka sore hari sudah pulang kerumah.

Alat tangkap yang digunakan nelayan adalah jenis-jenis jaring yang dipakai untuk menangkap udang, ikan jenis pelajik dan ikan campuran. Selain jaring, beberapa nelayan juga menggunakan pancing untuk menangkap ikan *demersal*, seperti ikan hiu dan ikan pari. Dengan demikian, jenis-jenis alat tangkap yang dikembangkan nelayan cenderung berorientasi pada perikanan pantai. Sebagian nelayan menjadikan pekerjaan penangkapan ikan sebagai pekerjaan sampingan disamping sebagai petani.

Mayoritas nelayan di Tambakrejo belatar belakang etnis Jawa, yang dipengaruhi oleh budaya Mataraman. Tradisi labuhan masih mereka lakukan rutin setiap tahun pada tanggal 1 Muharam diadakan Upacara Adat (Larung Sesaji), disamping kegiatan Larung Sesaji umumnya nelayan menggelar kesenian Wayang Kulit. Tujuannya agar masyarakat setempat diberi keselamatan dan rejeki yang melimpah, terlepas dari balak dan kesulitan.

Dalam upacara ini semua warga terlibat dan Sesaji yang berupa kepala sapi, kambing dan hasil pertanian dilepas "teleng laut" pada waktu yang telah ditentukan. Sebelum meninggalkan pantai diadakan tumpengan ditepi pantai dan diberi doa oleh sesepuh desa. Sesaji ini diiringi oleh para sesepuh desa yang berpakaian adat, diadakan tayuban dan kuda lumping.

Upacara Larung Sesaji ini banyak menarik masyarakat luar Blitar, seperti Malang, Trenggalek, Tulungagung, bahkan Surabaya. Pengunjung, mencapai ribuan terutama para kawula muda yang sebagian besar datang sehari sebelumnya dengan membuat tenda-tenda di sekitar pantai.

4.5 Kondisi Sarana dan Prasarana

Fasilitas Umum :

- Gardu 3x3 m untuk tempat duduk
- Mushola, WC, milik perorangan
- Warung-warung penjual makanan sederhana.
- Lahan Parkir

Faktor Pendukung

- Jalan beraspal dan Angkot beroperasi sampai jam 16.00, sepanjang jalan terhampar bukit dan pepohonan buatan
- Tersedia Pasar Ikan yang tidak jauh lokasi.
- Dapat dikembangkan untuk wisata air dan pemandian umum.
- Rumah penduduk dapat dijadikan homestay wisatawan.

Faktor Penghambat

- Belum ada kios souvenir.

Semua Kawasan Wisata Pantai di Kabupaten Blitar dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun empat.

4.6 Deskripsi Pantai Tambakrejo

A. Gambaran umum

Pantai Tambakrejo merupakan wisata laut sekaligus wisata keagamaan yang terletak di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Kawasannya cukup luas, panjang melengkung, berbentuk teluk landai dengan ombak yang tidak begitu besar yang merupakan salah satu pantai di garis pantai Samudera Indonesia. Pantai Tambakrejo merupakan pemberian alam bukan rekayasa manusia yang telah ada sejak dahulu kala. Angin laut yang berhembus terus menerus menyebabkan hawa tidak terlalu panas.

Lahan ujung pantai yang cukup luas, tampaknya merupakan pengendapan yang berlangsung bertahun-tahun. Di ujung kanan kiri pantai merupakan panorama alam yang berupa bukit padas dengan pepohonan yang tumbuh secara alami, bukan merupakan hutan buatan ataupun perbukitan yang telah direkayasa. Dataran pantai yang cukup luas dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk berbagai macam bangunan yang sederhana dan kegiatan bisnis kecil-kecilan.

B. Upaya Pengembangan

Faktor pendukung yang ada, pantai tambakrejo potensial untuk dikembangkan. Objek wisata yang \pm 30 Km dari kota Blitar arah selatan ini telah memiliki sarana

jalan beraspal dan bahkan telah ada kendaraan umum (Angkot) khususnya pada hari libur yang beroperasi sampai jam 16.00 namun masih sangat terbatasnya angkutan umum ini sebagian besar pengunjung menggunakan kendaraan pribadi, panorama alam sekitar 10 Km sebelum masuk pantai tambakrejo cukup mengasikan, kanan kiri jalan terhampar bebukitan yang berbatu dan pepohonan yang tidak terlampau padat.

Kawasan bibir pantai yang landai, luas dan berpasir memberikan kesempatan pada siapa saja yang peduli untuk menanamkan modal ikut membangun dan mengembangkan wisata pantai yang sebenarnya telah banyak menarik para remaja, baik didalam maupun diluar Kabupaten Blitar.

Usaha-usaha yang dapat dan memang perlu dikembangkan untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung antar lain : penataan dan pengadaan lahan parkir, hal ini sangat penting tidak hanya untuk keamanan dan ketertiban, tetapi akan menghasilkan uang yang cukup banyak. Pengadaan tempat mandi/WC umum yang bersih dan terawat dilengkapi dengan mushola dan tempat wudlu yang memadai. Mendirikan kantin (warung) yang higienis, bersih dan sehat serta penataan kembali lokasi warung yang tidak teratur, tempat peristirahatan sementara yang nyaman untuk mengantisipasi penggunaan mushola untuk tidur-tiduran. Membuka kios untuk souvenir yang mungkin untuk dikembangkan. Usaha lain yang potensial untuk dikembangkan adalah wisata air dan pemandian umum, hanya dengan konsekuensi bahwa tempat parkir perahu nelayan harus dipindahkan, sehingga tidak menjadi satu di pantai wisata.

Demi keindahan dan daya tarik, Dinas pariwisata perlu mengatur tataruang, sebelum banyak bangunan yang berdiri, dengan demikian dinas pariwisata telah memiliki blue print untuk pengembangan kawasan wisata ini. Pasar ikan yang terletak di depan tempat wisata, perlu dipindahkan, sehingga tidak menjadi satu dengan kawasan wisata, tetapi tidak terlalu jauh dari situ.

Penduduk yang sebagian besar ekonomi lemah yang terdiri dari para nelayan dan petani sangat mengharapkan jika pantai ini ramai, mereka akan mendapatkan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan atau mungkin untuk menggantikan pekerjaan sekarang yang banyak menanggung resiko. Mereka pada umumnya ramah-ramah terhadap para tamu dari luar termasuk para penjaja dagangan yang pada umumnya hanya berupa minuman dan makanan kecil. Penjaja makanan ini hanya ada beberapa orang dan mereka berjualan hanya pada waktu hari besar/libur, pada hari-hari biasa bisa dikatakan tidak ada pengunjung.

Faktor penghambat seperti telah dijelaskan dimuka bahwa pantai Tambakrejo potensial untuk dikembangkan, yang artinya pada saat ini belum berkembang sebagai indikator bahwa wisata ini belum berkembang antara lain, belum adanya kios ataupun toko yang menjual souvenir atau produk unggulan sebagaimana tempat-tempat wisata yang sudah maju. Tidak tersedia fasilitas umum, seperti penginapan, pos keamanan, petugas parkir dan sebagainya. Pantai yang kelihatan kotor dan tidak terawat karena tidak ada petugas kebersihan. Kendala lainnya, luas jalan yang menuju ke pantai ini, tidak ada jalan tembus ke kota atau wilayah wisata lain. Sehingga jika orang akan berkunjung ke pantai Tambakrejo yang memang tujuannya hanya kesana tidak ada rangkaian lain.

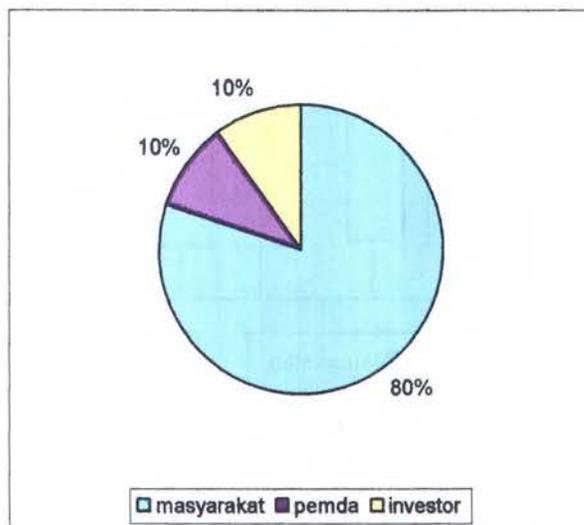


BAB V

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Teknik pengambilan sampel dan metode pengambilan rata-rata geometrik

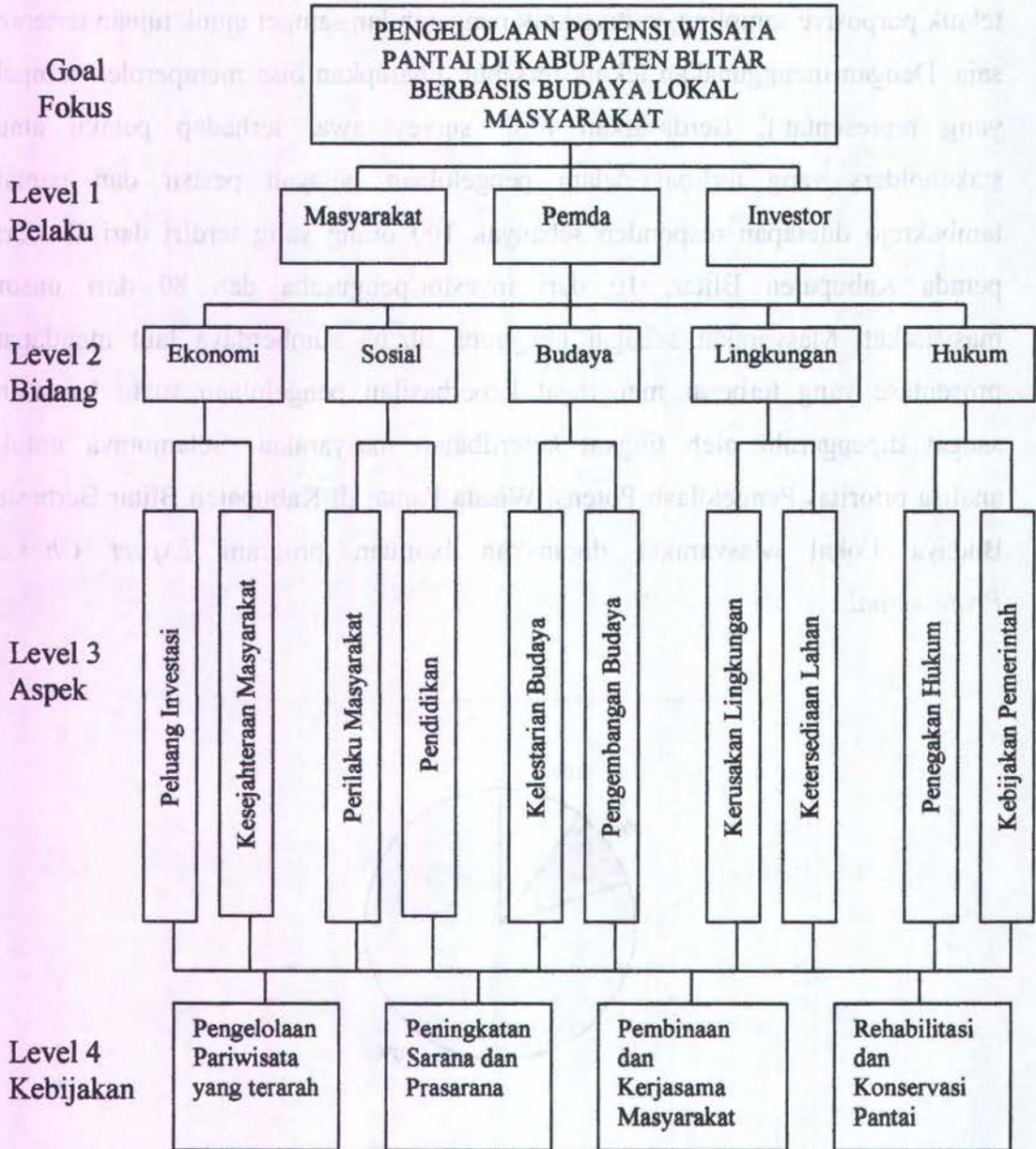
Teknik pengambilan sampel sebagai sasaran penyebaran kuisisioner digunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel untuk tujuan tertentu saja. Dengan menggunakan teknik tersebut diharapkan bisa memperoleh sampel yang representatif. Berdasarkan hasil survey awal terhadap pelaku atau stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pantai tambakrejo ditetapkan responden sebanyak 100 orang yang terdiri dari 10 dari pemda Kabupaten Blitar, 10 dari investor/pengusaha dan 80 dari unsur masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna utama sumberdaya laut mendapat prosentase yang terbesar mengingat keberhasilan pengelolaan suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat. Selanjutnya untuk analisa prioritas Pengelolaan Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat digunakan bantuan program *Expert Choice Professional*.



Gambar 5.1 Persentase Responden berdasarkan Pelaku

5.2 Penentuan Prioritas Pengelolaan Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Blitar

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan secara visual, disusun langkah-langkah proses penentuan program yang dilakukan menurut identifikasi yang telah dibuat dalam model hirarki seperti pada Gambar 5.2. Dari hirarki tersebut dibuat kuisioner.



Gambar 5.2 Model Hirarki Pengelolaan Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat

5.2.1 Tujuan Rencana Pengelolaan Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Blitar

Tingkatan utama dari pengelolaan potensi wisata pantai Kabupaten Blitar adalah penetapan tujuan atau fokus. Tujuan yang akan dicapai dalam rencana pengelolaan potensi wisata pantai Kabupaten Blitar yaitu untuk mendapatkan prioritas pengelolaan potensi wisata pantai sesuai dengan pelaku, bidang, aspek serta kebijakannya.

5.2.2 Level Pertama (Pelaku Pengelolaan Wisata Pantai)

Pada tingkat ini, nilai perbandingan berpasangan dibuat dengan membandingkan antara beberapa pelaku, yaitu antara masyarakat, pemerintah daerah, dan investor. Dari nilai perbandingan berpasangan, akan digunakan untuk mencari besarnya nilai vektor prioritas antara pelaku pengelolaan potensi wisata pantai.

Tabel 5.1 Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* berdasarkan pelaku

No	Pelaku	Vektor Prioritas
1	Masyarakat	0,374
2	Pemda	0,416
3	Investor	0,210
<i>Consistency Index (CI)</i>		0,026
<i>Random Index (RI)</i>		0,580
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0,045

Sumber: hasil pengolahan

Dari nilai prioritas tersebut diatas, pemerintah daerah Kabupaten Blitar mempunyai peran penting dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kabupaten Blitar. Namun dalam pengelolaan wisata pantai, peran aktif masyarakat dan investor juga diperlukan, dimana karakter masyarakat Pantai Tambakrejo masih memegang teguh adat istiadat seperti pemahaman mitologi dan kepercayaan spiritualisme, salah satunya adalah tradisi labuhan (larung saji) yang merupakan budaya lokal masyarakat. Sedang peran investor dalam hal ini bisa sebagai fasilitator untuk peningkatan potensi wisata daerah pantai Kabupaten Blitar. Dari Tabel 5.1 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.3 Grafik Vektor Prioritas Pelaku Pengelolaan Wisata Pantai

5.2.3 Level Kedua (Bidang Pengelolaan Wisata Pantai)

Pada tingkat ini dilakukan terhadap beberapa bidang yang digunakan sebagai pertimbangan dalam rencana pengelolaan potensi wisata pantai di Kabupaten Blitar. Bidang tersebut meliputi: Ekonomi, Sosial, Budaya, Lingkungan, Hukum. Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas seperti pada table berikut ini:

Tabel 5.2 Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Bidang

No	Bidang	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Ekonomi	0,303	0,271	0,435
2	Sosial	0,121	0,095	0,172
3	Budaya	0,203	0,176	0,148
4	Lingkungan	0,310	0,301	0,142
5	Hukum	0,064	0,157	0,103
<i>Consistency Index (CI)</i>		0,067	0,060	0,088
<i>Random Index (RI)</i>		1,120	1,120	1,120
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0,060	0,054	0,079

Sumber: hasil pengolahan

Berdasarkan Tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai vektor prioritas untuk bidang yang digunakan sebagai pertimbangan dalam rencana pengelolaan potensi wisata pantai. Dari nilai prioritas tersebut diatas, pemda dan masyarakat berasumsi bahwa lingkungan menjadi faktor prioritas dalam pengelolaan wisata pantai di Pantai Tambakrejo. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan

wisata pantai tidak mungkin lepas dari masalah lingkungan. Budaya lokal yang berkembang dalam lingkungan masyarakat pantai tambakrejo yang sebagian besar etnis jawa, juga berpengaruh terhadap lingkungan. Dengan adanya keseimbangan lingkungan (termasuk karakteristik dan sumber daya masyarakat pantai) diharapkan akan tercipta kelestarian alam dan ekosistem pantai yang dapat menunjang pengelolaan wisata pantai. Dari Tabel 5.2 dapat di tampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.4 Grafik Vektor Prioritas Bidang Pengelolaan Wisata Pantai

5.2.4 Level Ketiga (Aspek Pengelolaan Wisata Pantai)

Tingkat selanjutnya dari hirarki yang dimodelkan adalah aspek pengelolaan wisata pantai. Aspek-aspek pada tingkat ini berdasarkan pada bidang-bidang sebagai berikut, yaitu: bidang Ekonomi adalah aspek Peluang Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat, bidang Sosial adalah aspek Perilaku Masyarakat dan Pendidikan, bidang Budaya adalah aspek Kelestarian Budaya dan Pengembangan Budaya, bidang Lingkungan adalah aspek Kerusakan Lingkungan dan Ketersediaan Lahan, bidang Hukum adalah aspek Penegakan Hukum dan Kebijakan Pemerintah.

5.2.4.1 Bidang Ekonomi

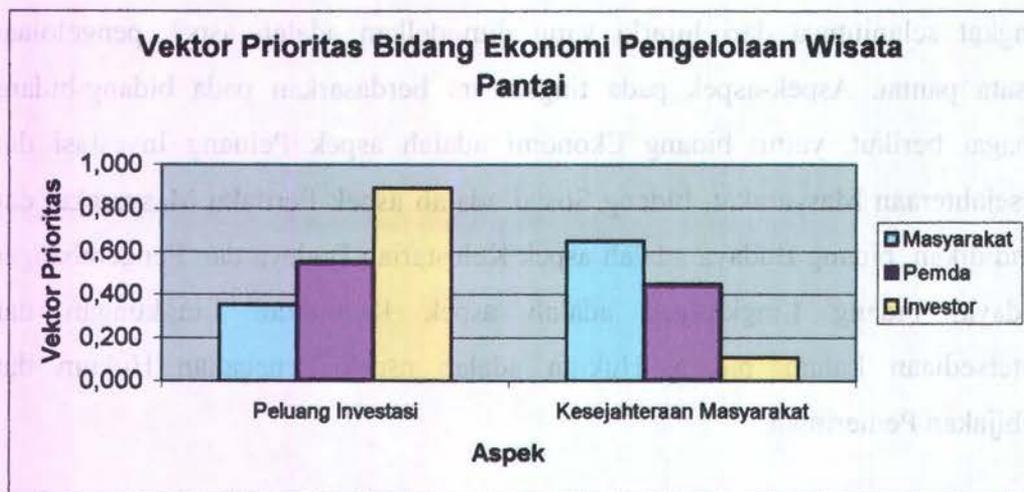
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari aspek-aspek pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Bidang Ekonomi Pengelolaan Wisata Pantai

No	Aspek	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peluang Investasi	0,352	0,551	0,894
2	Kesejahteraan Masyarakat	0,648	0,449	0,106
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Random Index (RI)</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0,0	0,0	0,0

Sumber : hasil pengolahan

Kawasan pantai di Kabupaten Blitar (Pantai Tambakrejo) memiliki potensi wisata yang bisa lebih dikembangkan, sehingga membuka peluang investasi bagi para investor dan tentunya akan memberikan keuntungan bagi pemda (berupa PAD) dan masyarakat (bertambahnya lapangan pekerjaan). Maka dari itu pemda selaku pemegang peran penting dalam pengelolaan pantai perlu membuka peluang investasi bagi para investor yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pantai tersebut. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkat pula kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian pantai. Dari Tabel 5.3 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.5 Grafik Vektor Prioritas Bidang Ekonomi Pengelolaan Wisata Pantai

5.2.4.2 Bidang Sosial

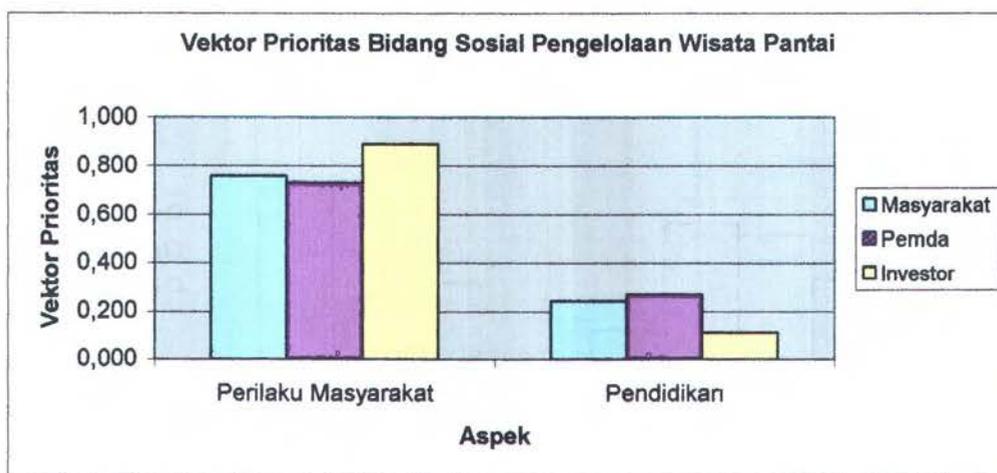
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari aspek-aspek pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Bidang Sosial Pengelolaan Wisata Pantai

No	Aspek	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Perilaku Masyarakat	0,758	0,730	0,889
2	Pendidikan	0,242	0,270	0,111
<i>Consistency Index (CI)</i>		0,0	0,0	0,0
<i>Random Index (RI)</i>		0,0	0,0	0,0
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0,0	0,0	0,0

Sumber : hasil pengolahan

Pada umumnya perilaku masyarakat dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat itu sendiri, selain itu perilaku masyarakat juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan pendidikan yang beragam, sumber daya masyarakat juga beragam, sehingga berpengaruh pada keragaman perilaku masyarakat dalam kesehariannya. Selain itu perilaku masyarakat pantai juga banyak dipengaruhi dari budaya, adat istiadat dan religi. Hal tersebut mengakibatkan sikap fanatik, dan sikap kurang menerima adanya perubahan. Oleh karena itu pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang disegani. Dengan demikian program pengelolaan pantai sebagai wisata bahari dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari Tabel 5.4 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.6 Grafik Vektor Prioritas Bidang Sosial Pengelolaan Wisata Pantai

5.2.4.3 Bidang Budaya

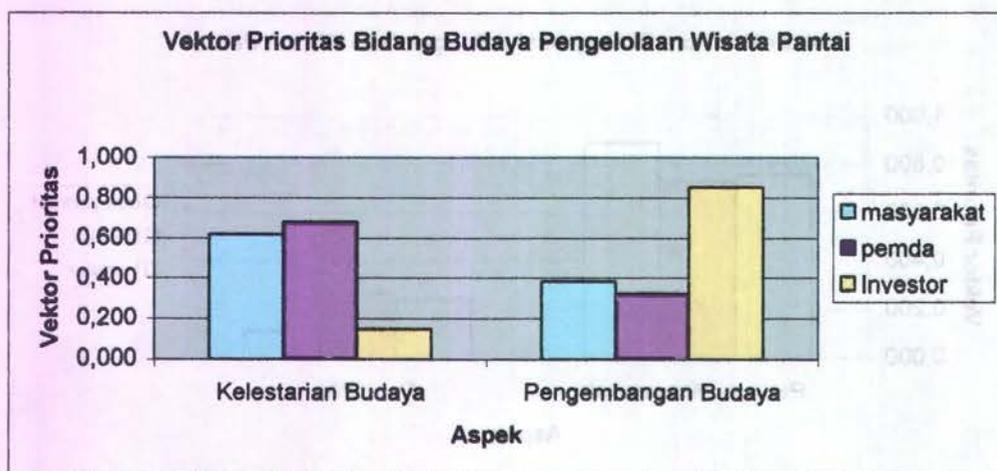
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari aspek-aspek pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5 Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Bidang Budaya Pengelolaan Wisata Pantai

No	Aspek	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	Investor
1	Kelestarian Budaya	0,617	0,676	0,147
2	Pengembangan Budaya	0,383	0,324	0,853
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Random Index (RI)</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0,0	0,0	0,0

Sumber : hasil pengolahan

Posisi pantai tambakrejo Kabupaten Blitar yang terletak di pesisir pantai selatan berpengaruh pada budaya dan adat istiadat masyarakat pantai yang mayoritas berlatar belakang etnis jawa. Tradisi labuhan (larung sesaji) yang masih selalu rutin dilakukan setiap tahun dipercaya dapat memberikan keselamatan dan rejeki yang melimpah, terlepas dari balak dan kesulitan. Selain itu tradisi tersebut mengundang kunjungan wisatawan lokal sehingga memberikan keuntungan pada pemda berupa peningkatan PAD. Maka dari itu pengembangan budaya diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap potensi wisata pantai, seperti tarian-tarian tradisional. Untuk itu diperlukan peran investor juga dukungan dari pemda dan masyarakat dalam pengembangan budaya. Dari Tabel 5.5 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.7 Grafik Vektor Prioritas Bidang Budaya Pengelolaan Wisata Pantai

5.2.4.4 Bidang Lingkungan

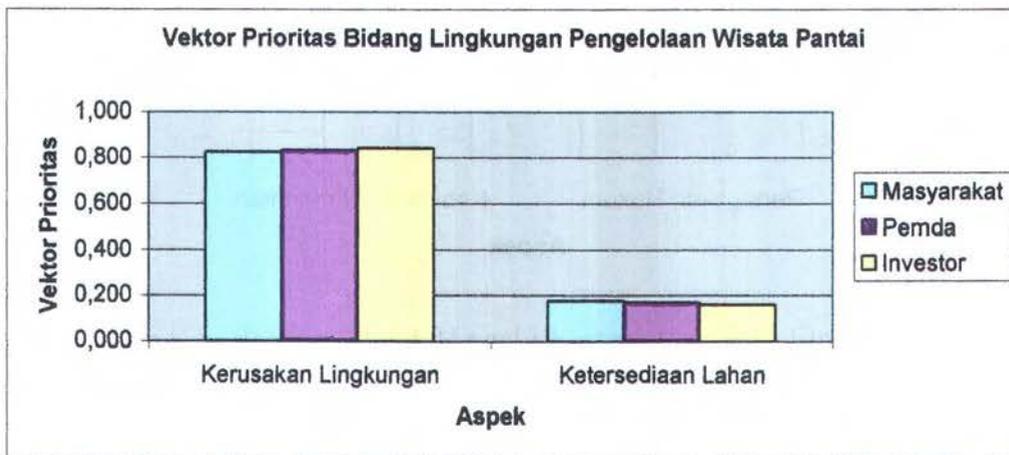
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari aspek-aspek pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6 Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Bidang Lingkungan Pengelolaan Wisata Pantai

No	Aspek	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Kerusakan Lingkungan	0,823	0,831	0,840
2	Ketersediaan Lahan	0,177	0,169	0,160
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Random Index (RI)</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0,0	0,0	0,0

Sumber : hasil pengolahan

Lingkungan merupakan faktor yang paling penting dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kabupaten Blitar. Lingkungan pantai dalam hal ini ekosistem alam pantai, lahan tempat masyarakat bekerja dan sumber daya masyarakat sangat dipengaruhi oleh aktifitas masyarakat itu sendiri. Maka dari itu pengelolaan potensi wisata di pantai tambakrejo harus mementingkan bidang lingkungan, yang berarti tidak merusak kelestarian dan ekosistem alam pantai juga tidak mengganggu lahan mata pencaharian masyarakat pantai. Dari Tabel 5.6 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.8 Grafik Vektor Prioritas Bidang Lingkungan Pengelolaan Wisata Pantai

5.2.4.5 Bidang Hukum

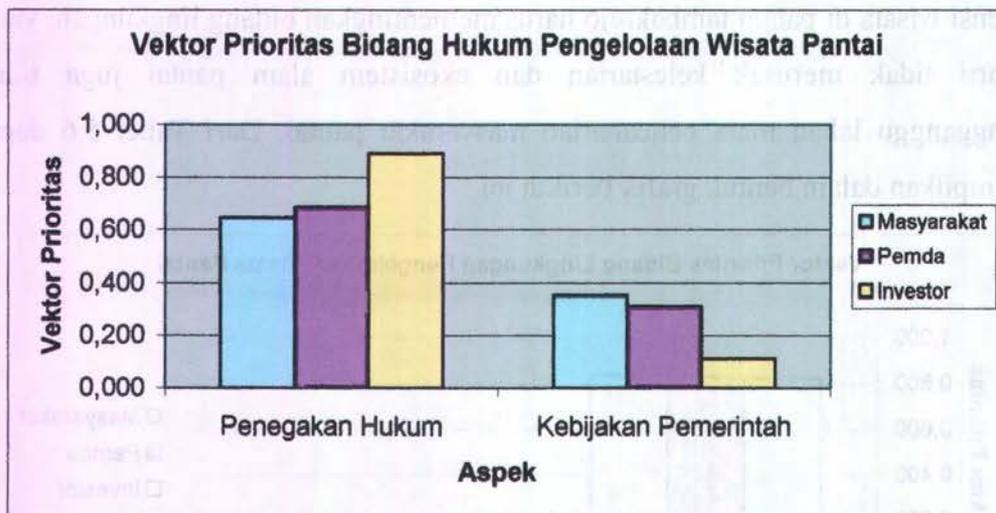
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari aspek-aspek pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7 Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Bidang Hukum Pengelolaan Wisata Pantai

No	Aspek	Vektor Prioritas		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Penegakan Hukum	0,645	0,687	0,888
2	Kebijakan Pemerintah	0,355	0,313	0,112
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Random Index (RI)</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0,0	0,0	0,0

Sumber : hasil pengolahan

Bidang yang juga penting dalam pengelolaan wisata pantai adalah bidang hukum, yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku dan sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum. Hal tersebut dapat menumbuhkan kesadaran akan hukum sehingga tercipta rasa aman dan tentram bagi semua pihak. Dari Tabel 5.7 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.9 Grafik Vektor Prioritas Bidang Hukum Pengelolaan Wisata Pantai

5.2.5 Level Keempat (Alternatif Kebijakan Pengelolaan Wisata Pantai)

Tingkatan selanjutnya dari hirarki yang dimodelkan adalah kebijakan pengelolaan wisata pantai sesuai pada Gambar 5.2. Kebijakan Pengelolaan Wisata Pantai pada

tingkat ini berdasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut, yaitu: (Ekonomi) aspek Peluang Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat, (Sosial) aspek Perilaku Masyarakat dan Pendidikan, (Budaya) aspek Kelestarian Budaya dan Pengembangan Budaya, (Lingkungan) aspek Kerusakan Lingkungan dan Ketersediaan Lahan, (Hukum) aspek Penegakan Hukum dan Kebijakan Pemerintah.

5.2.5.1 Aspek Peluang Investasi

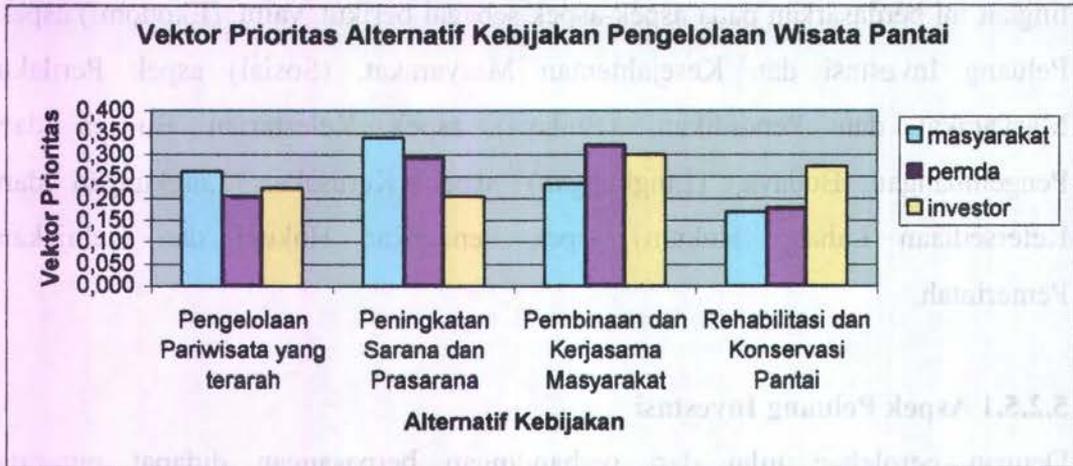
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari alternatif kebijakan pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8 Nilai Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Peluang Investasi

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	investor
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,261	0,205	0,222
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,339	0,294	0,205
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,232	0,322	0,300
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,169	0,179	0,272
<i>Consistency Index (CI)</i>		0,064	0,023	0,023
<i>Random Index (RI)</i>		0,900	0,900	0,900
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0,071	0,025	0,025

Sumber : hasil pengolahan

Potensi pantai tambakrejo Kabupaten Blitar masih sangat banyak yang belum terkelola secara optimal sebagai tempat wisata bahari. Adanya budaya lokal masyarakat yang berkembang sampai saat ini seperti budaya larung saji merupakan salah satu kelebihan pantai tambakrejo yang dapat dijadikan ikon wisata untuk kegiatan promosi. Selain itu akses perjalanan menuju pantai tambakrejo melalui perbukitan dengan pemandangan indah. Oleh karena itu diperlukannya investor untuk berinvestasi dalam pengelolaan potensi pantai tambakrejo sebagai tempat wisata bahari, agar pantai dapat tertata rapi, keindahan pantai tetap terjaga, adanya kegiatan usaha yang lebih beragam dan yang paling penting adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai juga menambah PAD. Dari Tabel 5.8 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.10 Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Peluang Investasi

5.2.5.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

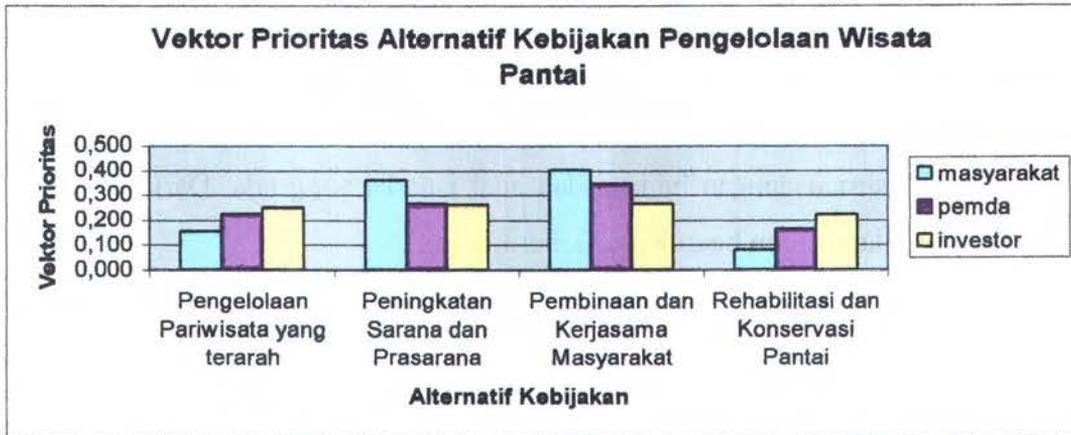
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari alternatif kebijakan pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.9 Nilai Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	investor
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,155	0,225	0,250
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,362	0,265	0,261
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,402	0,348	0,265
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,080	0,163	0,224
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0,055	0,008	0,000
	<i>Random Index (RI)</i>	0,900	0,900	0,900
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0,061	0,009	0,000

Sumber : hasil pengolahan

Mata pencaharian masyarakat pantai tambakrejo sebagian besar adalah nelayan yang penghasilannya sangat bergantung pada cuaca. Di saat cuaca buruk seperti ombak besar pendapatan nelayan akan menurun bahkan tidak bisa melaut sama sekali. Oleh karena itu diperlukan peran investor untuk berperan serta dalam pengelolaan pantai tambakrejo, salah satunya sebagai tempat wisata bahari yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan atau menjadi usaha alternatif yang tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti membuka kedai makanan atau menjual hasil laut kepada para wisatawan yang berkunjung. Dari Tabel 5.9 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.11 Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

5.2.5.3 Aspek Perilaku Masyarakat

Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari alternatif kebijakan pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

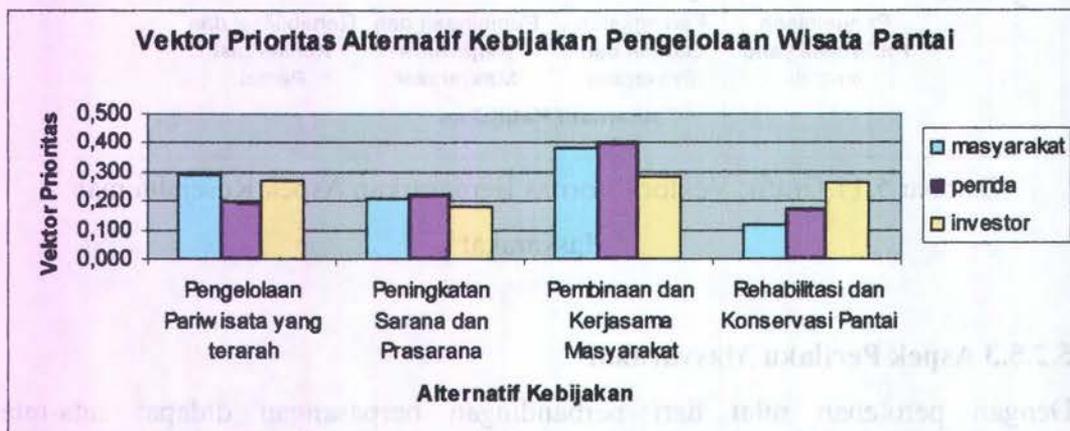
Tabel 5.10 Nilai Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Perilaku Masyarakat

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	investor
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,294	0,194	0,270
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,206	0,225	0,179
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,379	0,405	0,284
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,120	0,175	0,267
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0,069	0,011	0,068
	<i>Random Index (RI)</i>	0,900	0,900	0,900
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0,077	0,012	0,075

Sumber : hasil pengolahan

Budaya, pendidikan, adat istiadat, religi dan arus informasi merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perilaku masyarakat. Masyarakat pantai tambakrejo pada umumnya memiliki perilaku yang kurang menerima adanya perubahan. Hal tersebut mengakibatkan adanya sikap penolakan terhadap program pengelolaan pantai sebagai tempat wisata bahari. Faktor yang menjadi penyebab penolakan adalah seperti adanya rasa kekhawatiran akan hilangnya tempat mata pencaharian, tergusurnya lahan usaha karena digantikan oleh investor yang bermodal besar, dan rusaknya lingkungan alam sekitar pantai. Oleh karena itu

diperlukan pemberian wawasan, pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat bahwa, pengelolaan pantai akan dilaksanakan secara terarah dengan segala kebijakan-kebijakan dan peraturan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan tentunya sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang ada. Dari Tabel 5.10 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.12 Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Perilaku Masyarakat

5.2.5.4 Aspek Pendidikan

Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari alternatif kebijakan pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

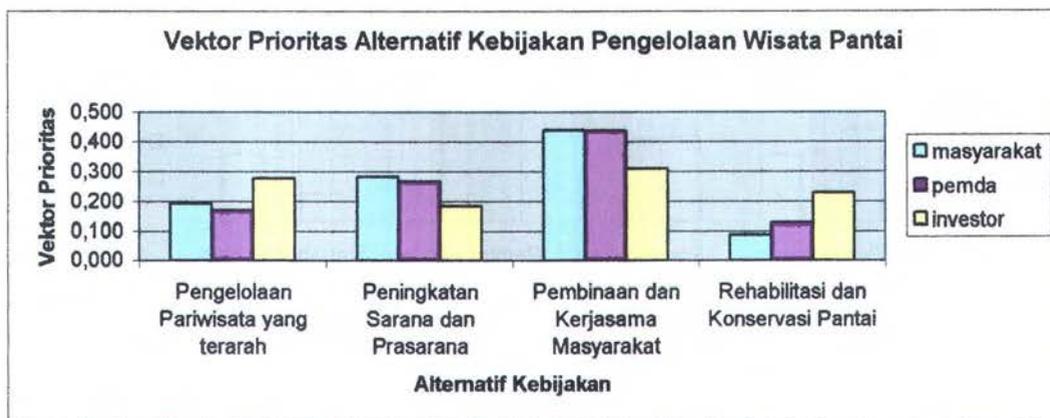
Tabel 5.11 Nilai Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Pendidikan

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	investor
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,192	0,169	0,277
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,282	0,266	0,184
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,439	0,437	0,311
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,087	0,127	0,229
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0,040	0,009	0,036
	<i>Random Index (RI)</i>	0,900	0,900	0,900
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0,045	0,010	0,040

Sumber : hasil pengolahan

Dari hasil survey diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat pantai relatif rendah sehingga sumber daya manusia juga relatif terbatas. Hal tersebut berpengaruh pada sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri. Seperti sikap penolakan terhadap adanya pengelolaan pantai tambakrejo menjadi menjadi

tempat wisata. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat pantai merasa bahwa melaut adalah keahlian satu-satunya yang dimiliki sehingga dengan dikembangkannya pantai tambakrejo menjadi tempat wisata bahari menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya satu-satunya mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar adalah nelayan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan terhadap masyarakat untuk memberikan wawasan dan pengertian bahwa pengelolaan pantai akan dilaksanakan secara terarah dengan segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat agar tidak merugikan nelayan. Dari Tabel 5.11 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.13 Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Pendidikan

5.2.5.5 Aspek Kelestarian Budaya

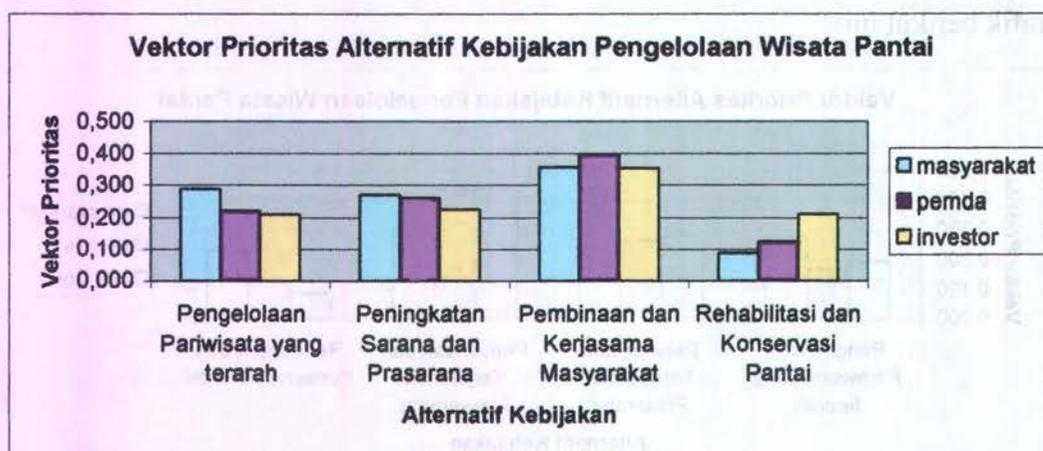
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari alternatif kebijakan pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.12 Nilai Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Kelestarian Budaya

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	investor
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,288	0,220	0,210
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,268	0,259	0,227
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,357	0,397	0,353
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,088	0,123	0,211
<i>Consistency Index (CI)</i>		0,056	0,056	0,001
<i>Random Index (RI)</i>		0,900	0,900	0,900
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0,063	0,062	0,001

Sumber : hasil pengolahan

Budaya lokal masyarakat pantai tambakrejo yang masih selalu rutin dilakukan sampai saat ini adalah tradisi labuhan (larung saji). Tradisi tersebut dipercaya dapat memberikan keselamatan dan rejeki yang melimpah, terlepas dari balak dan kesulitan. Nilai lebih budaya tersebut bagi pantai tambakrejo adalah menarik kunjungan wisatawan, yang tentunya dapat meningkatkan PAD. Oleh karena itu pemda diharapkan dapat ikut berperan serta melestarikan budaya lokal yang ada, seperti menyediakan sarana dan prasarana agar budaya tersebut dapat lebih berkembang lagi. Dari Tabel 5.12 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.14 Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Kelestarian Budaya

5.2.5.6 Aspek Pengembangan Budaya

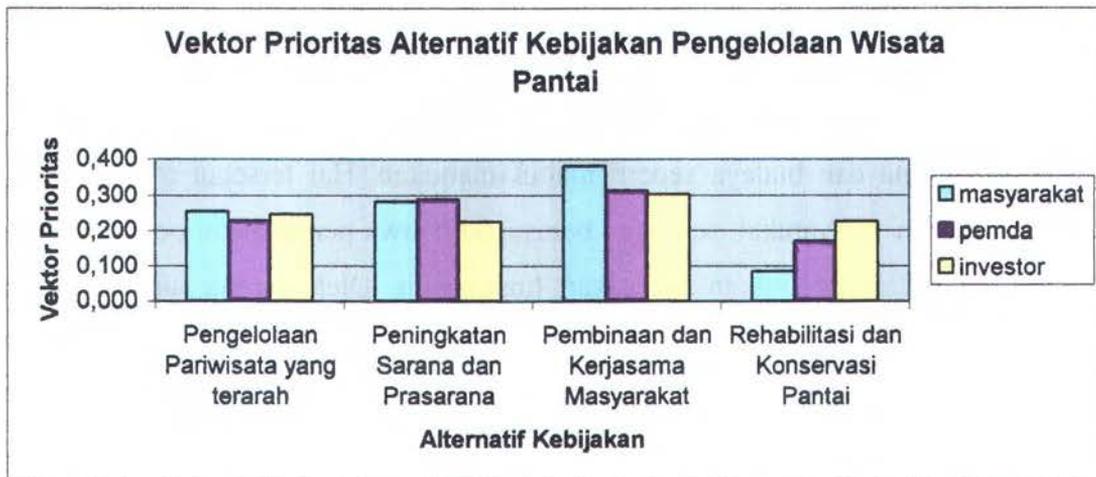
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari alternatif kebijakan pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.13 Nilai Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Pengembangan Budaya

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	investor
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,254	0,228	0,246
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,281	0,287	0,225
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,381	0,313	0,303
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,085	0,171	0,226
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0,022	0,058	0,021
	<i>Random Index (RI)</i>	0,900	0,900	0,900
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0,025	0,064	0,024

Sumber : hasil pengolahan

Banyaknya wisatawan yang berkunjung pada saat acara tradisi labuhan (larung saji) di pantai tambakrejo menunjukkan bahwa minat masyarakat (wisatawan) terhadap budaya lokal masih sangat besar. Oleh karena itu budaya yang sudah berlangsung sampai saat ini apabila lebih dikembangkan lagi diharapkan memberikan nilai tambah terhadap potensi wisata pantai, seperti wayang kulit, tarian-tarian (tayub). Selain itu adanya arena berkuda dan arena perkemahan dapat menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Untuk itu dalam pengembangan budaya tersebut diperlukan peran dari investor juga dukungan dari pemda seperti memberikan akses atau kemudahan-kemudahan bagi investor dalam menginvestasikan modalnya, dan yang juga penting adalah dukungan dari masyarakat. Dari Tabel 5.13 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.15 Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Pengembangan Budaya

5.2.5.7 Aspek Kerusakan Lingkungan

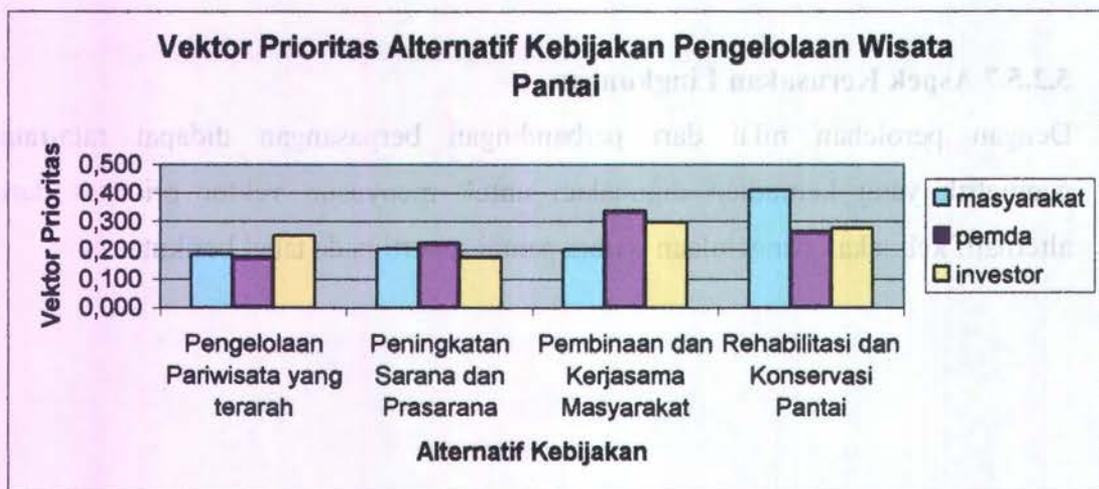
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari alternatif kebijakan pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.14 Nilai Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Kerusakan Lingkungan

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	investor
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,185	0,175	0,252
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,204	0,225	0,176
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,201	0,335	0,297
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,409	0,265	0,275
<i>Consistency Index (CI)</i>		0,013	0,013	0,005
<i>Random Index (RI)</i>		0,900	0,900	0,900
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0,014	0,015	0,005

Sumber : hasil pengolahan

Kerusakan lingkungan sebenarnya dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Lingkungan dalam hal ini terdiri dari lingkungan kerja masyarakat (nelayan) dan lingkungan alam sekitar pantai. Pada saat ini yang terjadi adalah kedatangan wisatawan lokal yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan, sehingga seringkali ditemukan banyak sampah baik di sekitar pantai maupun sepanjang perjalanan menuju pantai. Juga perilaku-perilaku wisatawan yang kurang sesuai dengan norma dan budaya seperti mabuk-mabukan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat, sehingga berasumsi bahwa pengelolaan potensi wisata pantai dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan peran aktif pemda untuk memberikan pengertian bahwa kerusakan lingkungan dapat dicegah dengan adanya peraturan atau kebijakan pemerintah dan hukum-hukum yang berlaku. Dari Tabel 5.14 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.16 Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Kerusakan Lingkungan

5.2.5.8 Aspek Ketersediaan Lahan

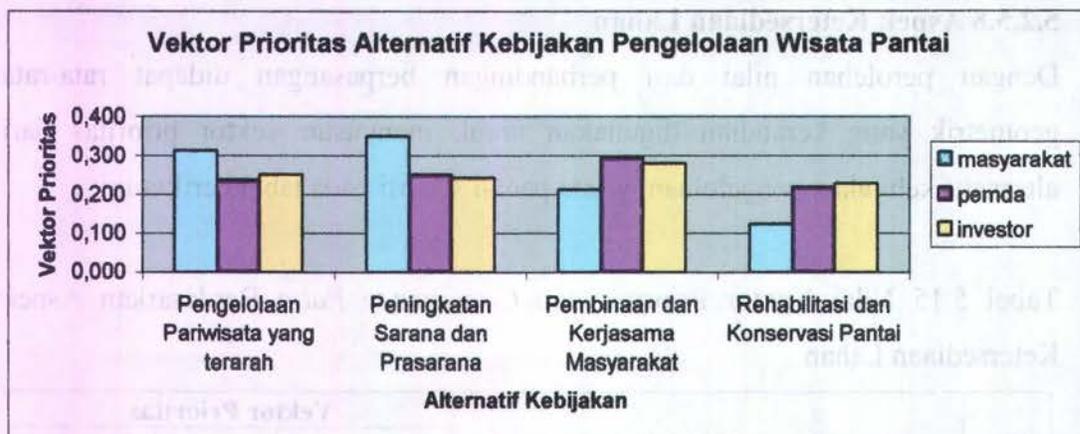
Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari alternatif kebijakan pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.15 Nilai Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Ketersediaan Lahan

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	investor
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,313	0,236	0,250
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,350	0,250	0,242
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,213	0,295	0,279
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,124	0,219	0,229
<i>Consistency Index (CI)</i>		0,012	0,015	0,009
<i>Random Index (RI)</i>		0,900	0,900	0,900
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0,013	0,016	0,010

Sumber : hasil pengolahan

Dari hasil survey diketahui bahwa adanya program pengelolaan pantai tambakrejo Kabupaten Blitar menjadi tempat wisata bahari menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat pantai. Selain kekhawatiran terjadinya kerusakan lingkungan alam pantai yaitu kekhawatiran akan tergesernya lingkungan lahan pekerjaan masyarakat pantai dan tergesernya tempat melakukan aktifitas budaya masyarakat. Apalagi bangunan-bangunan sekitar pantai hanya bersertifikat hak guna bangunan, sehingga masyarakat pantai berasumsi bahwa dengan dijadikannya pantai tambakrejo menjadi tempat wisata maka dengan mudah para pemilik modal atau pemda dapat menggusur bangunan-bangunan tersebut. Oleh karena itu pemda diharapkan memberi pengertian dan pembinaan bahwa program pengelolaan wisata bahari tidak akan mengganggu masyarakat pantai bahkan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari Tabel 5.15 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.17 Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Ketersediaan Lahan

5.2.5.9 Aspek Penegakan Hukum

Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari alternatif kebijakan pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

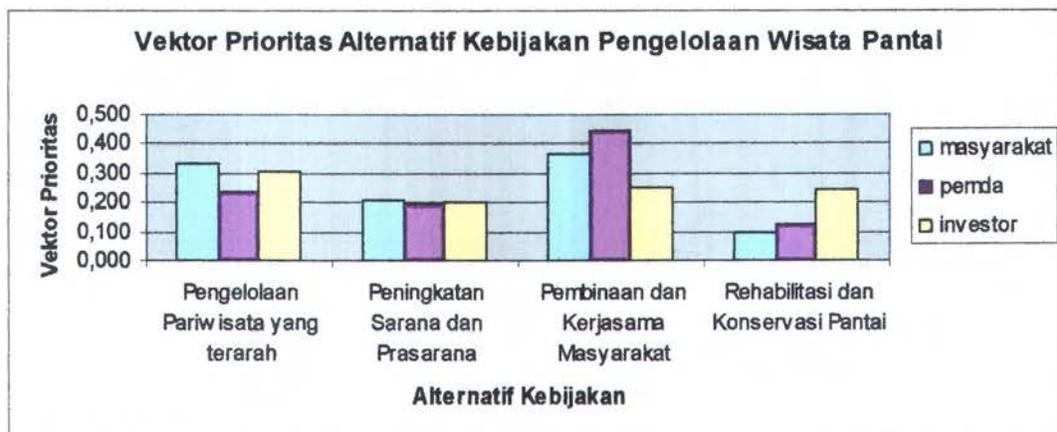
Tabel 5.16 Nilai Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Penegakan Hukum

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	investor
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,332	0,234	0,306
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,206	0,194	0,198
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,365	0,445	0,252
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,097	0,126	0,244
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0,015	0,006	0,011
	<i>Random Index (RI)</i>	0,900	0,900	0,900
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0,016	0,007	0,012

Sumber : hasil pengolahan

Diperlukannya aspek penegakan hukum adalah agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat atau para pelaku kebijakan untuk menaati dan menghargai berbagai ketentuan hukum yang ada contohnya, kedatangan wisatawan yang tidak menghargai kebersihan seperti membuang sampah atau wisatawan yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma dan budaya seperti mabuk-mabukan dapat dicegah dengan peraturan yang ada dan pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dalam pengelolaan potensi pantai tambakrejo Kabupaten Blitar dibutuhkan adanya penegakan hukum, sehingga

tercipta rasa aman bagi semua pihak. Dari Tabel 5.16 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.18 Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Penegakan Hukum

5.2.5.10 Aspek Kebijakan Pemerintah

Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan didapat rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun vektor prioritas dari alternatif kebijakan pengelolaan wisata pantai seperti pada tabel berikut ini:

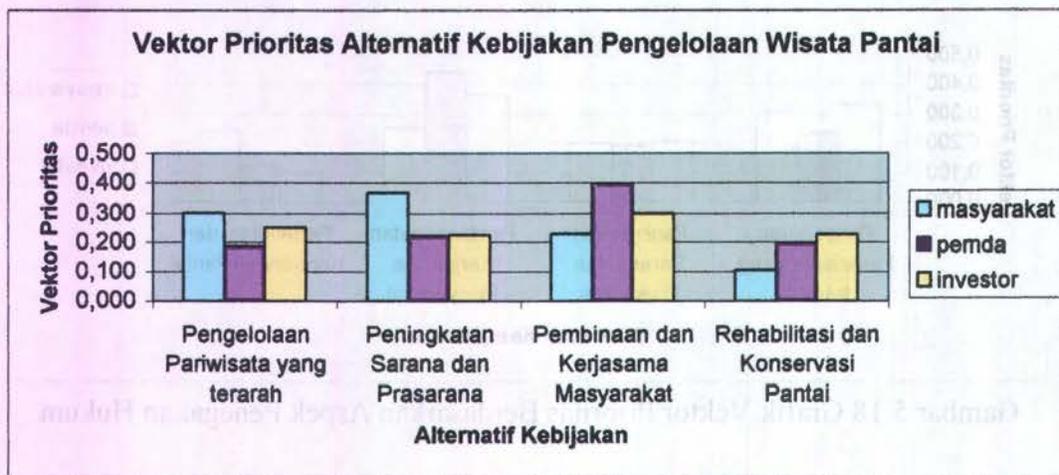
Tabel 5.17 Nilai Vektor Prioritas dan *Consistency Ratio* Berdasarkan Aspek Kebijakan Pemerintah

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas		
		masyarakat	pemda	investor
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,301	0,186	0,249
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,365	0,222	0,225
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,228	0,396	0,300
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,106	0,197	0,226
<i>Consistency Index (CI)</i>		0,024	0,053	0,020
<i>Random Index (RI)</i>		0,900	0,900	0,900
<i>Consistency Ratio (CR)</i>		0,026	0,059	0,022

Sumber : hasil pengolahan

Adanya kebijakan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar diharapkan dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat bahkan sampai kelompok masyarakat paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat. Dari hasil survey, pengelolaan pantai tambakrejo sebagai tempat wisata bahari menimbulkan sedikit kekhawatiran pada masyarakat akan tergesernya lahan tempat mata pencaharian mereka. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah agar pada program pengelolaan pantai tidak ada pihak yang

dirugikan, tidak menimbulkan konflik dan yang paling penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Tabel 5.17 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini:



Gambar 5.19 Grafik Vektor Prioritas Berdasarkan Aspek Kebijakan Pemerintah

5.2.6 Penentuan Alternatif Kebijakan Menurut Pelaku

A. Alternatif Kebijakan Menurut Masyarakat

Berdasarkan dari data Lampiran 5, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan potensi wisata pantai di Kabupaten Blitar dengan vektor prioritas menurut Masyarakat adalah Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat (0,313) menjadi prioritas utama diikuti Peningkatan Sarana dan Prasarana (0,276), Pengelolaan Pariwisata yang Terarah (0,226), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pantai (0,185). Dari hasil survey diketahui bahwa masyarakat memiliki kekhawatiran akan terjadi kerusakan lingkungan pantai apabila pantai tambakrejo dikelola menjadi tempat wisata bahari oleh pihak investor. Dalam hal ini lingkungan tempat sumber penghidupan masyarakat yang sebagian besar adalah nelayan dan lingkungan tempat masyarakat pantai melakukan ritual budaya lokal yang rutin dilakukan secara turun temurun sebagai kepercayaan masyarakat pantai yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan bencana dan juga kedatangan para wisatawan yang kurang memperhatikan kebersihan seperti membuang sampah seenaknya atau perilaku-perilaku wisatawan yang kurang sesuai dengan norma dan budaya.

Salah satu bentuk contoh kekhawatiran nelayan adalah konsekuensi yang mungkin terjadi bahwa pasar ikan dan tempat parkir perahu nelayan harus dipindahkan, sehingga tidak menjadi satu di pantai wisata selain itu adanya campur tangan pihak swasta/investor sebagai pengelola dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak masyarakat pantai khususnya nelayan dalam melakukan aktifitasnya termasuk ritual budaya. Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa pengelolaan potensi wisata pantai tidak akan merusak lingkungan atau menggeser mata pencaharian nelayan, justru akan menambah lapangan pekerjaan, terutama disaat nelayan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk.

B. Alternatif Kebijakan Menurut Pemerintah Daerah

Berdasarkan dari data Lampiran 5, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan potensi wisata pantai di Kabupaten Blitar dengan vektor prioritas menurut Pemerintah Daerah adalah Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat (0,364) menjadi prioritas utama diikuti Peningkatan Sarana dan Prasarana (0,248), Pengelolaan Pariwisata yang Terarah (0,205), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pantai (0,184). Dari hasil survey diketahui bahwa adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pihak investor/swasta sebagai pengelola wisata pantai menyebabkan kurangnya dukungan masyarakat pada pengelolaan potensi wisata pantai tambakrejo. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemda diharapkan melakukan pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat melalui pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat yang disegani serta melalui pendekatan budaya lokal. Seperti memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa program pengelolaan potensi wisata pantai dilakukan secara terarah, juga memberikan pengertian akan pentingnya pihak investor atau swasta dalam pengelolaan wisata yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sarana dan prasarana. Namun pemda juga harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terdiri dari syarat dan ketentuan-ketentuan sehingga pada pelaksanaan pengelolaan wisata pantai tidak merugikan masyarakat atau tidak hanya memberikan keuntungan sepihak saja.

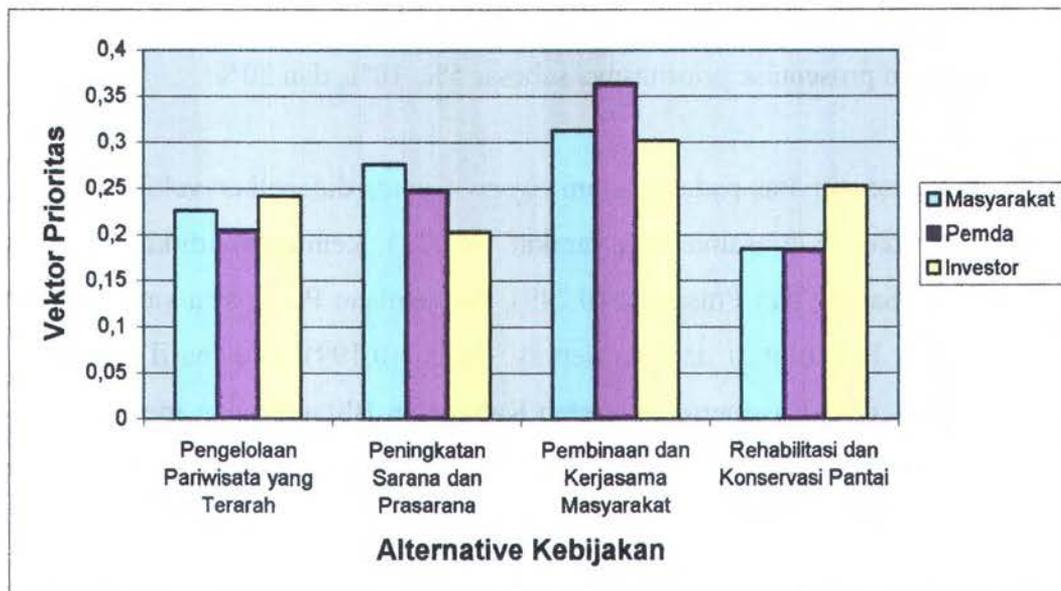
Untuk pengembangan potensi wisata, pemda juga harus melakukan kegiatan promosi misalnya menjadikan budaya lokal masyarakat pantai tambakrejo sebagai ikon wisata, sehingga diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan dan membuka peluang investor untuk melakukan investasi di pantai tambakrejo. Selain itu diperlukan juga kerjasama dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, seperti selalu menjaga kebersihan area sekitar pantai, ikut mengawasi dan menegur apabila terdapat pengunjung/wisatawan yang kurang menjaga kebersihan atau merusak kelestarian alam.

C. Alternatif Kebijakan Menurut Investor

Berdasarkan dari data Lampiran 5, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan potensi wisata pantai di Kabupaten Blitar dengan vektor prioritas menurut Investor adalah Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat (0,302) menjadi prioritas utama diikuti Rehabilitasi dan Konservasi Pantai (0,253), Pengelolaan Pariwisata yang Terarah (0,242) serta Peningkatan Sarana dan Prasarana (0,203). Dari hasil survey diketahui bahwa investor belum mendapatkan peluang untuk berinvestasi mengembangkan usaha di daerah pantai yang berpotensi sebagai tempat wisata bahari selain itu masih minimnya investor yang bersedia menginvestasikan modalnya di kawasan pesisir. Salah satu faktor penyebab adalah kurangnya dukungan dari masyarakat pantai yang berasumsi bahwa adanya pihak investor/swasta sebagai pengelola akan menggeser lahan mata pencaharian masyarakat pantai dan membatasi ruang gerak masyarakat pantai. Oleh karena itu diperlukan pemberian pengertian terhadap masyarakat pantai bahwa adanya pihak investor/swasta sangat diperlukan dalam pengembangan potensi wisata seperti meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, dan melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal terintegrasi dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah daerah untuk membina dan bekerja sama dengan memberikan kemudahan bagi para investor yang bersedia menanamkan modal di kawasan pantai tambakrejo tanpa merusak kelestarian alam dan menjaga keaslian budaya lokal masyarakat.

D. Gambar Pengelolaan Kawasan Pesisir menurut Pelaku

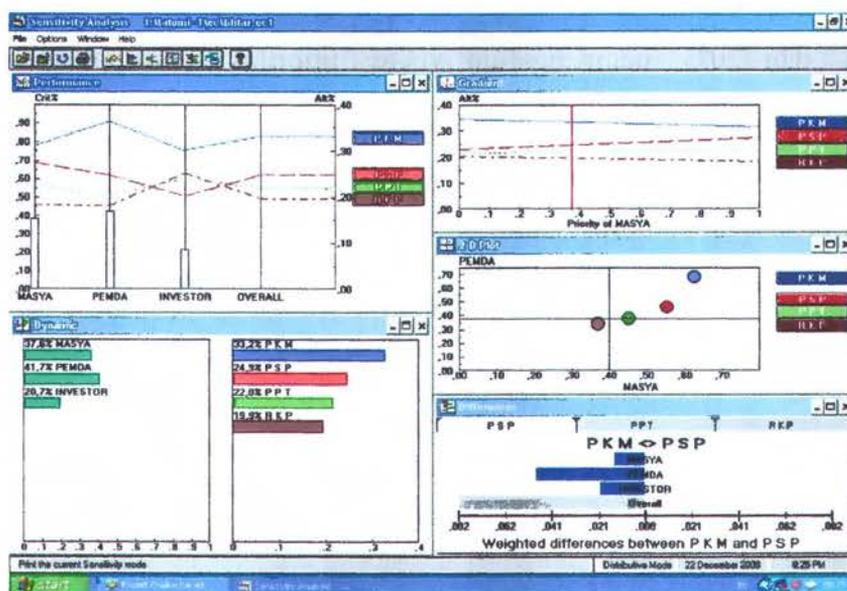
Dari hasil yang didapatkan diatas, dapat digambarkan dalam bentuk grafik



Gambar 5.20 Grafik Vektor Prioritas Alternatif Kebijakan Berdasarkan Pelaku

5.3 Analisis Sensitivitas Pengelolaan Potensi Wisata Pantai di Kabupaten Blitar

Analisa sensitivitas ini digunakan untuk mengetahui tingkatan sentivitas prioritas terhadap perubahan yang dilakukan pelaku terhadap kebijakan. beberapa tipe dari analisis sensitivitas, yaitu : *Performance*, *Dynamic*, *Gradient*, *2-D Plot* serta *Difference*.



Gambar 5.21 Analisa Sensitivitas dalam program Expert Choice

Untuk melihat dampak sensitivitas dari prioritas yang lain, maka pada analisa sensitivitas ini dilakukan perubahan prioritas pada pelaku pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang memiliki tingkat prioritas terbesar, yaitu dengan menambahkan prosentase prioritasnya sebesar 5%, 10%, dan 20%.

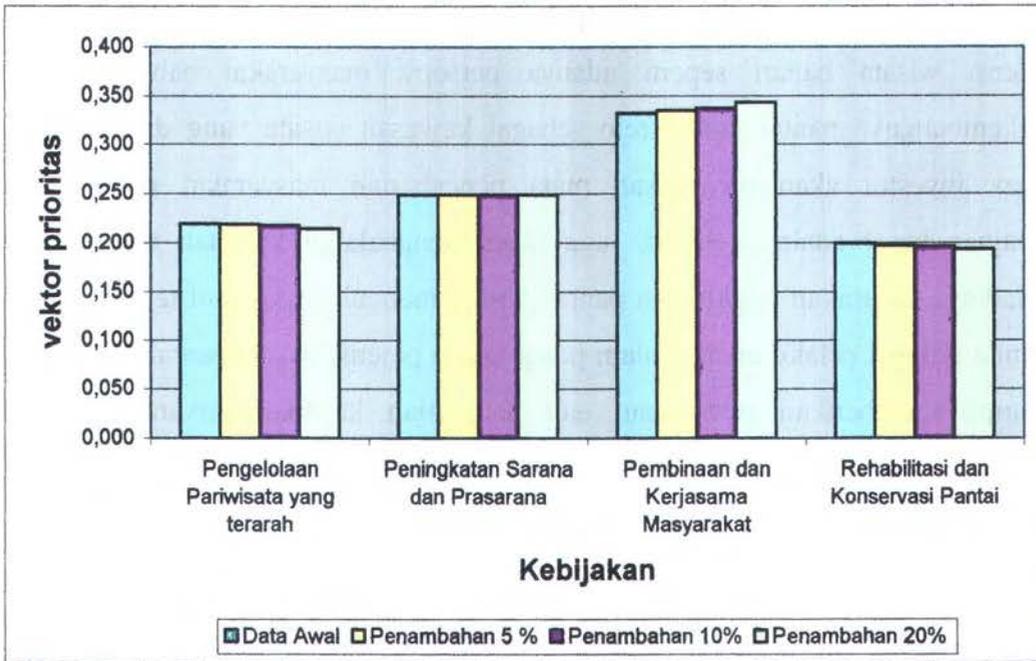
Hasil analisa sensitivitas pada program *Expert Choice* didapatkan vektor prioritas Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat (0,332) kemudian diikuti dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana (0,249), Pengelolaan Pariwisata yang Terarah (0,220), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pantai (0,199). Dari hasil perubahan prioritas pada pelaku pemerintah daerah Kabupaten Blitar dengan menggunakan program *Expert Choice*, maka analisa sensitivitas yang dihasilkan dapat dituliskan sebagai berikut :

Tabel 5.18 Nilai Vektor Prioritas hasil Analisa Sensitivitas

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas			
		Data Awal	Penambahan 5 %	Penambahan 10%	Penambahan 20%
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,220	0,219	0,218	0,215
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,249	0,249	0,249	0,249
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,332	0,335	0,337	0,343
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,199	0,197	0,196	0,193

Sumber : hasil pengolahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan nilai prioritas pelaku sebesar 5%, 10%, dan 20% mempengaruhi vektor prioritas kebijakan tetapi tidak mengubah urutan prioritas kebijakan pengelolaan wisata pantai di Kabupaten Blitar. Untuk memudahkan pengamatan dampak perubahan prioritas pelaku maka dibuat grafik sebagai berikut :



Gambar 5.22 Grafik Nilai Vektor Prioritas hasil Analisa Sensitivitas

5.4 Pembahasan

Dari analisa dengan program *expert choice* didapatkan alternatif kebijakan pengelolaan potensi wisata pantai sebagai berikut:

Tabel 5.19 Nilai Vektor Prioritas dan Rasio konsistensi

No	Alternatif Kebijakan	Vektor Prioritas
1	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	0,220
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,249
3	Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat	0,332
4	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai	0,199
	<i>Consistency Index (CI)</i>	0,050
	<i>Random Index (RI)</i>	0,900
	<i>Consistency Ratio (CR)</i>	0,056

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prioritas pengelolaan potensi wisata pantai di Kabupaten Blitar yang terbesar adalah Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat (0,332) kemudian diikuti dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana (0,249), Pengelolaan Pariwisata yang Terarah (0,220), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pantai (0,199). Berdasarkan hasil AHP, alternatif prioritas yang lebih diharapkan dari pihak masyarakat, pemerintah daerah dan investor adalah Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat. Dengan adanya pembinaan dan kerjasama

dengan masyarakat diharapkan mampu mengatasi permasalahan pada pengelolaan potensi wisata bahari seperti adanya persepsi masyarakat bahwa dengan berkembangnya pantai tambakrejo sebagai kawasan wisata yang dikelola oleh pihak investor akan mematikan mata pencaharian masyarakat pantai yang sebagian besar adalah nelayan, juga akan menghalangi kegiatan budaya, dan terjadinya kerusakan lingkungan pantai. Untuk mengubah persepsi tersebut maka pemda sebagai pelaku utama dalam pengelolaan potensi wisata pantai diharapkan mampu memberikan pembinaan dan pengertian kepada masyarakat bahwa program pengelolaan pariwisata akan dilaksanakan secara terarah dalam hal ini sesuai dengan prinsip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2003) dalam pengembangan ekowisata. Sehingga pengelolaan pariwisata akan menambah kemajuan pada daerah pantai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan adanya sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Selain pembinaan pemda juga diharapkan melakukan kerjasama dengan investor dan masyarakat dalam melestarikan dan meningkatkan kualitas pelestarian alam pantai, juga dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi pantai. Sehingga dampak kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas wisatawan dapat dicegah. Sebagai contoh masyarakat dapat langsung menegur apabila mendapati wisatawan yang melakukan perusakan lingkungan. Dalam hal ini masyarakat sebagai tenaga pengaman partisipatif.

Dengan adanya kebijakan seperti tersebut diatas, diharapkan mampu menjadi sebuah kesepakatan bersama dan dijadikan pedoman dalam mengatur, mengarahkan serta mengendalikan berbagai aktivitas para pelaku kebijakan dalam upaya pemanfaatan potensi wisata yang pantai terpadu (*integrated*) dan lestari, serta menjaga keaslian budaya lokal masyarakat. Sehingga program pengelolaan potensi wisata pantai mampu menunjang kegiatan investasi dan usaha masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya dari hasil kuisisioner maupun dari analisa data, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Dari hasil kuisisioner yang dilakukan pada *stakeholder*, dapat diketahui bahwa pengelolaan potensi wisata pantai tambakrejo Kabupaten Blitar untuk dijadikan tempat wisata bahari selama ini masih terkendala oleh adanya persepsi masyarakat apabila dengan berkembangnya pantai tambakrejo sebagai kawasan wisata akan mematikan mata pencaharian mereka dan akan terhalangnya kegiatan budaya yang berlangsung selama ini dan juga adanya pendatang (pihak investor / swasta dan wisatawan) yang dikhawatirkan dapat merusak lingkungan pantai. Untuk merubah persepsi tersebut diperlukan pembinaan dan pengertian kepada masyarakat bahwa dengan program pengelolaan pariwisata yang terarah serta kerjasama antara pemda, investor dan masyarakat akan menambah kemajuan pada daerah pantai itu sendiri seperti adanya peningkatan sarana dan prasarana, menambah lapangan pekerjaan, namun tetap mempertahankan keaslian pantai itu sendiri sehingga tidak mengganggu mata pencaharian masyarakat khususnya nelayan dan kegiatan budaya yang sudah ada tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu diadakannya pemberlakuan peraturan-peraturan yang cukup ketat dan pemberian sanksi pada pihak-pihak yang melakukan perusakan lingkungan, juga bekerjasama melakukan rehabilitasi dan konservasi pantai oleh seluruh pihak yang terkait agar kelestarian alam tetap terjaga.

2. Dari analisa sensitivitas yang dihasilkan dari program Expert Choice dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai vektor prioritas pada pelaku pengelolaan berpengaruh terhadap nilai vektor prioritas kebijakan akan tetapi tidak merubah urutan kebijakan Pembinaan dan Kerjasama Masyarakat (0,332), diikuti dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana (0,249), Pengelolaan Pariwisata yang Terarah (0,220), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pantai (0,199).

6.2 Saran

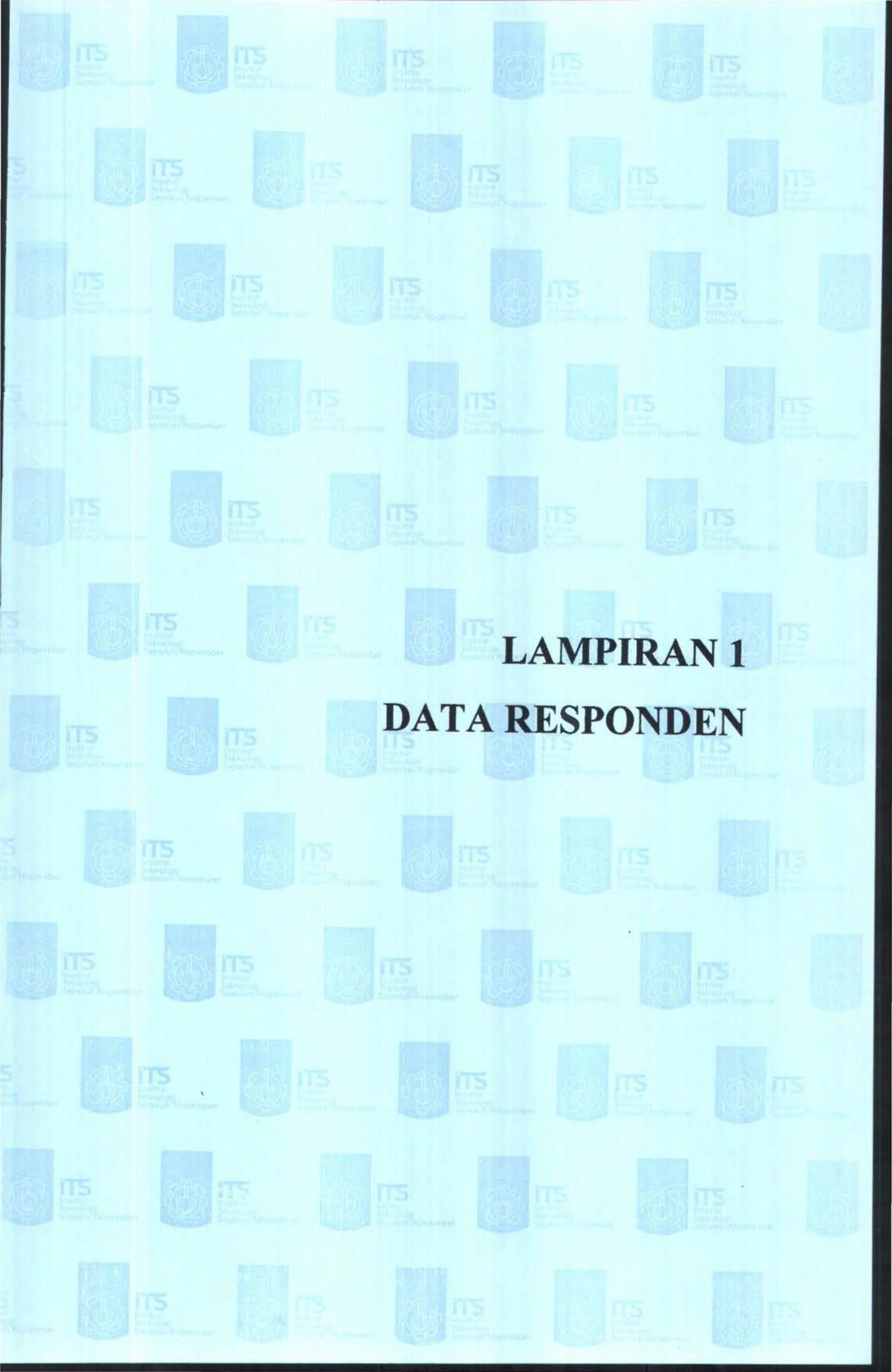
Agar penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan lebih dikembangkan di masa yang akan datang sekiranya disampaikan saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat pesisir hendaknya lebih berpartisipasi dalam pengelolaan potensi wisata seperti dengan menjaga kelestarian alam dan budaya lokal.
2. Untuk pemerintah Kabupaten Blitar hendaknya memperhatikan pengelolaan potensi wisata pantai melalui program pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana.
3. Untuk investor hendaknya memperhatikan kelestarian kawasan pesisir dalam pengelolaan wisata pantai, dapat membantu masyarakat pesisir dalam usaha pengelolaan potensi wisata serta berperan serta dalam program pemerintah kabupaten Blitar dalam pengelolaan wisata pantai tambakrejo secara berkelanjutan.
4. Penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan pengembangan pada penyusunan hierarki, seperti dengan menambah aspek maupun kebijakannya.
5. Penelitian ini sekiranya dapat dilakukan dilokasi penelitian di kabupaten lain yang memiliki kawasan pesisir dan untuk instansi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Chaldun. 2004. **Atlas Jawa Timur**. PT. Karya Pembina Swanjaya
- Akhwadhy, Rudhy. 2002. **Studi Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir dengan Analytic Hierarchy Process: Studi Kasus Kabupaten Pasuruan**. Tesis Program Pasca Sarjana, Program Studi Teknologi Kelautan. FTK-ITS. Surabaya. Tidak Dipublikasikan.
- BAPPEDA Kab Blitar. 2003. **Penelitian Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Blitar**. Blitar
- Badan Pusat Statistik. (2005), **Kabupaten Blitar Dalam Angka**.
- Dahuri, Rochmin, dkk. 2004. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu**. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Dahuri et al. 2001. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu**. Pradnya Paramita. Bogor.
- Daniyati, Rury Firlia. 2005. **Upaya Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lumajang**. Tugas Akhir Jurusan Teknik Kelautan, FTK-ITS. Surabaya. Tidak dipublikasikan.
- Lasabuda, Ridwan. 2003. **Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat (suatu tuntutan di era otonomi daerah)**. Makalah Falsafah Sains (PPs 702). Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Latama et al. 2002. **Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Indonesia**. Makalah Falsafah Sains (PPs 702). Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Mamuaya, Gybert E. 2003. **Kerangka Survei Penatagunaan Ruang Laut Daerah**. Makalah Falsafah Sains (PPs 702). Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Mustain, M., Arief Suroso, M. Husnul Fauzi. 2004. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Pantai Utara Jakarta. ISSN 1829-6513. **Seminar Nasional Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama**, Juni 2004. p:1-14.

- Prianto, Dwi. 2007. **Analisa Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Pesisir Kabupaten Gersik**. Tugas Akhir Jurusan Teknik Kelautan, FTK-ITS. Surabaya. Tidak dipublikasikan.
- Saaty, Thomas L. 1988. **The Analytic Hierarchy Process**. United States of America. Pittsburg University.
- Saaty, Thomas L, 199. **Pengambil Keputusan Bagi Para Pemimpin**. PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Sulistiyawan, Sony. 2006. **Manajemen Sumberdaya Pesisir Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan, Jatim**. Tugas Akhir Jurusan Teknik Kelautan, FTK-ITS. Surabaya. Tidak dipublikasikan.
- Untung. 2008. **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Wakatobi Berbasis Konservasi**. Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Teknologi Kelautan, FTK-ITS. Surabaya. Tidak Dipublikasikan.
- Umamah, Mas. 2003. **Aplikasi *Analytic Hierarchy Process* untuk Pengelolaan Wilayah di Pesisir Kabupaten Gersik**. Tugas Akhir Jurusan Teknik Kelautan. FTK-ITS. Surabaya. Tidak Dipublikasikan.
- Web Site Resmi Kabupaten Blitar 2009: <http://www.blitarkab.go.id>
- Wiyana, Adi. 2004. **Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T)**. Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPs 702). Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

The background of the page is a repeating pattern of the ITS logo, which consists of a blue shield with a white emblem and the text 'ITS Institut Teknologi Sepuluh Nopember' to its right.

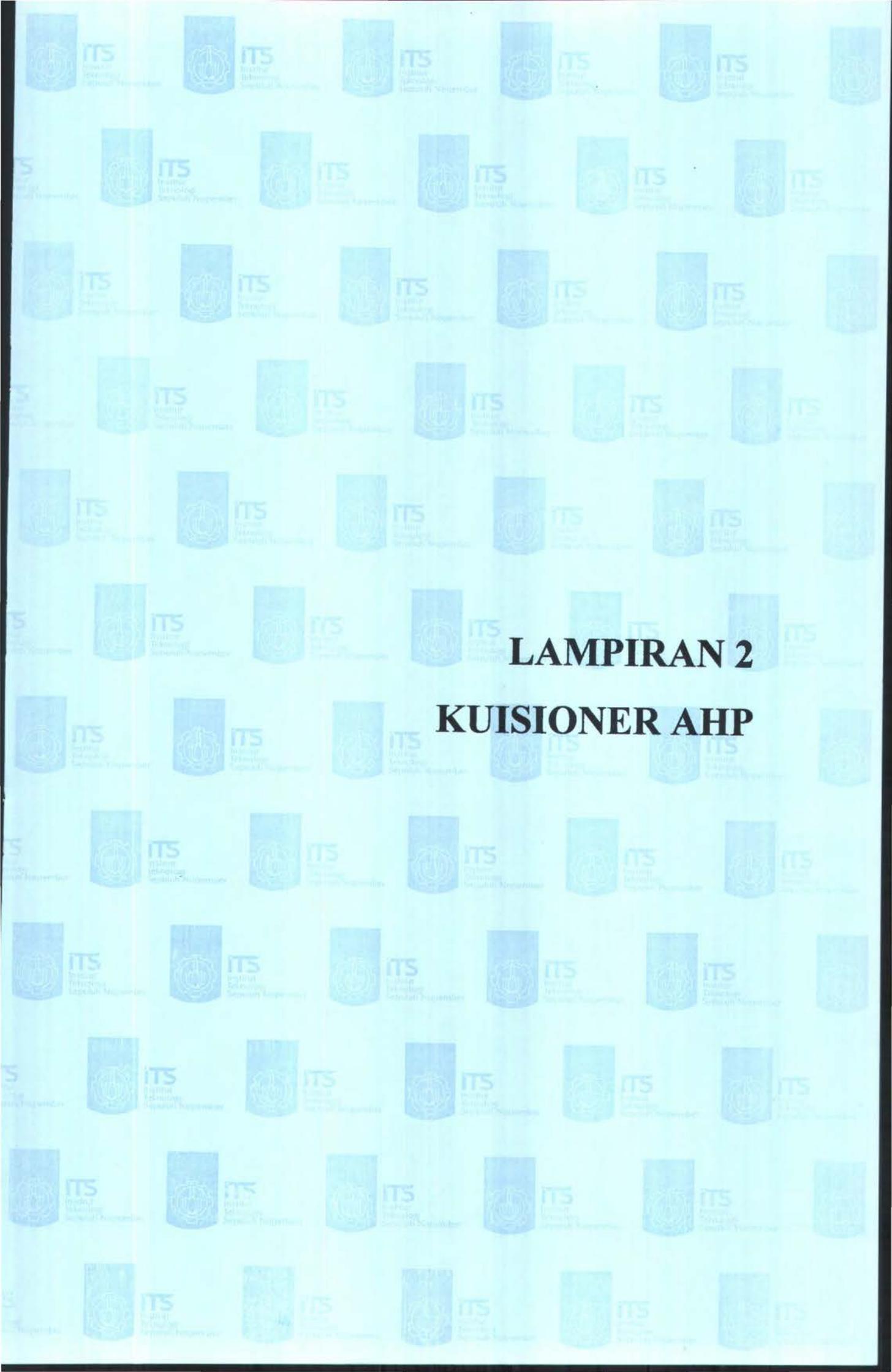
LAMPIRAN 1

DATA RESPONDEN

Data Responden

No	Pelaku	Desa/instansi	Pendidikan	Nama	Pekerjaan
1	Masyarakat	Tambakrejo	SMA	Boiman	Sekdes
2	Masyarakat	Tambakrejo	S1	Pak Madi	Ketua Nelayan
3	Masyarakat	Tambakrejo	SMA	Sueb	Nelayan
4	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Imam Puni	Nelayan
5	Masyarakat	Tambakrejo	SMK	Hendra	Nelayan
6	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Soedarto	Tani
7	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Deri Eko Susanto	Tani
8	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Edi	Nelayan
9	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Doni	Nelayan
10	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Sugeng Raharjo	Nelayan
11	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Andik Taufiq	Nelayan
12	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	P Hamid	Nelayan
13	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Arif Farianto	Nelayan
14	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Danik	Nelayan
15	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Budi	Nelayan
16	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	David	Nelayan
17	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Cristian	Nelayan
18	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Sudiyanto	Nelayan
19	Masyarakat	Tambakrejo	SMA	Rizki Febri Handoko	Nelayan
20	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Wakidi	Nelayan
21	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Amin	Kuli
22	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Rudi	Nelayan
23	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Katimun	Nelayan
24	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Masno	Nelayan
25	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Romi	Nelayan
26	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Ujang	Nelayan
27	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Yanto	Tani
28	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Sugeng	Nelayan
29	Masyarakat	Tambakrejo	SMA	Budiman	Nelayan
30	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Selamet	Nelayan
31	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Bejan	Nelayan
32	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Katiran	Nelayan
33	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Bejo	Nelayan
34	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Legiman	Nelayan
35	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Jarwo	Nelayan
36	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Parmi	Nelayan
37	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Paeran	Nelayan
38	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Nono	Nelayan
39	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Rudi	Nelayan
40	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Samijan	Nelayan
41	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Muji	Nelayan
42	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Katimen	Nelayan
43	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Eko Pranolo	Nelayan
44	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Yet	Nelayan
45	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Gianto	Nelayan
46	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Tomo	Nelayan
47	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Jono	Nelayan
48	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Suwardianto	Nelayan
49	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Darmo	Nelayan
50	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Paiman	Nelayan

No	Pelaku	Desa/instansi	Pendidikan	Nama	Pekerjaan
51	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Sanusi	Nelayan
52	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Dollah Ariyin	Nelayan
53	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Karman	Nelayan
54	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Santoso	Nelayan
55	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Edi Santoso	Nelayan
56	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Daim	Nelayan
57	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Kasmadi	Nelayan
58	Masyarakat	Tambakrejo	SMK	Imam Masroi	Swasta
59	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Abu	Nelayan
60	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Agus	Swasta
61	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Sumarto	Nelayan
62	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Ponidi	Nelayan
63	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Abdur Rokim	Nelayan
64	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Bagus Aminullah	Nelayan
65	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Kamto	Nelayan
66	Masyarakat	Tambakrejo	SMA	Putra Hadi Wijaya	Tani
67	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Deni	Nelayan
68	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Ratno	Nelayan
69	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Joko	Nelayan
70	Masyarakat	Tambakrejo	SMA	Amin S	Nelayan
71	Masyarakat	Tambakrejo	STM	Agus Prawirodinoto	Pedagang
72	Masyarakat	Tambakrejo	S1	Ali Gufron	Swasta
73	Masyarakat	Tambakrejo	SMA	Andi	Swasta
74	Masyarakat	Tambakrejo	SMA	Putut Suwarno	Swasta
75	Masyarakat	Tambakrejo	SD	Arief	Swasta
76	Masyarakat	Tambakrejo	SD	B. Kartini	Pedagang
77	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Eni Setyorini	Swasta
78	Masyarakat	Tambakrejo	SMA	Riska Aprilianti	Swasta
79	Masyarakat	Tambakrejo	SD	B. Mur	Pedagang
80	Masyarakat	Tambakrejo	SMP	Miftahul Huda	Nelayan
81	Pemkab Blitar	Dinas Inpupar	D3	Muhammad Arifin, Amd	PNS
82	Pemkab Blitar	Dinas Inpupar	S1	May Huda Nugroho	PNS
83	Pemkab Blitar	Dinas Inpupar	S1	Agus M Setiawan	PNS
84	Pemkab Blitar	Dinas Inpupar	S1	Eko Haris	PNS
85	Pemkab Blitar	Dinas Tataruang	S1	Drs Hari Wibowo	PNS
86	Pemkab Blitar	Dinas Tataruang	S1	Tatik	PNS
87	Pemkab Blitar	Dinas Sosial	S1	Sutikno	PNS
88	Pemkab Blitar	Dinas Sosial	S1	Badi Zulfa Nikayati	PNS
89	Pemkab Blitar	DKP	S1	Sumardi	PNS
90	Pemkab Blitar	DKP	S1	Dedi Prastowo	PNS
91	Pengusaha	Tambakrejo	SMA	B. Lis	Wiraswasta
92	Pengusaha	Tambakrejo	SD	Somiatun	Wiraswasta
93	Pengusaha	Tambakrejo	SMP	Heru Suharyanto	Wiraswasta
94	Pengusaha	Tambakrejo	SD	P Abu	Wiraswasta
95	Pengusaha	Tambakrejo	SMA	Sukirman	Wiraswasta
96	Pengusaha	Tambakrejo	SD	B. Sumdiah	Wiraswasta
97	Pengusaha	Tambakrejo	SMP	Bp Darman	Wiraswasta
98	Pengusaha	Tambakrejo	SD	Tukinah	Wiraswasta
99	Pengusaha	Tambakrejo	SMA	Nono Sudarno	Wiraswasta
100	Pengusaha	Tambakrejo	SMP	Paino	Wiraswasta

The background of the page is a repeating pattern of the ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) logo. Each logo consists of a blue shield with a white emblem inside, followed by the letters 'ITS' in a bold, sans-serif font. The logos are arranged in a grid-like pattern across the entire page.

LAMPIRAN 2

KUISIONER AHP

KUISIONER AHP

No Kuisisioner	:
Tanggal Survei	:
Survaiyor	: Tomi Dwicahyo

**PENGELOLAAN POTENSI WISATA PANTAI DI KABUPATEN BLITAR
BERBASIS BUDAYA LOKAL MASYARAKAT**



**JURUSAN TEKNIK KELAUTAN
FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2009**

KUISIONER PERSEPSI

Kuisisioner ini dibuat untuk kegiatan penulisan Tugas Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
Kami menjamin kerahasiaan informasi anda dan semoga penelitian ini berguna bagi perbaikan kesejahteraan penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Blitar
Atas partisipasinya, kami ucapkan terimakasih

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Desa/Instansi :
5. Jenis Kelamin :
6. Pendidikan :

Contoh pertanyaan dan jawaban:

- Untuk mengatasi persoalan di daerah anda, manakah yang lebih penting antara bidang A atau B. berikan skor penilaian anda? (skala 1 s/d 9)
- Contoh pengisian BENAR (Pengisian harus salah satu)

A			O					B								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sangat Penting sekali			Sama penting					Sangat penting sekali								

- Contoh pengisian SALAH (Tidak diisi)

A			O					B								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sangat Penting sekali			Sama penting					Sangat penting sekali								

- Contoh pengisian SALAH (Diisi keduanya)

A			O					B								
9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sangat Penting sekali			Sama penting					Sangat penting sekali								

Keterangan untuk jawaban

- Jika anda memilih bidang B dengan nilai 7, maka arti jawaban tersebut yaitu bidang B sangat penting untuk dikerjakan lebih dulu daripada bidang A.
- Definisi nilai 1 s/d 9:

- 1 —————> Sama penting
- 3 —————> Lebih penting
- 5 —————> Cukup penting
- 7 —————> Sangat penting
- 9 —————> Sangat penting sekali

Nilai 2,4,6, dan 8 merupakan nilai antara dua penilaian tersebut.

1.1 Pertanyaan mengenai pelaku pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar.

1.1.1. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, menurut bapak/ibu/saudara, pelaku manakah yang lebih penting?

1111	masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	pemda
1112	masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	investor
1113	pemda	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	investor

1.2. Pertanyaan mengenai kriteria/ bidang dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar.

1.2.1. Di pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan sasaran keterlibatan masyarakat, menurut bapak/ ibu/ saudara, kriteria manakah yang lebih penting?

1211	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial
1212	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Budaya
1213	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1214	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum
1215	Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Budaya
1216	Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1217	Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum
1218	Budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1219	Budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum
1220	Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum

1.2.2. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan sasaran keterlibatan pemerintah daerah, menurut bapak/ibu/saudara, kriteria manakah yang lebih penting?

1211	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial
1212	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Budaya
1213	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1214	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum
1215	Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Budaya
1216	Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1217	Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum
1218	Budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1219	Budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum
1220	Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum

1.2.3. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan sasaran keterlibatan **investor**, menurut bapak/ ibu/saudara, kriteria manakah yang lebih penting?

1211	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosial
1212	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Budaya
1213	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1214	Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum
1215	Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Budaya
1216	Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1217	Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum
1218	Budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan
1219	Budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum
1220	Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum

1.3. **Pertanyaan mengenai aspek dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar.**

1.3.1. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam bidang ekonomi**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1311	Peluang Investasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesejahteraan Masyarakat
------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

1.3.2. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemerintah daerah dalam bidang ekonomi**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1321	Peluang Investasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesejahteraan Masyarakat
------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

1.3.3. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam bidang ekonomi**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1331	Peluang Investasi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kesejahteraan Masyarakat
------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

1.3.4. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam bidang sosial**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1341	Perilaku Masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pendidikan
------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

1.3.5. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemerintah daerah dalam bidang sosial**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1351	Perilaku Masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pendidikan
------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

1.3.6. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam bidang sosial**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1361	Perilaku Masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pendidikan
------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

1.3.7. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam bidang budaya**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1371	Kelestarian Budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengembangan Budaya
------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

1.3.8. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemerintah daerah dalam bidang budaya**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1381	Kelestarian Budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengembangan Budaya
------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

1.3.9. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam bidang budaya**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1391	Kelestarian Budaya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengembangan Budaya
------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

1.3.10. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam bidang lingkungan**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

13101	Kerusakan Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ketersediaan Lahan
-------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

1.3.11. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemerintah daerah dalam bidang lingkungan**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

13111	Kerusakan Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ketersediaan Lahan
-------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

1.3.12. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam bidang lingkungan**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

13121	Kerusakan Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ketersediaan Lahan
-------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

1.3.13. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam bidang hukum**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

13131	Penegakan Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kebijakan Pemerintah
-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------

1.3.14. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemerintah daerah dalam bidang hukum**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

13141	Penegakan Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kebijakan Pemerintah
-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------

1.3.15. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam bidang hukum**, menurut bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penting untuk ditangani?

13151	Penegakan Hukum	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kebijakan Pemerintah
-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------

1.4. Pertanyaan mengenai alternatif dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar.

1.4.1. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspek peluang investasi, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1411	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
1412	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1413	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1414	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1415	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1416	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.2. Di dalam pengelolaa potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan pemda dalam aspek peluang investasi, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1421	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
1422	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1423	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1424	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1425	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1426	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.3. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan investor dalam aspek peluang investasi, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1431	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
1432	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1433	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1434	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1435	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1436	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.4. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspek kesejahteraan masyarakat, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1441	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
1442	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1443	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1444	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1445	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1446	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.5. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan pemda dalam aspek kesejahteraan masyarakat, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1451	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
1452	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1453	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1454	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1455	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1456	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.6. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan investor dalam aspek kesejahteraan masyarakat, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1461	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
1462	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1463	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1464	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1465	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1466	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.7. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspek perilaku masyarakat pesisir, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1471	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
1472	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1473	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1474	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1475	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1476	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.8. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan pemda dalam aspek perilaku masyarakat pesisir, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1481	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
1482	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1483	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1484	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1485	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1486	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.9. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan investor dalam aspek perilaku masyarakat pesisir, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

1491	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
1492	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1493	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1494	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
1495	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
1496	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.10. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **masyarakat dalam aspek pendidikan**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14101	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14102	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14103	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14104	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14105	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14106	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.11. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **pemda dalam aspek pendidikan**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14111	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14112	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14113	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14114	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14115	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14116	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.12. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan **investor dalam aspek pendidikan**, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14121	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14122	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14123	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14124	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14125	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14126	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.13. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspek kelestarian budaya, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

01	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
02	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
03	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
04	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
05	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
06	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.14. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan pemda dalam aspek kelestarian budaya, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

01	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
02	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
03	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
04	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
05	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
06	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.15. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan investor dalam aspek kelestarian budaya, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

01	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
02	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
03	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
04	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
05	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
06	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.16. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspek pengembangan budaya, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14161	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14162	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14163	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14164	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14165	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14166	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.17. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan pemda dalam aspek pengembangan budaya, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14171	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14172	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14173	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14174	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14175	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14176	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.18. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan investor dalam aspek pengembangan budaya, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14181	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14182	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14183	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14184	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14185	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14186	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.19. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspek kerusakan lingkungan, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14191	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14192	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14193	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14194	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14195	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14196	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.20. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan pemda dalam aspek kerusakan lingkungan, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14201	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14202	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14203	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14204	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14205	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14206	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.21. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan investor dalam aspek kerusakan lingkungan, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14211	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14212	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14213	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14214	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14215	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14216	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.22. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspek ketersediaan lahan, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14221	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14222	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14223	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14224	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14225	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14226	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.23. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan pemda dalam aspek ketersediaan lahan, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14231	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14232	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14233	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14234	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14235	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14236	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.24. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan investor dalam aspek ketersediaan lahan, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14241	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14242	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14243	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14244	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14245	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14246	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.25. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspek penegakan hukum, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14221	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14222	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14223	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14224	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14225	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14226	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.26. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan pemda dalam aspek penegakan hukum, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14231	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14232	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14233	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14234	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14235	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14236	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.27. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan investor dalam aspek penegakan hukum, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14241	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14242	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14243	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14244	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14245	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14246	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.28. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspek kebijakan pemerintah, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

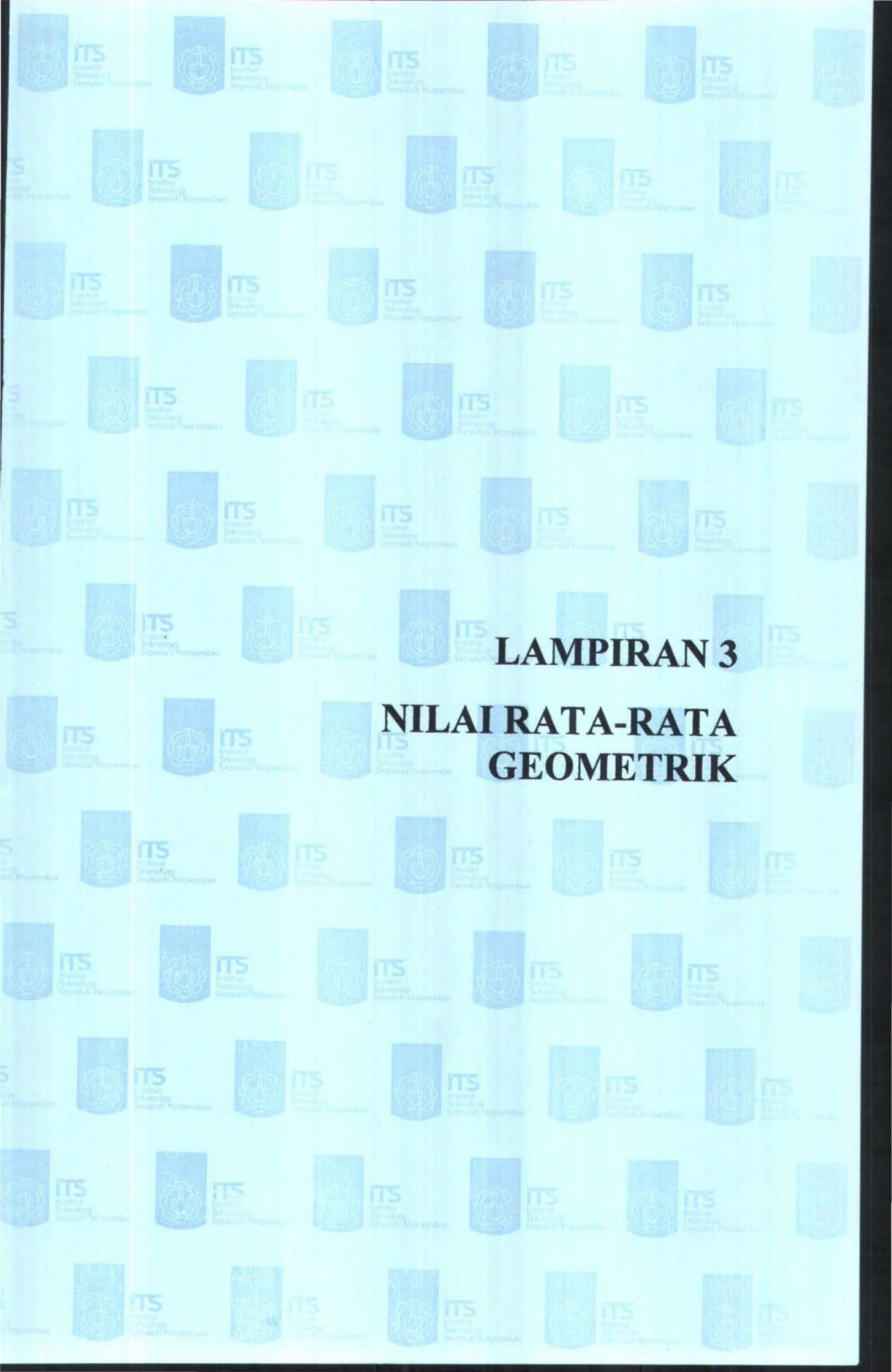
14221	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14222	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14223	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14224	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14225	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14226	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.29. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan pemda dalam aspek kebijakan pemerintah, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14231	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14232	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14233	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14234	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14235	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14236	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

1.4.30. Di dalam pengelolaan potensi wisata pantai di Kab. Blitar, dengan mempertimbangkan keterlibatan investor dalam aspek kebijakan pemerintah, menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk ditangani?

14241	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana
14242	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14243	Pengelolaan Pariwisata yang terarah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14244	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat
14245	Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai
14246	Pembinaan & Kerjasama dengan masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rehabilitasi dan Konservasi Pantai

The background of the page is a repeating pattern of the ITS logo, which consists of a blue shield with a white emblem and the text 'ITS Institut Teknologi Sepuluh Nopember' to its right.

LAMPIRAN 3

NILAI RATA-RATA GEOMETRIK

NILAI RATA-RATA GEOMETRIK

Tabel 1 Nilai Rata-rata Geometrik Pelaku Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat

No	Pelaku	Nilai Rata-rata Geometrik
1	Masyarakat - Pemda	0,7
2	Masyarakat - Investor	2,3
3	Pemda - Investor	1,6

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 2 Nilai Rata-rata Geometrik Bidang Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat

No	Bidang	Nilai Rata-rata Geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Ekonomi - Sosial	5,1	3,1	4,0
2	Ekonomi - Budaya	1,7	2,5	3,6
3	Ekonomi - Lingkungan	0,6	0,8	3,3
4	Ekonomi - Hukum	3,0	1,1	2,5
5	Sosial - Budaya	0,7	0,9	1,9
6	Sosial - Lingkungan	0,6	0,3	1,8
7	Sosial - Hukum	1,9	0,5	1,2
8	Budaya - Lingkungan	0,8	0,7	1,5
9	Budaya - Hukum	4,1	2,1	2,0
10	Lingkungan - Hukum	5,1	2,1	2,7

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 3 Nilai Rata-rata Geometrik Aspek Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Bidang Ekonomi

No	Aspek	Nilai rata-rata Geometri		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peluang Investasi - Kesejahteraan Masyarakat	0,5	1,2	8,5

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 4 Nilai Rata-rata Geometrik Aspek Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Bidang Sosial

No	Aspek	Nilai rata-rata Geometri		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Perilaku Masyarakat - Pendidikan	3,1	2,7	8,0

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 5 Nilai Rata-rata Geometrik Aspek Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Bidang Budaya

No	Aspek	Nilai rata-rata Geometri		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Kelestarian Budaya - Pengembangan Budaya	1,6	2,1	0,2

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 6 Nilai Rata-rata Geometrik Aspek Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Bidang Lingkungan

No	Aspek	Nilai rata-rata Geometri		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Kerusakan Lingkungan - Ketersediaan Lahan	4,7	4,9	5,2

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 7 Nilai Rata-rata Geometrik Aspek Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Bidang Hukum

No	Aspek	Nilai rata-rata Geometri		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Penegakan Hukum - Kebijakan Pemerintah	1,8	2,2	7,9

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 8 Nilai Rata-rata Geometrik Kebijakan Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Aspek Peluang Investasi

No	Kebijakan	Nilai rata-rata geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peng. wisata yang Terarah - Pen. Sarana dan Prasarana	0,6	0,7	1,5
2	Peng. wisata yang Terarah - Pem. dan Kerjasama Masya	2,0	0,8	0,6
3	Peng. wisata yang Terarah - Rehab. dan Konserv. Pantai	1,0	0,9	0,7
4	Pen. Sarana dan Prasarana - Pem. dan Kerjasama Masya	1,3	0,7	0,7
5	Pen. Sarana dan Prasarana - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,1	2,2	1,0
6	Pem. dan Kerjasama Masya - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,0	1,8	1,0

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 9 Nilai Rata-rata Geometrik Kebijakan Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Kebijakan	Nilai rata-rata geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peng. wisata yang Terarah - Pen. Sarana dan Prasarana	0,4	0,8	1,0
2	Peng. wisata yang Terarah - Pem. dan Kerjasama Masya	0,2	0,6	0,9
3	Peng. wisata yang Terarah - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,9	1,7	1,1
4	Pen. Sarana dan Prasarana - Pem. dan Kerjasama Masya	1,0	0,8	1,0
5	Pen. Sarana dan Prasarana - Rehab. dan Konserv. Pantai	4,8	1,6	1,1
6	Pem. dan Kerjasama Masya - Rehab. dan Konserv. Pantai	3,4	1,8	1,2

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 10 Nilai Rata-rata Geometrik Kebijakan Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Aspek Perilaku Masyarakat

No	Kebijakan	Nilai rata-rata geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peng. wisata yang Terarah - Pen. Sarana dan Prasarana	1,9	1,1	1,6
2	Peng. wisata yang Terarah - Pem. dan Kerjasama Masya	1,0	0,4	0,5
3	Peng. wisata yang Terarah - Rehab. dan Konserv. Pantai	1,4	1,0	1,6
4	Pen. Sarana dan Prasarana - Pem. dan Kerjasama Masya	0,5	0,6	0,7
5	Pen. Sarana dan Prasarana - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,8	1,5	0,7
6	Pem. dan Kerjasama Masya - Rehab. dan Konserv. Pantai	4,3	2,3	0,7

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 11 Nilai Rata-rata Geometrik Kebijakan Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Aspek Pendidikan

No	Kebijakan	Nilai rata-rata geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peng. wisata yang Terarah - Pen. Sarana dan Prasarana	0,5	0,8	1,5
2	Peng. wisata yang Terarah - Pem. dan Kerjasama Masya	0,6	0,3	0,6
3	Peng. wisata yang Terarah - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,1	1,3	1,8
4	Pen. Sarana dan Prasarana - Pem. dan Kerjasama Masya	0,4	0,7	0,7
5	Pen. Sarana dan Prasarana - Rehab. dan Konserv. Pantai	3,2	2,1	0,7
6	Pem. dan Kerjasama Masya - Rehab. dan Konserv. Pantai	4,7	3,3	1,1

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 12 Nilai Rata-rata Geometrik Kebijakan Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Aspek Kelestarian Budaya

No	Kebijakan	Nilai rata-rata geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peng. wisata yang Terarah - Pen. Sarana dan Prasarana	1,8	1,4	1,0
2	Peng. wisata yang Terarah - Pem. dan Kerjasama Masya	0,7	0,3	0,6
3	Peng. wisata yang Terarah - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,1	1,6	1,0
4	Pen. Sarana dan Prasarana - Pem. dan Kerjasama Masya	0,8	1,0	0,7
5	Pen. Sarana dan Prasarana - Rehab. dan Konserv. Pantai	4,5	2,0	1,1
6	Pem. dan Kerjasama Masya - Rehab. dan Konserv. Pantai	4,8	3,2	1,7

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 13 Nilai Rata-rata Geometrik Kebijakan Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Aspek Pengembangan Budaya

No	Kebijakan	Nilai rata-rata geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peng. wisata yang Terarah - Pen. Sarana dan Prasarana	1,1	0,7	1,0
2	Peng. wisata yang Terarah - Pem. dan Kerjasama Masya	0,7	0,6	0,7
3	Peng. wisata yang Terarah - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,4	1,9	1,5
4	Pen. Sarana dan Prasarana - Pem. dan Kerjasama Masya	0,6	0,7	0,7
5	Pen. Sarana dan Prasarana - Rehab. dan Konserv. Pantai	4,8	2,3	1,1
6	Pem. dan Kerjasama Masya - Rehab. dan Konserv. Pantai	4,3	1,1	1,0

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 14 Nilai Rata-rata Geometrik Kebijakan Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Aspek Kerusakan Lingkungan

No	Kebijakan	Nilai rata-rata geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peng. wisata yang Terarah - Pen. Sarana dan Prasarana	0,8	0,7	1,5
2	Peng. wisata yang Terarah - Pem. dan Kerjasama Masya	1,1	0,6	0,7
3	Peng. wisata yang Terarah - Rehab. dan Konserv. Pantai	0,4	0,7	1,0
4	Pen. Sarana dan Prasarana - Pem. dan Kerjasama Masya	1,1	0,7	0,6
5	Pen. Sarana dan Prasarana - Rehab. dan Konserv. Pantai	0,4	0,7	0,6
6	Pem. dan Kerjasama Masya - Rehab. dan Konserv. Pantai	0,6	1,6	1,0

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 15 Nilai Rata-rata Geometrik Kebijakan Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Aspek Ketersediaan Lahan

No	Kebijakan	Nilai rata-rata geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peng. wisata yang Terarah - Pen. Sarana dan Prasarana	0,7	0,9	1,0
2	Peng. wisata yang Terarah - Pem. dan Kerjasama Masya	1,5	1,0	1,0
3	Peng. wisata yang Terarah - Rehab. dan Konserv. Pantai	3,1	0,9	1,0
4	Pen. Sarana dan Prasarana - Pem. dan Kerjasama Masya	1,4	0,9	1,0
5	Pen. Sarana dan Prasarana - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,5	1,1	1,0
6	Pem. dan Kerjasama Masya - Rehab. dan Konserv. Pantai	1,6	1,8	1,5

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 16 Nilai Rata-rata Geometrik Kebijakan Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Aspek Penegakan Hukum

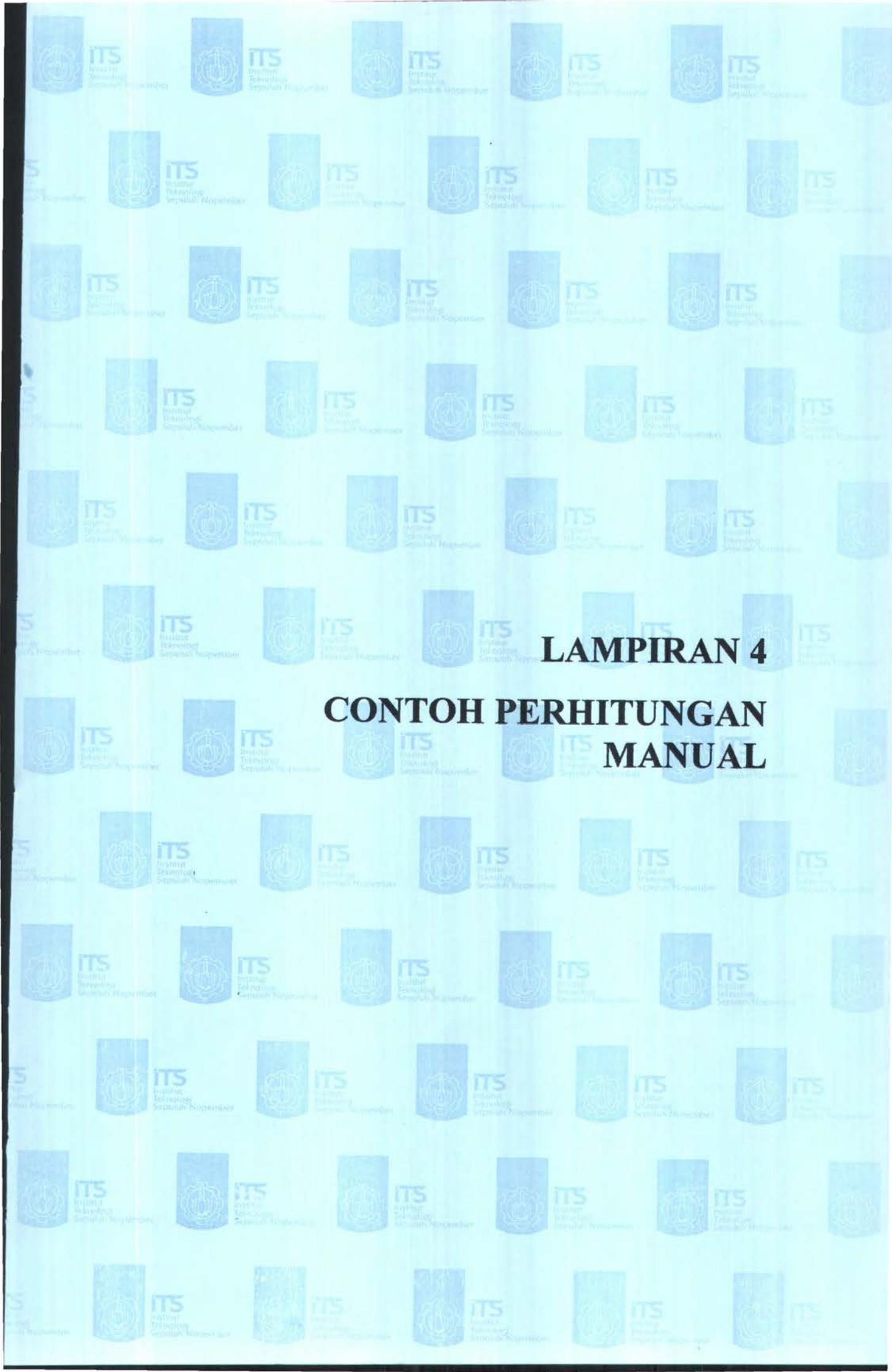
No	Kebijakan	Nilai rata-rata geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peng. wisata yang Terarah - Pen. Sarana dan Prasarana	2,0	1,4	1,5
2	Peng. wisata yang Terarah - Pem. dan Kerjasama Masya	0,9	0,5	1,0
3	Peng. wisata yang Terarah - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,7	1,6	1,5
4	Pen. Sarana dan Prasarana - Pem. dan Kerjasama Masya	0,5	0,4	0,9
5	Pen. Sarana dan Prasarana - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,8	1,8	0,7
6	Pem. dan Kerjasama Masya - Rehab. dan Konserv. Pantai	3,7	3,4	1,0

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 17 Nilai Rata-rata Geometrik Kebijakan Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kabupaten Blitar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Berdasarkan Aspek Kebijakan Pemerintah

No	Kebijakan	Nilai rata-rata geometrik		
		Masyarakat	Pemda	Investor
1	Peng. wisata yang Terarah - Pen. Sarana dan Prasarana	0,9	0,7	1,5
2	Peng. wisata yang Terarah - Pem. dan Kerjasama Masya	1,6	0,5	0,7
3	Peng. wisata yang Terarah - Rehab. dan Konserv. Pantai	2,2	1,3	1,0
4	Pen. Sarana dan Prasarana - Pem. dan Kerjasama Masya	2,0	0,8	1,0
5	Pen. Sarana dan Prasarana - Rehab. dan Konserv. Pantai	3,2	0,7	1,0
6	Pem. dan Kerjasama Masya - Rehab. dan Konserv. Pantai	3,1	2,9	1,4

Sumber : hasil pengolahan

The background of the page is a repeating pattern of the ITS logo, which consists of a stylized emblem and the text 'ITS Institut Teknologi Sepuluh Nopember'.

LAMPIRAN 4

CONTOH PERHITUNGAN MANUAL

CONTOH PERHITUNGAN MANUAL

1. Perhitungan Matrik Perbandingan Berpasangan

Matriks	EKONOMI	SOSIAL	BUDAYA	LINGKUNGAN	HUKUM
EKONOMI	1	3,1	2,5	0,8	1,1
SOSIAL	0,3	1	0,9	0,3	0,5
BUDAYA	0,4	1,1	1	0,7	2,1
LINGKUNGAN	1,2	3,6	1,5	1	2,1
HUKUM	0,9	2,1	0,5	0,5	1
Jumlah	3,8	10,8	6,4	3,2	6,9

2. Perhitungan Normalisasi Matrik

Matriks	EKONOMI	SOSIAL	BUDAYA	LINGKUNGAN	HUKUM	Bobot Priorias
EKONOMI	0,260	0,285	0,394	0,252	0,164	0,271
SOSIAL	0,084	0,092	0,138	0,087	0,071	0,095
BUDAYA	0,104	0,105	0,157	0,205	0,310	0,176
LINGKUNGAN	0,320	0,328	0,237	0,310	0,310	0,301
HUKUM	0,231	0,190	0,074	0,146	0,146	0,157

3. Perhitungan *Eigenvector*

Matriks	EKONOMI	SOSIAL	BUDAYA	LINGKUNGAN	HUKUM	Jumlah
EKONOMI	0,2709	0,2918	0,4415	0,2446	0,1773	1,426
SOSIAL	0,0878	0,0945	0,1550	0,0847	0,0763	0,498
BUDAYA	0,1080	0,1074	0,1761	0,1990	0,3347	0,925
LINGKUNGAN	0,3334	0,3359	0,2664	0,3010	0,3343	1,571
HUKUM	0,2407	0,1951	0,0828	0,1418	0,1575	0,818

4. Perhitungan *Eigenvalue*

Jumlah		Bobot Prioritas		
1,4261		0,2709		5,264
0,4982	:	0,0945	=	5,272
0,9251		0,1761		5,254
1,5711		0,3010		5,219
0,8179		0,1575		5,194
			Total =	26,203

5. Perhitungan *Eigenvalue maksimum* (λ_{maks})

$$\lambda_{maks} = \text{Eigenvalue total} / n$$

$$\lambda_{maks} = 5,24$$

6. Perhitungan Indeks Konsistensi (CI)

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1}$$

$$CI = 0,060$$

7. Perhitungan Rasio Konsistensi (CR)

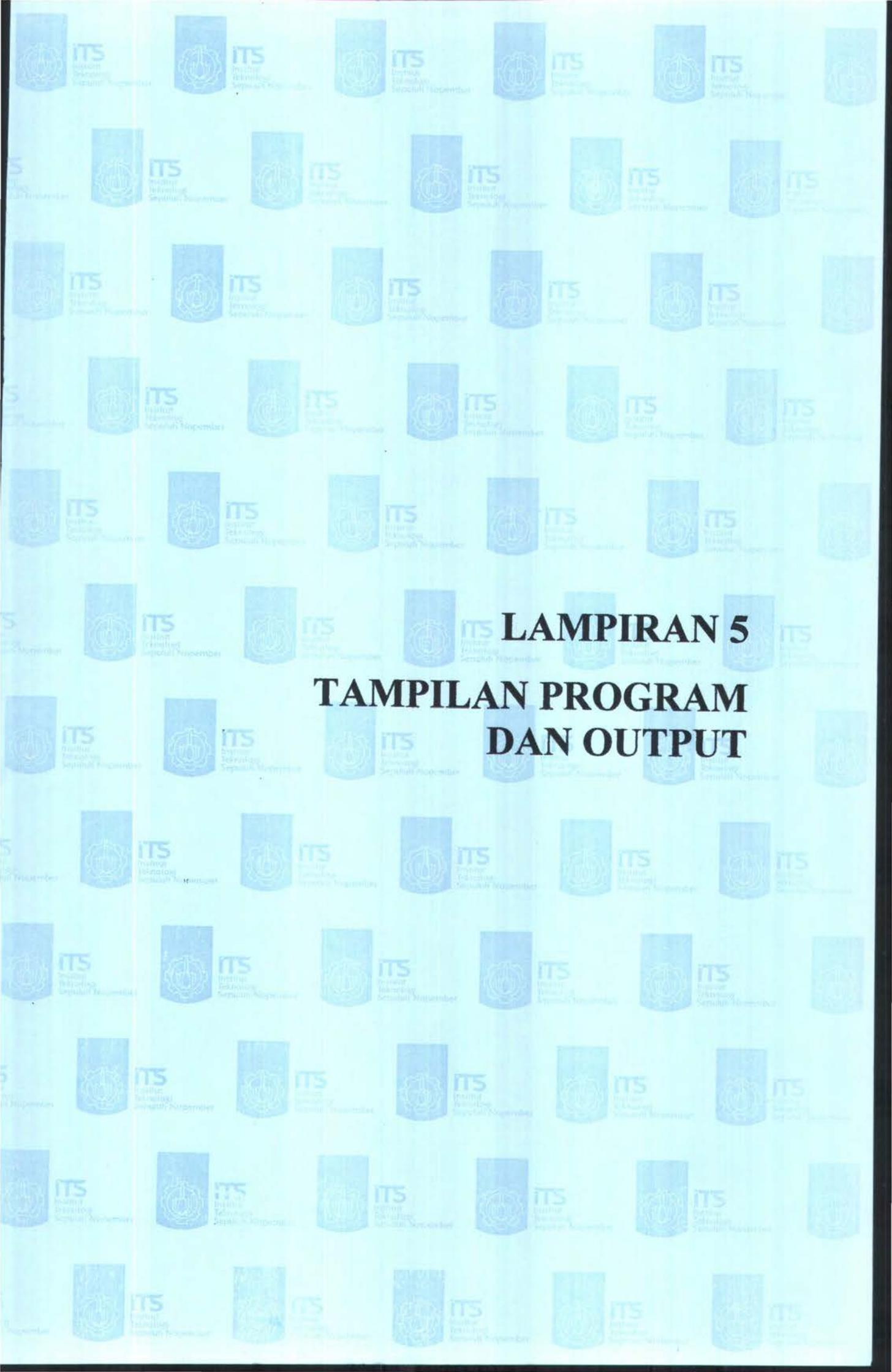
$$RI (\text{Indeks Random}) = 1.12$$

Untuk orde matrik 5

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

$$CR = 0,054$$

$$CR \leq 0.1 \text{ atau } 10 \% \\ \text{(memenuhi)}$$

The background of the page is a repeating pattern of the ITS logo, which consists of a stylized emblem and the text 'ITS Institut Teknologi Sepuluh Nopember'.

LAMPIRAN 5

TAMPILAN PROGRAM

DAN OUTPUT

Expert Choice for Windows: F:ATATOMI-1AECBLITAR

File Edit Assessment Synthesis Sensitivity-Graphs Utilities Help

Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kab. Bitar Berbasis Budaya

Distributive Mode
Local=1,0 Global=1,0
Level=0 Node=0

Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kab. Bitar Berbasis Budaya

GOAL (1,000)		
MASYA (0,376)	PENDA (0,417)	INVESTOR (0,207)
EKONOMI ▾	EKONOMI ▾	EKONOMI ▾
SOSIAL ▾	SOSIAL ▾	SOSIAL ▾
BUDAYA ▾	BUDAYA ▾	BUDAYA ▾
LINGK ▾	LINGK ▾	LINGK ▾
HUKUM ▾	HUKUM ▾	HUKUM ▾

PPT PSP PKM RKP

Printing

Objekt. Potrait Zoom 50 Border Complete Print

Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kab. Bitar Berbasis Budaya

Abstraksi	Definisi
BUDAYA	BUDAYA
EKONOMI	EKONOMI
HUKUM	HUKUM
INDUSTRI	INDUSTRI
INVEST	PELUANG INVESTASI
INVESTOR	INVESTOR
K M	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KEBUJAKAN	KEBUJAKAN PEMERINTAH
KEMBANG	PENGEMBANGAN BUDAYA
LAHAN	KETERSEDIAAN LAHAN
LESTARI	KELESTARIAN BUDAYA
LINGK	LINGKUNGAN
MASYA	MASYARAKAT
P HUKUM	PENEGAKAN HUKUM
P K M	PEMBINAAN DAN KERJASAMA MASYARAKAT
P P T	PENGLOLAAN PARIWISATA YANG TERARAH
P S P	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PENDA	PENDA
PEND	PENDIDIKAN
PERILAKU	PERILAKU MASYARAKAT
R K P	REHABILITASI DAN KONSERVASI PANTAI
RUSAK	KERUSAKAN LINGKUNGAN
SOSIAL	SOSIAL

to Clipboard to File Exit

GOAL: Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kab. Blitar Berbasis Budaya

File Options Inconsistency

Preliminary Verbal **Matrix** Questionnaire Graphic

With respect to GOAL
PEMDA: PEMDA
 is 1,4 times (EQUALLY) more IMPORTANT than
MASYA: MASYARAKAT

[Best Fit]	PEMDA	INVESTOR
MASYA	1,4	2,3
PEMDA		1,8

Equal 2^a Moderate 4^a Strong 6^a V. Strong 8^a Extreme

Calculate Abandon Invert Enter Product Structure Link Elem

Expert Choice for Windows: F:\TK (Dok-1)\TK\SW\TK2

Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kab. Blitar Berbasis Budaya

Distributive Mode
 Local=1,0 Global=1,0
 Level=0 Node=0

Priorities

Derived Priorities with respect to GOAL

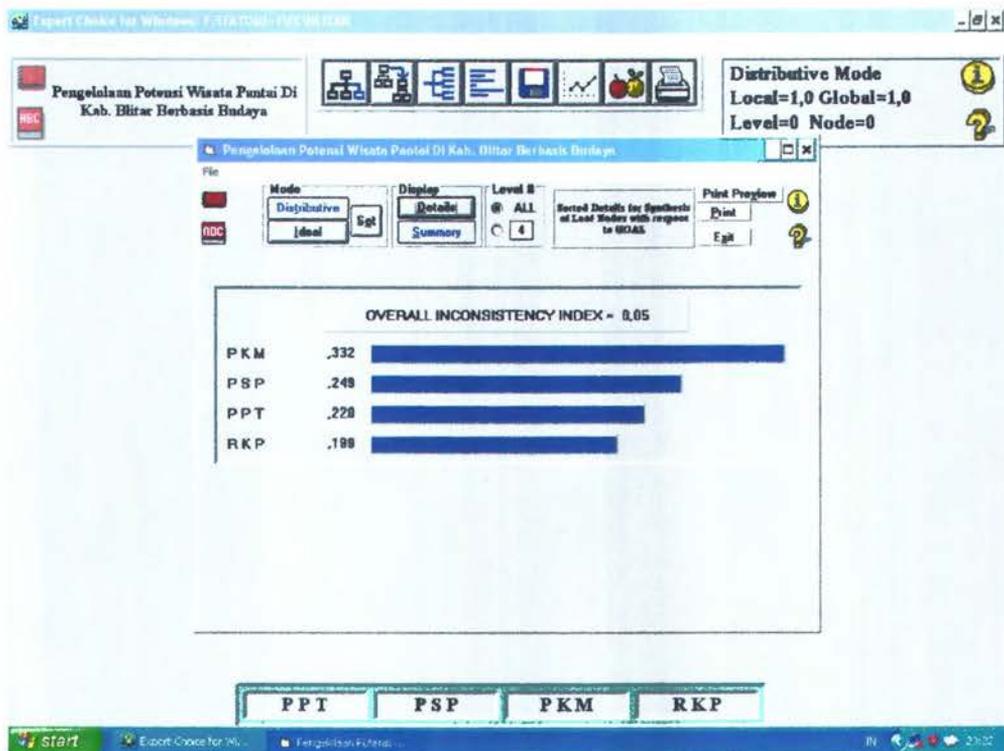
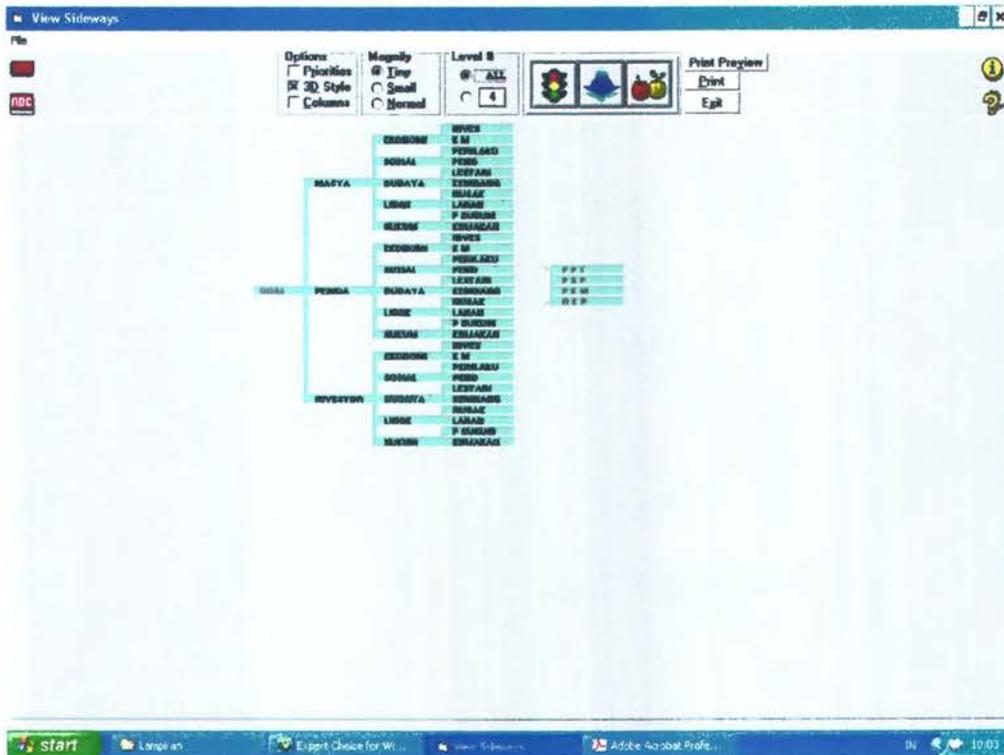
INCONSISTENCY RATIO = 0,05

An Inconsistency Ratio of .1 or more may warrant some investigation.

MASYA	.376	
PEMDA	.417	
INVESTOR	.207	

Exit

PPT PSP PKM RKP



HASIL PROGRAM EXPERT CHOICE

Pengelolaan Potensi Wisata Pantai Di Kab. Blitar Berbasis Budaya

Synthesis of Leaf Nodes with respect to GOAL

Distributive Mode

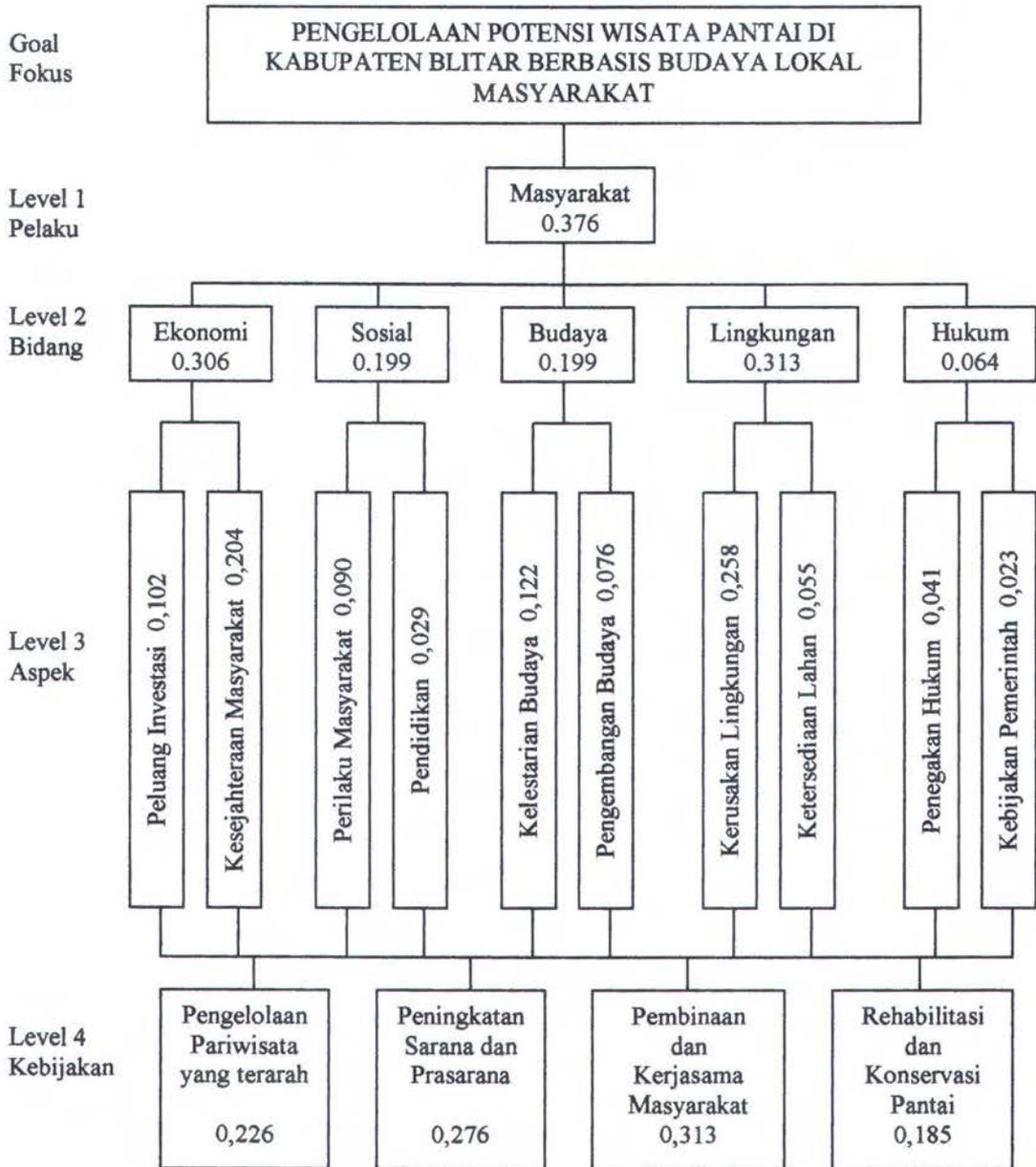
OVERALL INCONSISTENCY INDEX = 0,05

LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
PEMDA =,417				
	LINGK =,124			
		RUSAK =,103		
			P K M =,035	
			R K P =,026	
			P S P =,023	
			P P T =,018	
		LAHAN =,021		
			P K M =,006	
			P S P =,005	
			P P T =,005	
			R K P =,005	
	EKONOMI =,122			
		INVES =,066		
			P K M =,022	
			P S P =,020	
			P P T =,013	
			R K P =,012	
		K M =,055		
			P K M =,019	
			P S P =,015	
			P P T =,013	
			R K P =,009	
	BUDAYA =,073			
		LESTARI =,049		
			P K M =,021	
			P S P =,012	
			P P T =,010	
			R K P =,006	
		KEMBANG =,023		
			P K M =,007	
			P S P =,007	
			P P T =,005	
			R K P =,004	
	HUKUM =,058			
		P HUKUM =,040		
			P K M =,018	
			P P T =,009	
			P S P =,008	
			R K P =,005	
		KBIJAKAN =,018		
			P K M =,007	
			P S P =,004	

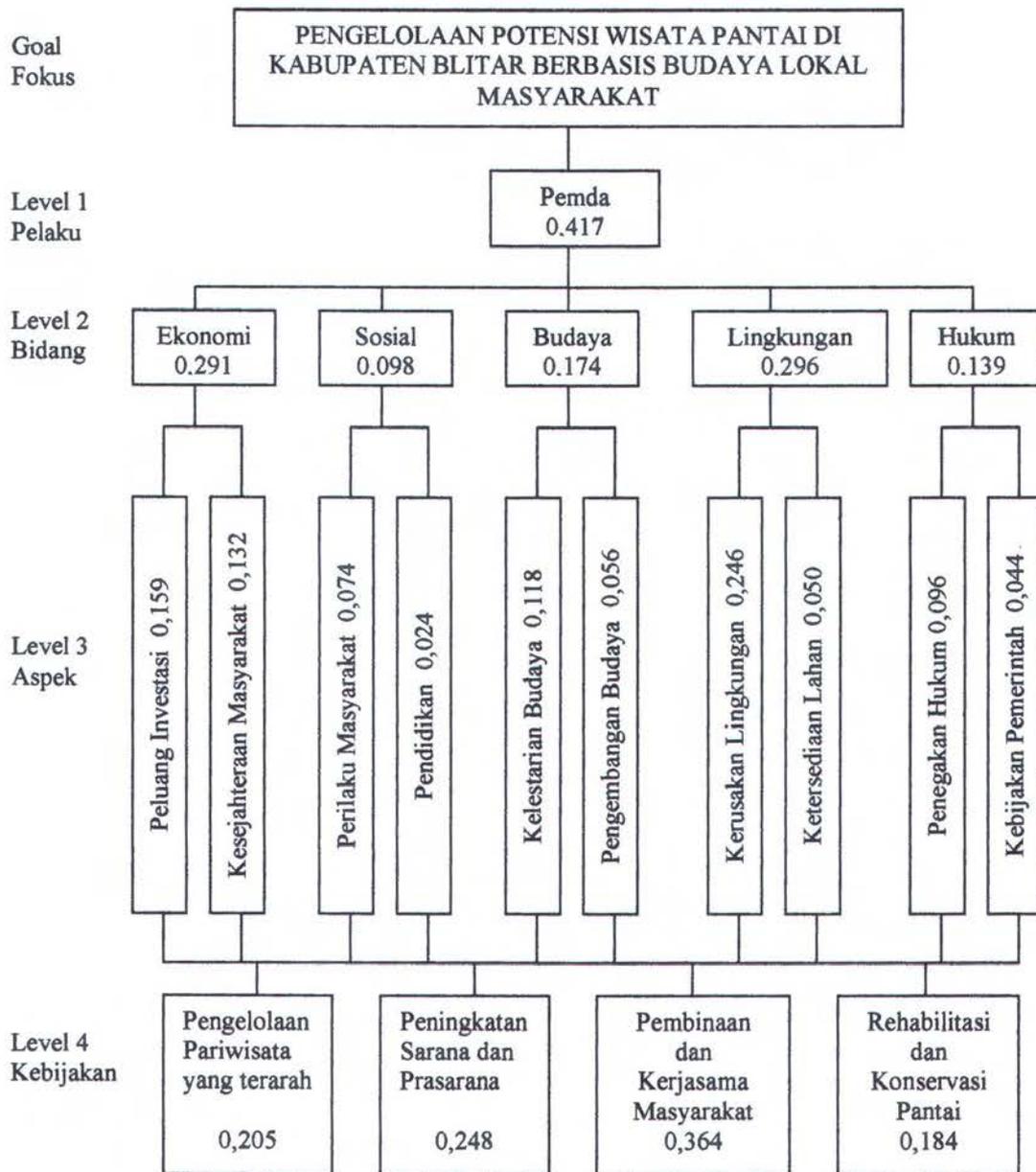
			P P T	=,003
			R K P	=,003
SOSIAL	=,041			
		PERILAKU	=,031	
			P K M	=,013
			P S P	=,007
			P P T	=,006
			R K P	=,005
		PEND	=,010	
			P K M	=,004
			P S P	=,003
			P P T	=,002
			R K P	=,001
MASYA	=,376			
		LINGK	=,118	
		RUSAK	=,097	
			R K P	=,041
			P S P	=,020
			P K M	=,019
			P P T	=,017
		LAHAN	=,021	
			P S P	=,007
			P P T	=,006
			P K M	=,004
			R K P	=,003
EKONOMI	=,115			
		K M	=,077	
			P K M	=,032
			P S P	=,028
			P P T	=,011
			R K P	=,006
		INVES	=,038	
			P S P	=,013
			P P T	=,010
			P K M	=,009
			R K P	=,006
BUDAYA	=,075			
		LESTARI	=,046	
			P K M	=,017
			P P T	=,013
			P S P	=,012
			R K P	=,004
		KEMBANG	=,029	
			P K M	=,011
			P S P	=,008
			P P T	=,007
			R K P	=,002
SOSIAL	=,045			
		PERILAKU	=,034	
			P K M	=,013
			P P T	=,010
			P S P	=,007
			R K P	=,004
		PEND	=,011	
			P K M	=,005
			P S P	=,003
			P P T	=,002
			R K P	<.001
HUKUM	=,024			

		P HUKUM =,016		
			P K M	=,006
			P P T	=,005
			P S P	=,003
			R K P	=,001
		KBIJAKAN=,009		
			P S P	=,003
			P P T	=,003
			P K M	=,002
			R K P	<.001
INVESTOR=,207				
	EKONOMI =,091			
		INVES =,082		
			P K M	=,025
			R K P	=,022
			P P T	=,018
			P S P	=,017
		K M =,010		
			P K M	=,003
			P S P	=,002
			P P T	=,002
			R K P	=,002
	SOSIAL =,036			
		PERILAKU=,032		
			P K M	=,010
			P P T	=,008
			R K P	=,008
			P S P	=,006
		PEND =,004		
			P K M	=,001
			P P T	=,001
			R K P	<.001
			P S P	<.001
	BUDAYA =,030			
		LESTARI =,025		
			P K M	=,009
			P S P	=,006
			P P T	=,005
			R K P	=,005
		KEMBANG =,005		
			P K M	=,001
			P P T	=,001
			P S P	=,001
			R K P	=,001
	LINGK =,029			
		RUSAK =,024		
			P K M	=,007
			R K P	=,007
			P P T	=,006
			P S P	=,004
		LAHAN =,005		
			P K M	=,001
			P P T	=,001
			P S P	=,001
			R K P	=,001
	HUKUM =,021			
		P HUKUM =,019		
			P P T	=,006
			P K M	=,005

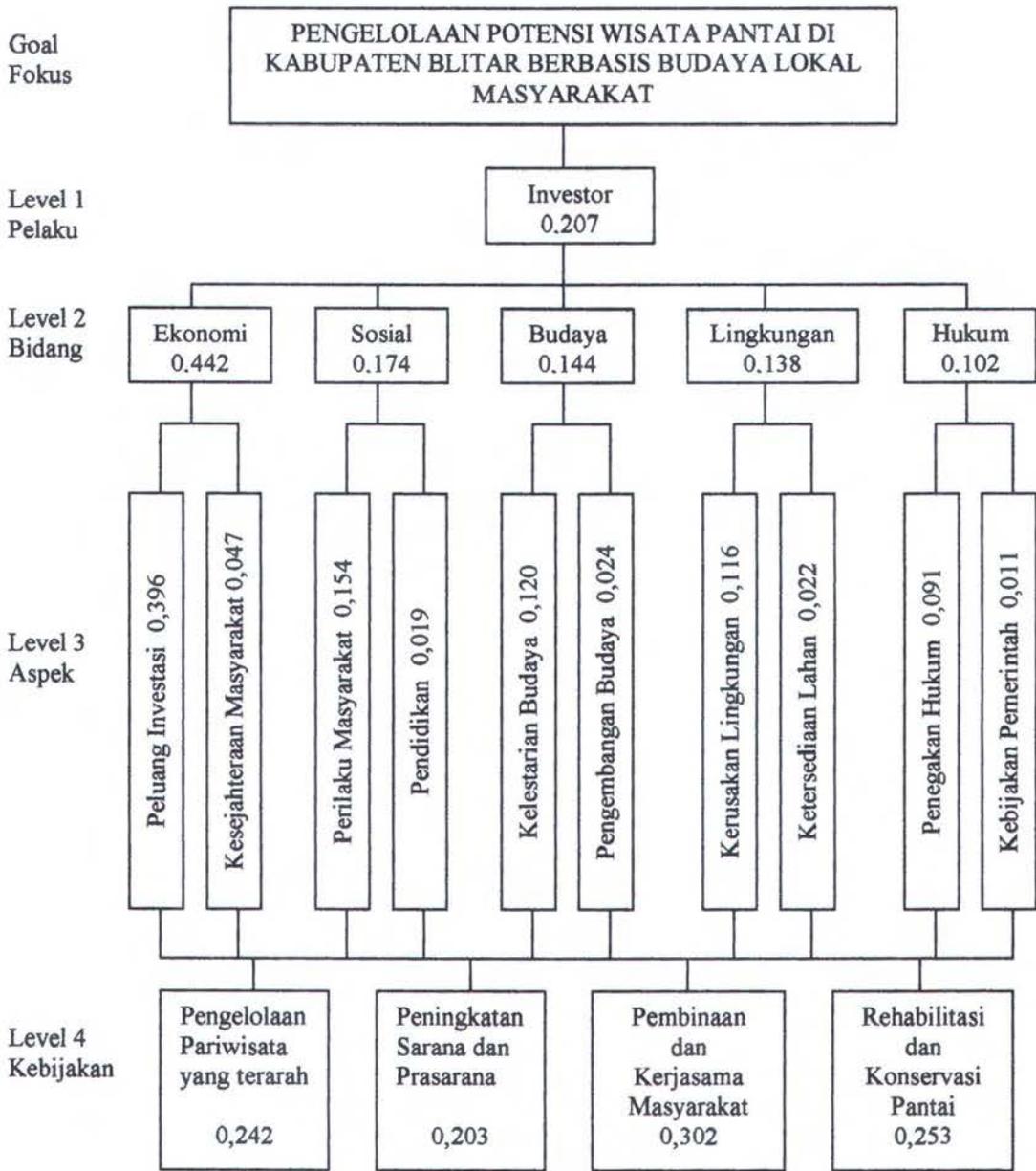
	R K P	=,005
	P S P	=,004
KBIJAKAN=,002		
	P K M	<.001
	P P T	<.001
	R K P	<.001
	P S P	<.001



Bobot prioritas berdasarkan pelaku masyarakat

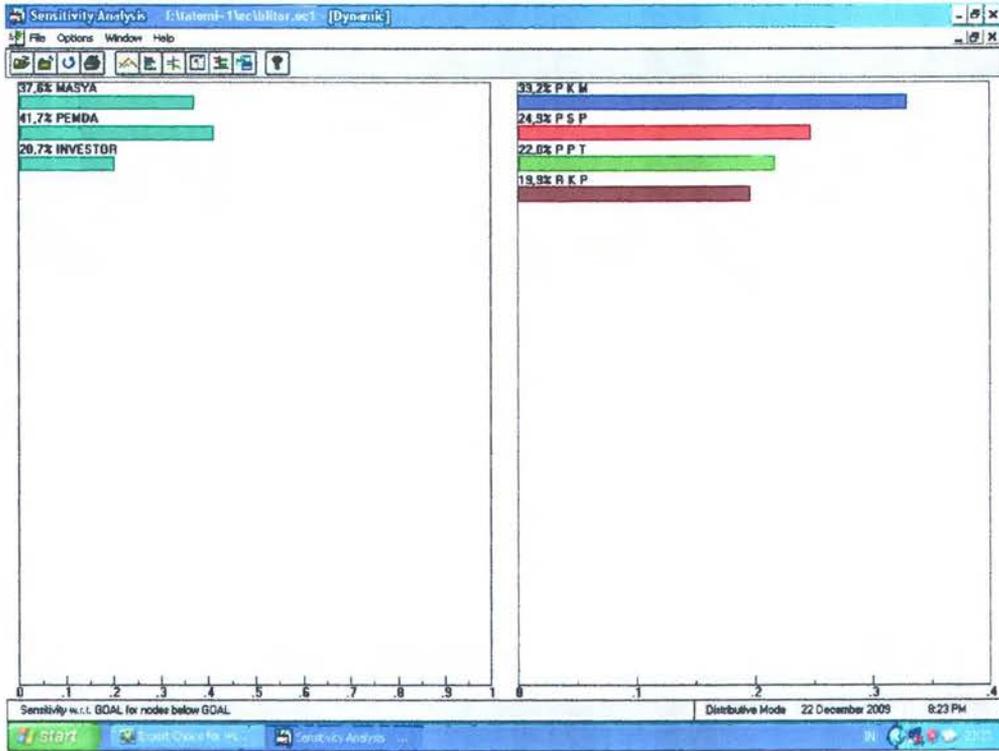


Bobot prioritas berdasarkan pelaku pemda

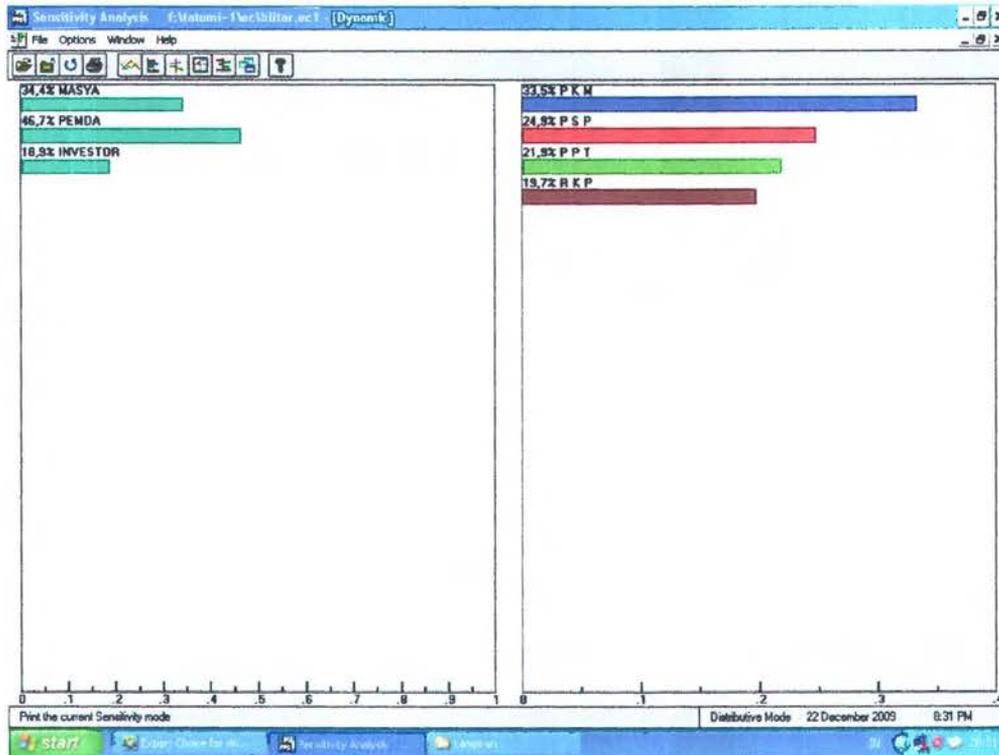


Bobot prioritas berdasarkan pelaku investor

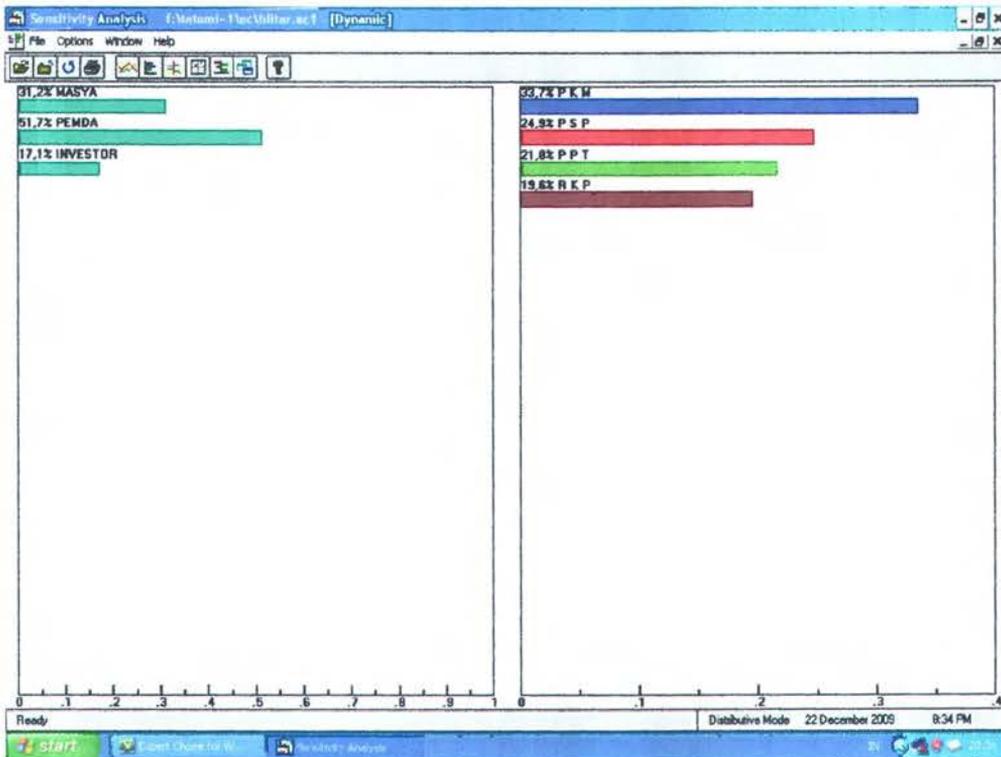
GRAFIK ANALISA SENSITIFITAS



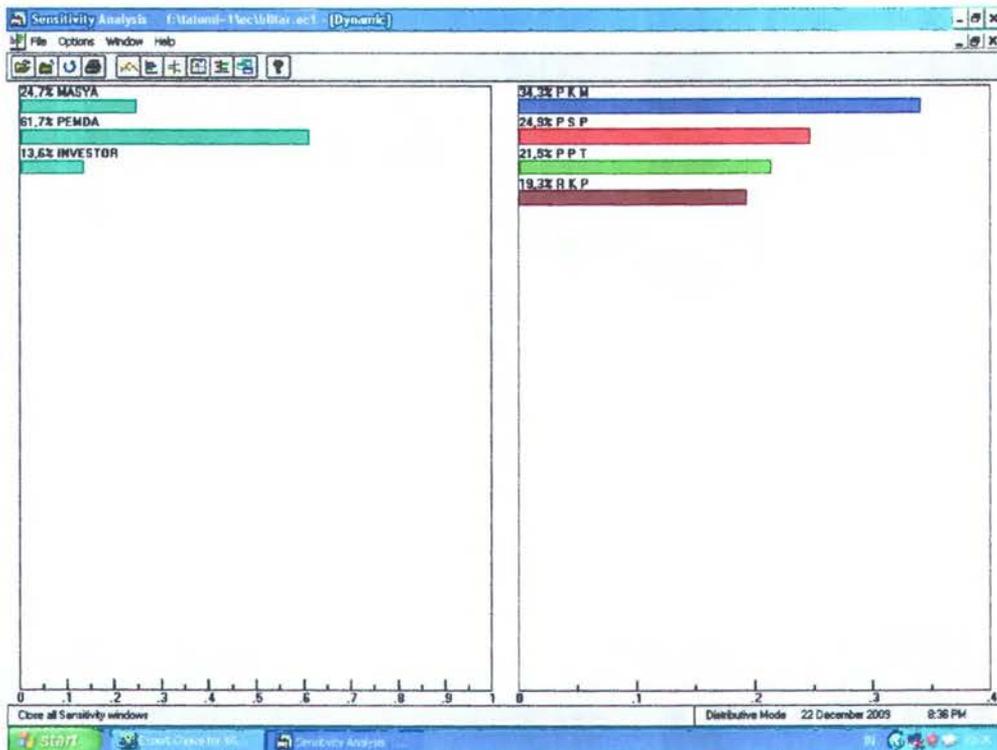
Gambar 1 Grafik *Mode Dynamic* Berdasarkan Data Awal



Gambar 2 Grafik *Mode Dynamic* Dengan perubahan 5%



Gambar 3 Grafik *Mode Dynamic* Dengan perubahan 10%



Gambar 4 Grafik *Mode Dynamic* Dengan perubahan 20%

BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Tomi Dwicahyo, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 Pebruari 1982, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis telah memulai pendidikan formal di SDN Panjang Jiwo I Surabaya selanjutnya penulis melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah di SMPN 17 Surabaya dan SMAN 16 Surabaya. Setelah lulus dari pendidikan menengah, penulis melanjutkan ke pendidikan tinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tahun 2001 dan diterima di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada Jurusan Teknik Kelautan dan terdaftar sebagai mahasiswa dengan NRP 4301 100 036 dan lulus pada tahun 2010.